



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

LAKIP 2023

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TA.2023



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN JAWA I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I ini dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I terdiri dari 1 Pejabat Perbendaharaan yang melaksanakan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu: “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi DKI Jakarta dan Banten” akan dicapai melalui 2 Program dengan 10 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, sehingga Laporan Kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan selama TA. 2023. Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sejak awal sampai dengan berakhirnya TA. 2023 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dalam rangka mendukung mencapai Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun awal Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian PUPR.

Jakarta, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Balai Penyediaan Perumahan Jawa I



Firda Ismet, S.T., MUDD

NIP. 19710603 199903 1 002 7'

RINGKASAN EKSEKUTIF

SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis, dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.

2. Sasaran Program

Sesuai dengan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman dengan indikator, yaitu:

- a. Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan
- b. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU

Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, dengan sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Program

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pencapaian program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator program Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Indonesia sebesar 4,05% dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Selain itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I juga berkontribusi pada peningkatan jumlah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU sebesar 0,50% secara nasional yaitu dengan capaian 100% pada tahun 2023.

2. Program Dukungan Manajemen

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I telah menyelenggarakan program dukungan manajemen dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan dukungan manajemen kementerian PUPR dengan kinerja sebesar 100% pada tahun 2023.

Capaian Berdasarkan PK dan Renstra

Terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan target yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu penurunan target pada beberapa indikator kinerja. Penurunan target ini dikarenakan adanya refocusing anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan sehingga target PK mengikuti DIPA yang telah diberikan. Pada revisi terakhir PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, terdapat dua sasaran kegiatan, yang (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni, dan (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Balai P2P Jawa I perlu mencapai target 5 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan; 3.477 unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; 244 unit Rumah Susun yang dibangun; 4 Tower Rumah Susun yang dipelihara; 157 unit Rumah Khusus yang dibangun; 2.836 unit Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun; dan 2 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Dokumen Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan merupakan gabungan antara target dan capaian dari 3 (tiga) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Banten.

1. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET DIPA
Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman			
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 laporan
	2.	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen resiko	2 laporan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan

	2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan
	3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan

2. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan DKI Jakarta

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DIPA
Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	137 unit
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	87 unit
	4. Jumlah Rumah Khusus Yang dibangun	0 unit
	5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	0 tower
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	0 unit
	7. Jumlah Rumah MBR yang yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	0 unit
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

3. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Banten

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DIPA
Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.340 unit
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	157 unit
	4. Jumlah Rumah Khusus Yang dibangun	0 unit
	5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 tower
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	0 unit
	7. Jumlah Rumah MBR yang yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	2.836 unit
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Realisasi indikator kinerja Balai telah dapat memenuhi target sesuai dengan PK revisi terakhir Tahun Anggaran 2023 secara 100%, namun terdapat jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang secara fisik tidak dapat terealisasi dan dilakukan pengembalian sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99.52% dan Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU yang secara fisik melebihi target yaitu sebesar 125%.

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Penyediaan Akses Rumah yang Layak dan Aman

1. **Penyusunan Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan** telah dilaksanakan dengan hasil sebesar 100% yaitu 3 (tiga) laporan berupa laporan kegiatan Sinkronisasi program pusat daerah, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
2. **Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya** telah dilaksanakan dengan pencapaian kinerja sebesar 99.52% berupa 3.324 unit.
3. **Jumlah Rumah Susun yang dibangun** dengan pencapaian kinerja sebesar 100% berupa 238 unit Rumah susun yang dibangun dari target pada PK sebesar 238 Unit.
4. **Jumlah Rumah Susun yang dipelihara** dengan pencapaian kinerja sebesar 100% berupa 4 Tower Rumah susun yang dibangun dari target pada PK sebesar 4 Tower.
5. **Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU** dengan pencapaian kinerja sebesar 125% berupa 3.545 unit dari target pada PK sebesar 2.836 Unit.

Capaian Keuangan

Berdasarkan data *e-monitoring*, realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 287.194.418.344,- atau 99.42% dari pagu Rp. 289.468.577.000,- dan rincian realisasi keuangan satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 105.593.297.377,- atau 99.08 %, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten sebesar Rp. 162.488.923.702,- atau 99.21 % dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sebesar Rp. 19.112.197.265,- atau 99,98%.

Kendala

1. Kurangnya pegawai dengan status ASN untuk penempatan posisi pada jabatan teknis sebagai penanggungjawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi;
2. Minimnya pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai basic pendidikan teknis dan memiliki kompetensi yang handal di bidang teknis;

3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih belum optimal;
4. Koordinasi dan sinergitas Pemerintah Daerah yang rendah dalam penyusunan regulasi dan kebijakan;
5. Ketersediaan data dan informasi yang sesuai, akurat, dan terkini dalam penyusunan perencanaan;
6. Proses serah terima aset yang membutuhkan tahapan yang Panjang

Peningkatan Kinerja

1. Membuat pengukuran indikator kinerja kegiatan yang mengukur hingga ke outcome.
2. Melakukan penyusunan pohon kinerja (cascading) yang menurunkan pekerjaan hingga ke level staff.
3. Pemberlakuan sistem reward and punishment untuk meningkatkan pencapaian kinerja baik organisasi maupun pegawai.
4. Melakukan upaya peningkatan sinergitas koordinasi dan konsolidasi antar sumber daya aparatur/pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait data usulan, peran serta, dan tanggung jawab dalam pembangunan perumahan.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait data usulan, peran serta, dan tanggung jawab dalam penyediaan perumahan.
7. Mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal pengoptimalan penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
8. Sinkronisasi program dan kegiatan terhadap Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai kebutuhan Program Pengembangan Perumahan pada masing-masing instansi terkait di Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tugas dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined. 21
1.3 Struktur Organisasi.....	24
1.4 Isu Strategis	26
1.5 Rencana Strategis	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Uraian Singkat Renstra	32
2.2. Perjanjian Kinerja	41
2.3 Metode Pengukuran	49
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra 2020-2024	50
BAB III Kapasitas Organisasi	52
3.1 Suber Daya Manusia.....	52
3.2 Sarana dan Prasarana	54
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.....	56
BAB IV Akuntabilitas Kinerja.....	57
4.1 Capaian Kinerja	57
4.2 Analisis Penapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni.....	71
BAB V PENUTUP	178

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan pada Permen PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian PUPR sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PUPR yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari pimpinan Satuan Kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Bulanan maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sejak dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, implementasi, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, Pelaksana Penyediaan Perumahan

Jawa I sebagai unit organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2023. Laporan Kinerja disusun atas prestasi kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan kepada Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. Laporan ini diharapkan juga dapat memberikan *feedback* untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ^[L]_[SEP]
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ^[L]_[SEP]
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 – 2024 ^[L]_[SEP]
5. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lakip ^[L]_[SEP]
6. Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR ^[L]_[SEP]
7. Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan ^[L]_[SEP]Reformasi Birokrasi ^[L]_[SEP]
8. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas ^[L]_[SEP]Kinerja Instansi Pemerintah ^[L]_[SEP]

1.1.1. Provinsi DKI Jakarta



Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

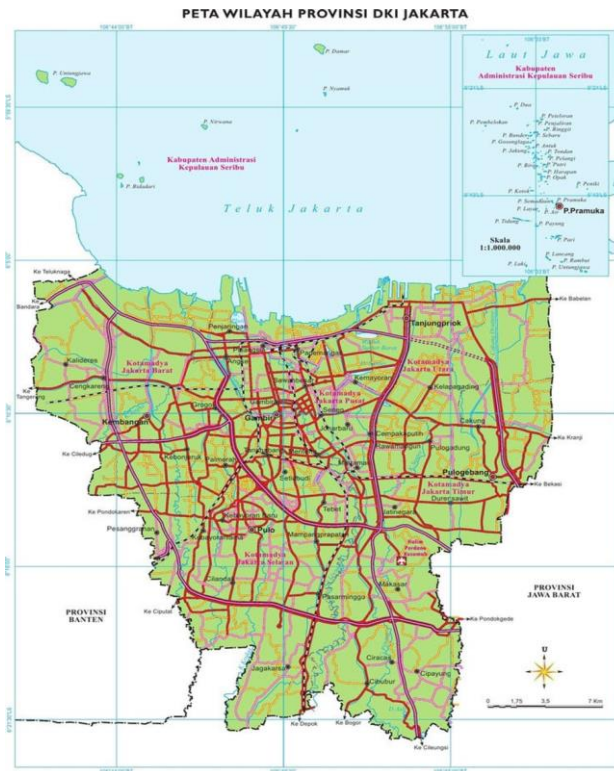
Letak Geografis DKI Jakarta

Kota DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Indonesia yang berada di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. Jakarta sendiri sebelumnya dikenal dengan berbagai nama yakni Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Djakarta. Sunda Kelapa yaitu sebutan untuk Kota Jakarta sebelum tahun 1527. Setelah tahun 1527 hingga 1619 Jakarta dikenal dan disebut dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1619 sampai tahun 1942 Jakarta berganti nama menjadi Batavia. Djakarta adalah sebutan selanjutnya untuk Kota Jakarta pada tahun 1942 hingga 1972.

DKI Jakarta berada di dataran rendah yang memiliki ketinggian hanya delapan meter dari permukaan laut. Kota yang memiliki curah hujan tinggi ini terletak di Pulau Jawa tepatnya di bagian utara pada sekitar muara Ciliwung Teluk Jakarta. Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sebelah timur dan selatan. Sedangkan disebelah Barat wilayah Jakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Apabila dilihat dalam peta, letak Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara 5°19' 12" - 6°23' 54" Lintang Selatan (LS) dan 106°22' 42" - 106°58' 18" Bujur Timur (BT). Di antara 24 provinsi-provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi wilayah paling sempit.

Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari timur ke barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau tersebar pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Peta Provinsi DKI Jakarta



Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan

Jakarta Satu merupakan sarana integrasi data dan sistem terkait pemerintahan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai sarana pemenuhan informasi publik, kebutuhan transfer data, penentuan potensi wilayah, pengawasan dan pengendalian perkotaan, bahan penerapan kebijakan dan lainnya. Data tersebut diintegrasikan dalam peta yang sama.

Jakarta Satu dapat diakses melalui situs jakartasatu.jakarta.go.id. Situs tersebut merupakan sarana komunikasi serta visualisasi peta dan data dari program Jakarta Satu, baik untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun untuk masyarakat. Data tersebut akan terus diperbarui, sehingga akan mudah mengidentifikasi apabila ada potensi korupsi.

Ada lima hal yang terintegrasi lewat program Jakarta Satu, yaitu: (1) peta dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; (2) data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta; (3) data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; (4) data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; (5) data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta Satu menjadi sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan. Terdapat tiga langkah perubahan yang dapat dilakukan melalui program tersebut, yaitu:

- (1) optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta;
- (2) melakukan pencegahan kebocoran dan potensi korupsi;
- (3) melakukan transformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Jakarta Smart City

Jakarta Smart City (JSC) adalah salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta.

Dibentuk sejak tahun 2014 seperti namanya, JSC bertujuan untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota cerdas 4.0 (*smart city*) dengan mengoptimalkan teknologi dalam urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta.

Guna mewujudkan Jakarta sebagai *smart city*, JSC bergerak berdasarkan 7 (tujuh) indikator, sebagai perwujudan ekosistem *smart city 4.0* di Jakarta. Adapun ketujuh indikator *smart city*, yang dimiliki JSC adalah :

- Smart Environment (Lingkungan yang Cerdas)
- Smart Economy (Ekonomi yang Cerdas)
- Smart People (Masyarakat yang Cerdas)
- Smart Mobility (Mobilitas yang Cerdas)
- Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas)
- Smart Living (Kehidupan yang Cerdas)
- Smart Branding (Jenama yang Cerdas)

1.1.2. Provinsi Banten

Profil Provinsi Banten



Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamis.

Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.

Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.

Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwarna coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia.

Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan.

Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.

Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.

Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.

Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.

Lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.

Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.

Semboyan “IMAN TAQWA” sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Arti warna yang digunakan dalam simbol daerah:

- ***Merah:*** melambangkan keberanian
- ***Putih:*** melambangkan suci, arif dan bijaksana
- ***Kuning:*** melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran
- ***Hitam:*** melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati
- ***Abu-abu:*** melambangkan ketabahan
- ***Biru:*** melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan
- ***Hijau:*** melambangkan kesuburan
- ***Coklat:*** melambangkan kemakmuran

SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Propinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Propinsi Banten. Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. pada tanggal 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya Gubernur definitif. Adapun periode Gubernur Banten sejak berdirinya sampai sekarang adalah:

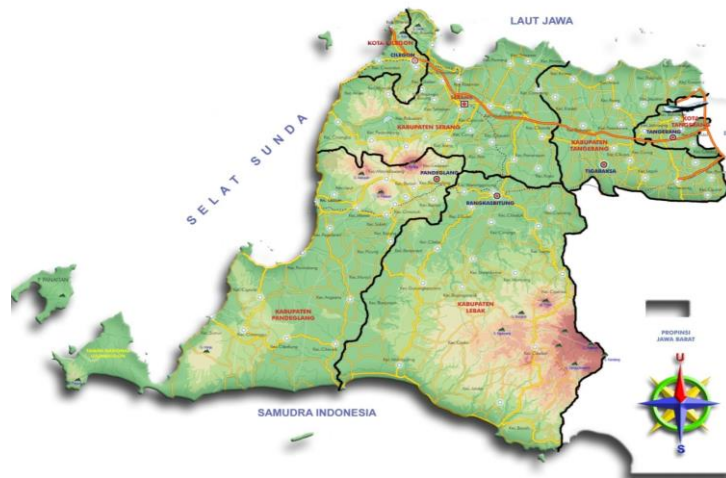
- Hakamudin Djamal sebagai Penjabat Gubernur Pertama (2000-2002)
- Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah (2002-2005)
- Ratu Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten (2005-2007)
- Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012)
- Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2023)
- Rano karno (2023-2023)
- Wahid Hasyim (2023 – 2023)
- Al Muktabar (PJ Gubernur Banten Tahun 2023-2024 Berdasarkan eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2023)

KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan data sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.632.166 jiwa. Dengan presentase 67,01% penduduk perkotaan dan 32,99% penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,78% /tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa /km².

Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, diantaranya:

- Kabupaten Serang
- Kabupaten Tangerang
- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Lebak
- Kota Serang
- Kota Cilegon
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan



SOSIAL BUDAYA

Mayoritas penduduk Provinsi Banten memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan khas budaya masyarakat Banten, antara lain seni bela diri pencak silat, debus, rudat, umbrug, tari saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung dan lojor. Disamping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain masjid agung Banten lama, makam kermat panjang, dan masih banyak yang lainnya. Kesenian tradisional yang sangat kental diwarnai agama Islam yang perkembangannya hidup bersama agama itu sendiri. Seni-seni dalam katagori ini adalah : ngabedug (seni bedug), seni rampak bedug, seni qasidah, terebang gede, marhaba rakbi, dzikir saman, debus, patingtung, rudat, angklung buhun, dog dog lojor, bendrong lesung, ubrug dan beluk.

Di Provinsi Banten terdapat suku masyarakat baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang masih terjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng. Selain kawasan adat masyarakat Baduy, di Provinsi Banten juga terdapat kawasan masyarakat adat Cisungsang. Terletak di kaki Gunung Halimun, desa Cibeber Kabupaten Lebak. Kawasan ini dikelilingi oleh 4 desa adat lainnya, Desa Cicarucub, Bayah, Citorek, dan Cipta Gelar. Kawasan ini dipimpin oleh seorang Kepala Adat, yang penunjukannya melalui proses wangsit dari Karuhun.

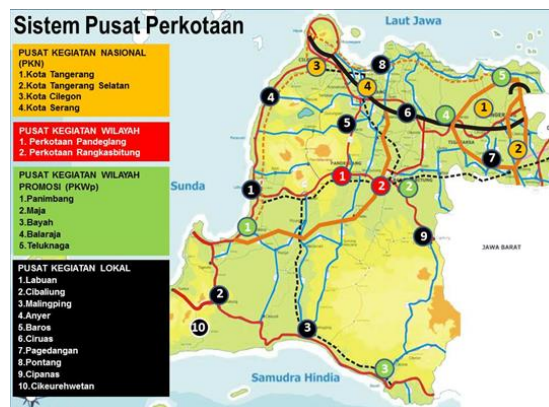
Saat ini masyarakat adat Cisungsang dipimpin oleh Abah Usep yang merupakan generasi keempat. Kondisi sosial budaya masyarakat Banten diwarnai oleh potensi dan kekhasan budaya masyarakatnya yang sangat variatif.

Di Provinsi Banten juga terdapat banyak pesantren salafi dan pesantren modern. hal ini dikarenakan pelestarian masyarakat agamis yang tetap konsisten dan kondusif. Pada bagian lain, ada kawasan industri di Tangerang yang potensial menunjang perekonomian masyarakat Banten. selain masyarakat pribumi, kawasan Tangerang banyak didiami oleh pendatang yang bekerja di kawasan tersebut. Provinsi Banten sangat kaya akan budaya masyarakat namun tetap merawat toleransi dan kerukunan.

1.1. Cakupan Wilayah Kerja

Adapun pusat-pusat pembangunan di Provinsi Banten dapat diidentifikasi pada beberapa jenjang, yaitu sebagai berikut.

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang meliputi Kawasan Perkotaan Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang meliputi :
 - Pandeglang dan Rangkasbitung (PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Dalam pengembangan ke depan, diusulkan sebagai PKW Promosi (PKWp) antara lain perkotaan Panimbang, Maja, Balaraja, dan Teluk Naga.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang meliputi perkotaan Labuan, Cibaliung, Malingping, Bayah, Tigaraksa, Kronjo, Anyar, Baros, Kragilan.



Gambar 1. 1 Peta sistem perkotaan Provinsi Banten

Secara Perwilayahan, Provinsi Banten dibagi menjadi 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP), yakni:

- **WKP I**

WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, dan permukiman/ perumahan.

- **WKP II**

WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pariwisata, jasa, perdagangan, pertambangan dan kehutanan

- **WKP III**

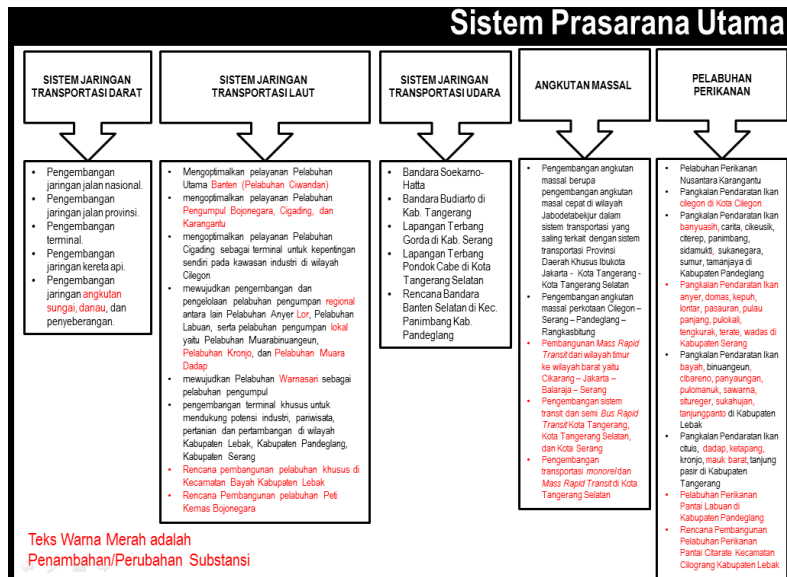
WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dan diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan.



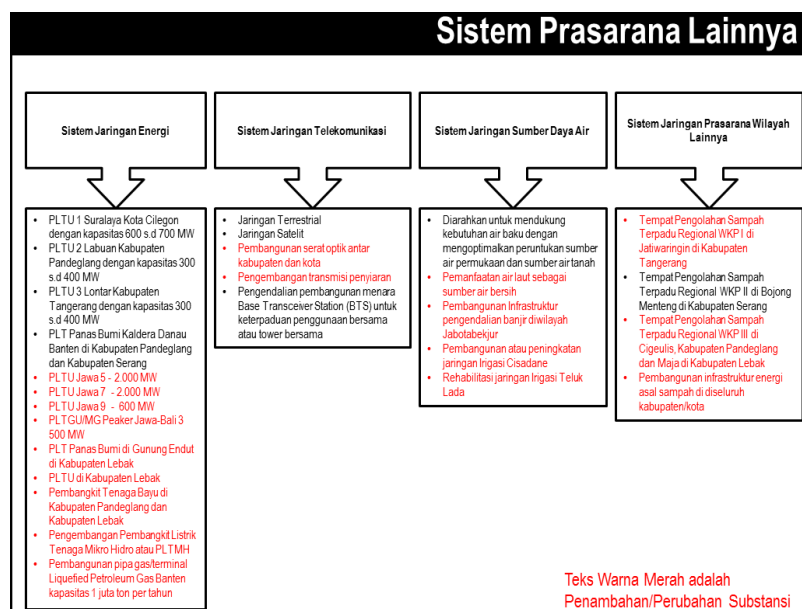
Gambar 1. 2 Pembagian wilayah kerja pembangunan Provinsi Banten

Selain itu, terdapat sistem prasarana utama yang akan diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, angkutan masal dan pelabuhan perikanan. Sedangkan untuk sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan sumber daya air, pengembangan migas, dan pengembangan prasarana lingkungan

Tabel 1. 1 Uraian Sistem prasarana transportasi Utama



Tabel 1. 2 Uraian Sistem prasarana lainnya.



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Periode 2005 – 2025 dinyatakan bahwa Pembangunan Tahap IV (tahun 2017 – 2023) merupakan termasuk ke dalam tahap mapan dan diverifikasi yang bertumpu pada :

1. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
2. Perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan
3. Perwujudan sistem pemerintahan dan pembangunan yang mapan
4. Koreksi dan penyempurnaan hasil-hasil pembangunan
5. Perwujudan keserasian pembangunan Banten utara dan selatan.

Pentahapan pembangunan di provinsi Banten ini didukung dengan arah kebijakan tata ruang provinsi Banten yang disusun untuk periode tahun 2010-2030 dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah Banten sebagai pintu gerbang simpul penyebaran primer nasional-internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, pemenuhan regulasi terkait perumahan telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang No. 01/ 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyediaan hunian juga ditegaskan dalam beberapa peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang menjadi konsideran dalam pembentukan program penyediaan perumahan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 1/2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. UU No. 29/2009, tentang Perubahan atas UU 15/1997, tentang Ketransmigrasian;
3. UU No. 24/ 2007, tentang Penanggulangan Bencana;
4. UU No. 13/2009, tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. 5. UU No. 39/ 2009, tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
6. UU No. 02/ 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
7. Permensos No. 20/2017, tentang Rehabilitas Sosial RTLH dan Sarana Prasarana Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2017, tentang Penyediaan Rumah Khusus.

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi (UU, PP, Permen Kementerian PUPR) yang diarahkan untuk mengatur perilaku penyelenggara pembangunan termasuk masyarakat dan swasta dalam penyediaan perumahan. Setelah ditetapkannya UU No.1/ 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengganti UU No. 4/1992, tentang Perumahan dan Permukiman, regulasi yang telah disusun sebelumnya dapat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti. Namun beberapa ketentuan pelaksanaan terkait PKP memerlukan validasi dan penyesuaian terhadap peraturan yang baru, seperti ketentuan terkait hunian berimbang, rumah susun, dan urusan pemerintahan konkuren. Regulasi di bidang perumahan saat ini belum optimal dalam mendorong serta mengatur jalannya penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan memerlukan dukungan regulasi yang valid dan mutakhir, baik penyusunan regulasi baru maupun pembaharuan dari regulasi yang telah ada sebelumnya.

Dukungan regulasi juga diperlukan sinergisasi antar regulasi terkait. Selain itu kerangka regulasi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

penyediaan perumahan dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2023-2024.

Tabel 1. 3 Kebutuhan Regulasi

No	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggung Jawab	Target
1.	Rapermen tentang Hunian Berimbang	Pemutakhiran Permen Pera No.7 /2013, tentang Penyelenggaraan PKP dengan Hunian Berimbang	Dit. Perencanaan Perumahan	2020
2.	Revisi atas Pemen PUPR 1/PRT/M/2018, tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Penguat/Turunan UU No.20 / 2011	Dit. Rumah Susun	2020
3.	RPP tentang Rumah Susun	Penguat/Turunan UU No.20 / 2011	Dit. Rumah Susun	2020
4.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Permohonan Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatannya serta Pengubahannya (Psl 32)	Penguatan UU No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun	Dit. Rumah Susun	2020
5.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren	Penguat/Turunan UU No.23/ 2014, terkait peran Pemda dalam penyelenggaraan rumah layak huni bagi MBR di daerah	Kemendagri (Counterpart Dit. Rumah Umum dan Komersial)	2002
6.	RapermenPUPR tentang PKP	Penguatan PP 14/2016, tentang PKP	Ditjen PP	2020
7.	Rapermen PUPR tentang RP3	Penguat PP 14/2016, tentang PKP	Ditjen PP	2020

Sumber: Analisis, 2019

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi bagian Direktorat Jenderal Perumahan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perumahan melalui Direktorat terkait. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dipimpin oleh seorang kepala balai dengan wilayah unit kerja meliputi Satuan Kerja Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
7. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
8. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing subbagian dan seksi tersebut:

1.2.1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subbagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran
2. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumahtangga, dan administrasi kepegawaian
3. Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan
4. Pengelolaan data dan informasi
5. Fasilitasi serah terima asset
6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
7. Koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai

1.2.2. Seksi Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di wilayah I
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis di wilayah I
3. Pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah I
4. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I

1.2.3. Seksi Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di wilayah II
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis di wilayah II
3. Pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumahsusun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana,sarana dan utilitas umum di wilayah II
4. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah II

Selain didukung oleh unit-unit struktur tersebut di atas, BP2P Jawa I juga didukung oleh Satuan Kerja yang berada di 2 (dua) provinsi sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta
2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten

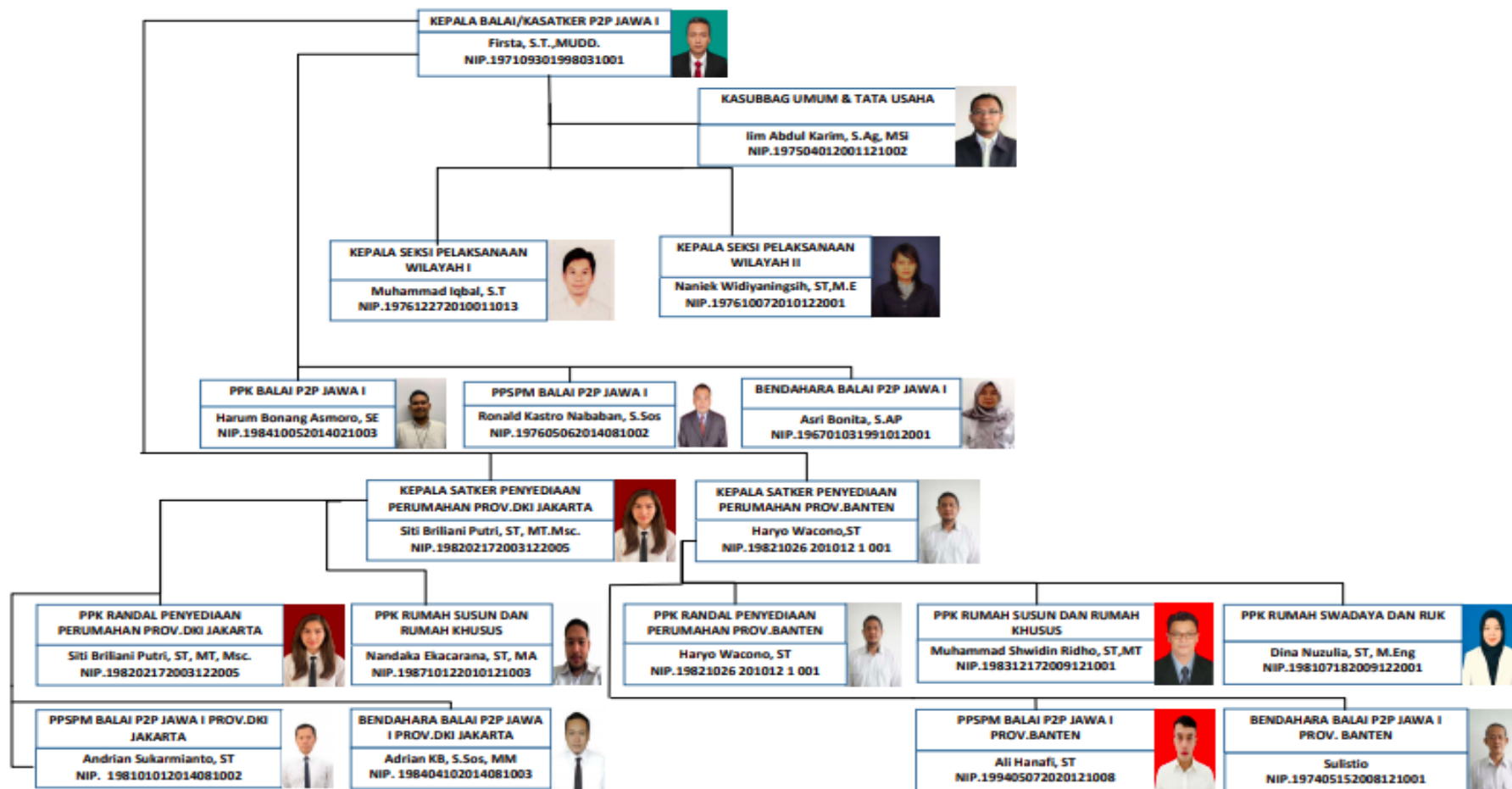
1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I terdiri atas:

- 1.1.1 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
- 1.1.2 Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
- 1.1.3 Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I
- 1.1.4 Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II
- 1.1.5 Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta
- 1.1.6 Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten
- 1.1.7 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 1.1.8 Bendahara



STUKTUR ORGANISASI BP2P JAWA I TA.2023



1.4 Isu Strategis

Isu strategis yang ada terkait penyediaan perumahan di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten meliputi:

1. Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;
2. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;
3. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan;
4. Perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha;
5. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;
6. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan.
7. Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau industri/perdagangan; dan
8. Marginalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.

A. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan. Pelaksanaan tugas tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal, antara lain:

1. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Perumahan selaku pembina sektor-sektor Bidang Penyediaan Perumahan sesuai dengan azas desentralisasi.

2. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Penyediaan Perumahan melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang *SMART* (*systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound*).
4. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan Penyediaan Perumahan baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.
5. Membangun *network*, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan Bidang Penyediaan Perumahan baik di lingkungan pusat/ daerah.

B. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2023

Adapun untuk tahun 2023 ini, terdapat kondisi dan tantangan pembangunan yang harus kami hadapi, antara lain :

1. Penguatan koordinasi antar satker sektor di provinsi Banten dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah
2. Pencapaian target RPI2JM
3. Penguatan koordinasi Ditjen Perumahan dengan Pemda Provinsi Banten dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur bidang perumahan
4. Baru terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan sehingga terjadinya perubahan sistem pelaksanaan Administrasi Organisasi baik di Balai maupun Satker di Provinsi

1.5 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi

Tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan Jawa I pada hakekatnya adalah dalam rangka terwujudnya visi dan misi Kementerian PUPR serta sasaran strategis Kementerian PUPR, yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau. Dalam kerangka perwujudan visi dan misi Kementerian PUPR tersebut diatas, BP2P

Jawa 1 berupaya dengan mewujudkannya melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten. **Layak**, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan dalam periode 2020-2024 yakni merencanakan arah program pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2020 – 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP2P Jawa 1.

Sedangkan sasaran dari penyusunan Renstra adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BP2P Jawa 1 selama 4 (empat) tahun ke depan.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BP2P Jawa 1 yang merupakan perencanaan tahunan sektor perumahan dan Kawasan permukiman.
3. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

C. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dibentuknya BP2P Jawa 1, pada hakekatnya adalah sebuah upaya lebih mendekatkan TUSI Ditjen Perumahan dengan kondisi daerah/wilayah BP2P Jawa 1 melalui pelaksanaan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang, dengan harapan apa yang menjadi visi dan misi Kementerian PUPR secara keseluruhan dapat terwujud :

1. Jumlah rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, sebagai dasar perhitungan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2015 jumlah rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.659.200 rumah tangga dan di Provinsi Banten terdapat 2.930.200 rumah tangga.

2. Menurut data Data Backlog Kepemilikan Rumah yang sumbernya adalah dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, bahwa Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.276.424 unit dengan presentase jumlah rumah tangga milik adalah 51,09 %. Sementara itu untuk data backlog yang sama di Provinsi Banten mencapai 584.263 unit atau presentase jumlah rumah tangga miliknya mencapai 80,94 %.
3. Jumlah presentase rumah tangga yang status kepemilikan rumahnya masih kontrak/sewa di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dimana berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 35,63% penduduknya masih berstatus sebagai penyewa rumah dan di Provinsi Banten sebanyak 12,48 % penduduknya masih mengontrak/sewa rumah.
4. Jumlah presentase rumah tangga yang belum memiliki rumah di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2018 presentase rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki rumah adalah sebesar 52,15 %, sementara itu di Provinsi Banten prosentasenya adalah 18,67 % masyarakatnya belum memiliki rumah.
5. Jumlah presentase rumah tangga dengan luas hunian perkapita lebih kecil atau sama dengan 7 m², dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2018, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 26,7 % masyarakatnya masih menghuni rumah dengan luas lantai lebih kecil atau sama dengan 7 m², dan di Provinsi Banten pada tahun yang sama terdapat 6,88% masyarakatnya dengan kondisi mempunyai rumah dengan luasan lebih kecil atau sama dengan 7 m².
6. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih dari tanah, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta masih ada 0,25 % masyarakatnya mempunyai rumah dengan lantai tanah dan di Provinsi Banten masih ada 3 % masyarakatnya hidup di dalam rumah yang berlantai tanah.
7. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih berdinding dari bambu, dimana berdasarkan data BPS di Provinsi DKI Jakarta masih ada 0,25 % rumah tangga hidup di rumah yang berdinding bambu dan di Provinsi Banten masih ada 0,95 % rumah tangga hidup di rumah yang berdinding bambu.
8. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih beratapkan ijuk, dimana berdasarkan data BPS di Provinsi DKI Jakarta masih ada sebanyak 0,11 % sementara itu di Provinsi Banten terdapat 1,34 % rumah tangga yang hidup dengan rumah beratapkan ijuk.

Saat ini, dalam rangka mengukur capaian pelayanan sebuah institusi yang menangani pembangunan PKP telah bergeser dari target dan indikator backlog menjadi target SDGs, yang meliputi akses terhadap rumah yang adequate, safe, and affordable, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Proporsi Rumah Tangga yang Dapat Mengakses dan Tinggal di Rumah Layak, berdasarkan :

1. Ketahanan Konstruksi
2. Akses Air Minum
3. Akses Sanitasi
4. Luas per Kapita

Selain ke 4 (empat) IKU tersebut diatas, terdapat Indikator Kinerja Tambahan, yang berupa :

1. Luasan permukiman kumuh
2. Backlog perumahan
3. Keamanan bermukim (lahan)

Dengan kondisi capaian pembangunan PKP di Provinsi DKI Jakarta dan Banten dan IKU maupun IKT yang ada seperti yang telah disebutkan diatas, yang menjadi sasaran strategi BP2P Jawa 1 pada hakikatnya adalah meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi DKI Jakarta dan Banten s/d 2024 yang akan datang melalui:

1. Pembangunan Rumah Susun sebanyak : 6.811 Unit
2. Pembangunan Rumah Khusus sebanyak : 180 Unit
3. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebanyak : 16.516 Unit
4. Bantuan PSU : 19.673 Unit

Dalam kerangka pencapaian sasaran strategis diatas, pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh BP2P Jawa 1, tapi berkolaborasi dengan institusi-institusi lainnya baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dalam rangka memberikan kemudahan dalam rangka pengurusan perizinan untuk pembangunan PKP akan sangat diperlukan. Demikian pula keterlibatan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR bersama dengan Lembaga-lembaga Keuangan maupun Perbankan akan sangat mendorong dalam kerangka mempermudah kepemilikan rumah khususnya bagi MBR.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga berkontribusi terhadap program-program pembangunan infrastruktur perumahan yang menjadikan rumah-rumah yang ada layak untuk dihuni. Demikian pula Kementerian Dalam Negeri sangat berperan dalam kerangka mempermudah proses perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian PUPR ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian PUPR 2015- 2019 khususnya untuk Program Penyelenggaraan Jalan, maka disusun Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Dalam rangka penjabaran Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I telah menyusun Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun.

2.1.1. Tujuan

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan tujuan pembangunan perumahan dalam mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah :

“Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya di Wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I”

Rumusan Rencana Strategis tersebut merupakan suatu komitmen bersama dalam rangkapy penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan dalam lima tahun kedepan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I adalah salah satu unit kerja yang dibentuk dalam rangka mendukung Direktorat Jenderal Perumahan untuk melaksanakan misi dan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten menjadi Layak Huni, Sesuai Kearifan Lokal, Berkelanjutan dan Sejahtera.

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan rumusan dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I secara umum adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

2.1.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dijabarkan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan dalam penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang hendak dicapai selama 2020-2024 diturunkan dari sasaran Direktorat Jenderal Perumahan untuk meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan layak huni secara nasional.

Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau

Sesuai dengan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman dengan indikator, yaitu:
 - a. Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
2. **Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan** dengan sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Sedangkan sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu **Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.**

Sasaran yang hendak dicapai selama 2020-2024 oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan layak huni adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembangunan 6.812 unit satuan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya;
2. Terlaksananya 108 unit pemeliharaan dan perawatan rumah susun;

3. Terlaksananya pembangunan 180 unit rumah khusus;
4. Terwujudnya keswadayaan masyarakat melalui bantuan stimulan pembangunan baru rumah [L][SEP]swadaya untuk 16.516 unit; [L][SEP]
5. Terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah [L][SEP]Umum dan Komersial untuk 19.673 unit. [L][SEP]

Adapun kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan terutama adalah MBR, ASN, pekerja, masyarakat terdampak bencana nasional, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah tertinggal/terpencil/pulau terluar. Di samping kelompok sasaran utama tersebut, bantuan perumahan juga dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

NO	Direktorat Jenderal Perumahan			Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I		
	Program	Sasaran Program	Indikator	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Menyediakan rumah layak dan terhuni	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan
						Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
						Jumlah Rumah Susun yang dibangun, Jumlah Rumah Susun yang dipelihara, Jumlah Rumah Khusus yang dibangun, Jumlah Rumah Umum, dan Komersial MBR yang mendapat bantuan PSU.
						Jumlah capaian pendataan Program Sejuta Rumah
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Capaian kinerja pada Fasilitasi dan sinkronisasi program Penyediaan Perumahan antar Pusat dan Daerah
						Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker
						Jumlah Layanan Perkantoran

2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi BP2P Jawa I

Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020 - 2024 arah kebijakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I untuk tahun 2020-2024, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan, (2) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, (3) Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara, dan (4) Penyediaan Rumah Susun (5) Penyediaan Prasarana dan Utilitas Umum. Target rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2020 – 2024 berdasarkan target RPJMN 2020 – 2024. Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah:

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR di DKI Jakarta dan Banten.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider:
 - a. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan di DKI Jakarta dan Banten; ^{[[L]]}_{SEP}
 - b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni; ^{[[L]]}_{SEP}
 - d. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) ^{[[L]]}_{SEP}

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan:
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di DKI Jakarta dan Banten dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah); [L] [SEP]
 - b. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD; [L] [SEP]
 - c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang [L] [SEP]terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir; [L] [SEP]
 - d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan
4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah:
 - a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan [L] [SEP]rumah susun di perkotaan; [L] [SEP]
 - b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan [L] [SEP]lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf [L] [SEP]
5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan:
 - a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, [L] [SEP]serta penetapan insentif dan disinsentif; [L] [SEP]
 - b. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak [L] [SEP]yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa [L] [SEP]maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar; [L] [SEP]
 - c. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelebagaan Tenaga Fasilitator Lapangan [L] [SEP](TFL), dan bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas rumah; [L] [SEP]
 - d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan [L] [SEP]negara. [L] [SEP]

6. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan:
 - a. Standardisasi perijinan [SEP]
 - b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan [SEP]
 - c. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah [SEP]

Tabel 2. Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menyediakan rumah layak dan ter huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyediaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.	Penyediaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum
		2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum	
		3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum	
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum	
		5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum	
		6. Meningkatkan Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian	
		7. Meningkatkan Koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan penunjang fungsi kelembagaan
		2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan	
		3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	

I. Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

Pelaksanaan program Direktur Jenderal Perumahan 2020-2024, dilakukan berdasarkan program dan sasaran yang telah tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Direktur Jenderal Perumahan. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu:

- 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2) Program Dukungan Manajemen.

Sedangkan sasaran strategis yang didukung pada program tersebut adalah meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau dengan 2 (dua) indikator kinerja program yaitu:

- 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman
- 2) Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR

II. Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

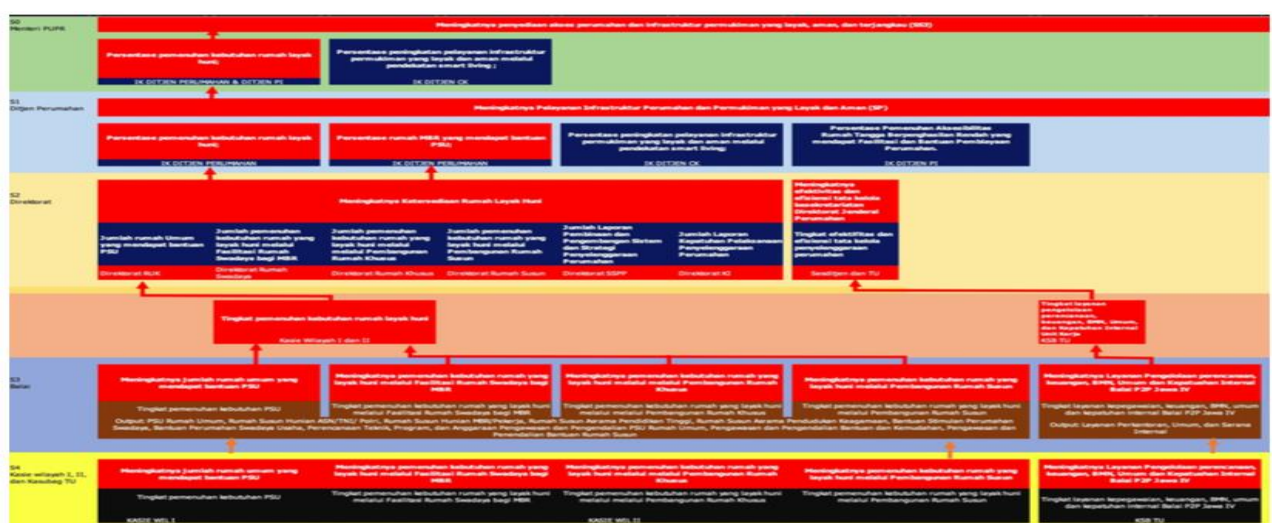
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 2020-2024 sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu:

- 1) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
- 2) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Dari 2 (dua) kegiatan tersebut diatas, sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni
- 2) Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020-2024 cascading sasaran dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dapat digambarkan sebagai berikut:



2.2 Perjanjian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berupaya secara menerapkan prinsip-prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melalui penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kementerian PUPR. Berdasarkan perencanaan tiga tahunan tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kinerja atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahunan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktur Jenderal Perumahan). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I selama satu tahun kepada Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Dokumen Perjanjian kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Perjanjian kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi.

Pelaksanaan program Direktur Jenderal Perumahan 2020-2024, dilakukan berdasarkan program dan sasaran yang telah tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Direktur Jenderal Perumahan. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen. Sedangkan sasaran strategis yang didukung pada program tersebut adalah meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau dengan 2 (dua) indikator kinerja program.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 2020-2024 sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu 1) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dan 2) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

Dari 2 (dua) kegiatan tersebut diatas, sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni
- 2) Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan Penyediaan Akses Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun
4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara
5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun
6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara
7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU

Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Jumlah Layanan Perkantoran

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2023
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman				
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	5
2		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3.477
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2023
3		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	238
4		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	4
5		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-
6		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-
7		Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	2.836
Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1

	kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
2		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3
3		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3

Perjanjian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I disusun pada Bulan Januari 2023 dengan mengacu kepada indikator di dalam rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja awal ini terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

**Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
Tahun 2023 Awal**

 <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Firsa Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I</p>	
<p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p>	
<p>Nama : Iwan Suprijanto Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan</p>	
<p>Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p>	
<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 	
<p>Jakarta, Januari 2023</p>	
<p>Pihak Kedua</p>  <p>Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>Firsa NIP. 19710603 199903 1 002</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun 4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 5 Jumlah rumah khusus yang dibangun 6 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara 7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	5 Laporan 12.445 Unit 693 Unit 3 Tower 94 Unit - Unit 1.800 Unit
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 3 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan 3 Layanan 3 Layanan

Kegiatan:	Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp 658.512.680.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 3.415.404.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 232.567.815.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 422.529.461.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 7.042.492.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 5.668.634.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 849.988.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 523.870.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 9.084.038.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 233.417.803.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 423.053.331.000
Total	Rp 665.555.172.000

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Jakarta, Januari 2023

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Jawa I



Firsta
NIP. 19710603 199903 1 002

Pada Bulan

Desember 2023, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang terakhir disesuaikan dengan pagu anggaran dan revisi DIPA terakhir dan perubahan target Outputnya. Pada Perjanjian Kinerja Akhir ini terdapat perubahan pada target Bantuan Stimulan Peningkatan Rumah Swadaya yang semula sejumlah 12.445 Unit menjadi 3.477 unit, Rusun yang dibangun semula 693 unit menjadi 238 Unit, Rusun yang dibangun semula 94Unit menjadi 0 Unit, dan Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU semula 1.800 Unit menjadi 2.836 Unit

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		REVISI
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Firsta Jabatan : Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Iwan Suprijanto Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan</p> <p>Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. <p style="text-align: right;">Jakarta, 22 Desember 2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Kedua</p>  <p>Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Pertama</p>  <p>Firsta NIP. 19710603 199903 1 002</p> </div> </div>		

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.477 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	244 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower
	5 Jumlah rumah khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	2.836 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan

Kegiatan:	Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp 275.985.432.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 7.252.924.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 162.788.163.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 105.944.345.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 13.483.145.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 11.862.775.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 992.100.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 628.270.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Rp 19.115.699.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Rp 163.780.263.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	Rp 106.572.615.000
Total	Rp 289.468.577.000

Jakarta, 12 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan
Iwan Supriyanto
NIP. 19710950 199803 1 001

Pjt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
Firsta
NIP. 19710603 199903 1 002

Tabel 2.3

Perubahan Semula-Menjadi Target PK Awal- PK Akhir

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET AKHIR
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan	5 Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	12.445 Unit	3.477 Unit
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	693 Unit	238 Unit
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower	4 Tower
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	94 Unit	0 Unit
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit

	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	1.800 Unit	2.836 Unit
2. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 Layanan	3 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan	3 Layanan

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan target kegiatan yang tertuang dalam DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Sedangkan pelaksanaan program dan sasaran serta indikator pelaksanaan kegiatan disusun sesuai yang ada pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024. Terdapat 2 sasaran kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yaitu:

- 1) Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni
- 2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	AKHIR
1	Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	658,512,680,000	275,985,432,000
	Satker Balai Jawa I	3,415,404,000	7,252,924,000
	Satker DKI Jakarta	232,567,815,000	162,788,163,000
	Satker Banten	422,529,461,000	105,944,345,000
2	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	7,042,492,000	13,483,145,000
	Satker Balai Jawa I	5,668,634,000	11,862,775,000
	Satker DKI Jakarta	849,988,000	992,100,000
	Satker Banten	523,870,000	628,270,000
3	Pagu Satker Balai Jawa I	9,084,038,000	19,115,699,000
	Pagu Satker DKI Jakarta	233,417,803,000	163,780,263,000
	Pagu Satker Banten	423,053,331,000	106,572,615,000
	TOTAL	665,555,172,000	289,468,577,000

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target kinerja awal dengan revisi akhir secara jumlah satuan dan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan pada kegiatan fisik yang dianggarkan dipertengahan tahun mengikuti perubahan DIPA. Pada revisi terakhir PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, terdapat dua sasaran kegiatan, yang (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni, dan (2) Meningkatnya efektivitas dan

efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Balai P2P Jawa I perlu mencapai target 5 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan; 3.477 unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; 238 unit Rumah Susun yang dibangun; 4 tower Rumah Susun yang dipelihara; 50 unit Rumah Khusus yang dibangun; dan 2.836 unit Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun dan 2 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.

Pada item Rumah Susun yang dibangun pada 2023 total adalah 238 unit, dengan mekanisme Single Years Contract (SYC).

Terdapat penambahan Indikator Kinerja pada Revisi Akhir yaitu Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, hal tersebut merupakan target yang diamanatkan melalui penambahan anggaran oke Direktorat Kepatuhan Intern yang berisi Laporan Zona Integritas (ZI) dan Laporan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan gabungan dari target 3 Satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta dan Satuan kerja Penyediaan Perumahan Banten. Tabel sebarannya adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Sebaran Target Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PK BP2P JAWA I	SATKER BALAI	SATKER DKI JAKARTA	SATKER BANTEN
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3477	-	137	3,340
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	238	-	81	157
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4	-	-	4
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	-
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	-
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	2,836	-	-	2,836
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	2	-	-
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	-	-
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

2.3 Metode Pengukuran

2.3.1 Indikator Kinerja Program

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung 2 (dua) program yang melekat pada Unit Organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu pada 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui 2 Satker yaitu Satuan Kerja) Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 2 (dua) indikator kinerja program sedangkan Program Dukungan Manajemen memiliki 1 (satu) indikator kinerja program.

Pengukuran capaian kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran program. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Pengukuran untuk kedua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni maupun (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan memakai metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

NO	KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Kategori nilai dan interpretasi kinerja dibuat berdasarkan tabel kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Kinerja unit organisasi sepanjang tahun anggaran telah dilaporkan melalui aplikasi i-eMonitoring dan dapat diakses secara real-time.

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra 2020-2024

Target kinerja yang tertera pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan yang mengacu pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Penentuan kuantitas dari masing-masing fisik rumah layak huni adalah berdasarkan arahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dalam mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal Perumahan dan Kementerian PUPR dan lebih luasnya skala nasional.

No	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Balai					Total Target Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	6	5	5	5	5	26
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	5,316	2,100	2,170	3,220	3,710	16,516
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	553	1,139	1,525	1,969	1,626	6,812
		Jumlah Rumah Susun	Unit	29	8	24	25	22	108
		Jumlah Rumah Khusus	Unit	-	-	100	40	40	180
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit						-
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	Unit	-	3,100	4,263	5,425	6,885	19,673
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2	2	2	2	10
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	2	2	2	10
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2	10

Terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan target yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa penambahan target yang menyesuaikan dengan dinamika perubahan DIPA Anggaran.

Tabel 6. Perbedaan Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berdasarkan Renstra 2020-2024 dan PK 2022

No	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Balai TA 2023	
				Renstra	PK Akhir
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	5	5
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3,220	3,477
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	1,969	238
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	25	4
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	40	-
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	Unit	5,425	2,836
		Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	2
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	1
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	3
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	3

Terdapat penambahan Indikator Kinerja pada Revisi Akhir yang sebelumnya tidak ada di target Renstra yaitu Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan target yang diamanatkan melalui penambahan anggaran oke Direktorat Kepatuhan Intern yang berisi Laporan Zona Integritas (ZI) dan Laporan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I memiliki kapasitas yang terdiri atas sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I memiliki strategi pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.

3.1 Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten menjadi syarat utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Seiring lajunya zaman, khususnya pada era digitalisasi saat ini, secara umum terdapat beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, diantaranya kecepatan, kekacauan, perubahan dan fleksibilitas. Secara alamiah, manusia sebagai makhluk paling adaptif di dunia memegang peranan penting dalam proses kemajuan suatu entitas dengan kemampuannya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga diharapkan SDM yang ada di Kementerian PUPR, khususnya di lingkungan Balai Pelaksana Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan dapat secara aktif memainkan peran penting dalam kesuksesan organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I terbagi menjadi 3 (tiga) unit kerja, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Jawa I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2023 dengan semakin bertambah nya beban kerja setiap tahun nya maka sumber daya manusia Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berkapasitas sebagai berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I

TOTAL SDM : 73

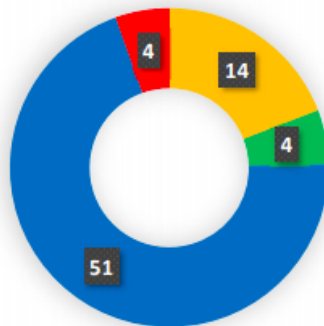
LAKI-LAKI : 47 ORANG



PEREMPUAN : 26 ORANG

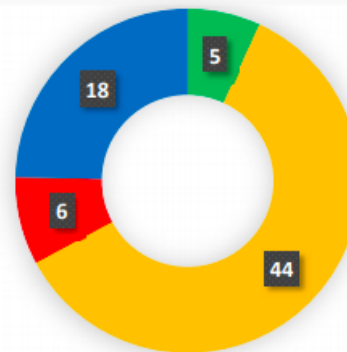
STATUS KEPEGAWAIAN

■ PNS ■ PPPK ■ PPNP ■ KI



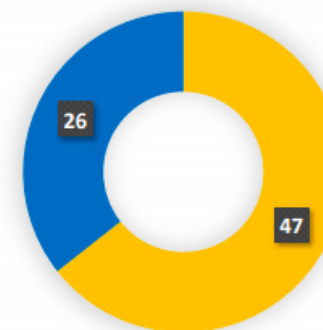
TINGKAT PENDIDIKAN

■ S2 ■ S1/D4 ■ D1-D3 ■ SMA/SMK



JENIS KELAMIN

■ LAKI-LAKI ■ PEREMPUAN



3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di pencatatan satuan kerja penyediaan perumahan DKI Jakarta maupun Banten telah ada dari tahun 2016, sehingga terdapat beberapa barang yang telah mengalami kerusakan. Pengadaan dilakukan setiap tahunnya di ketiga satuan kerja, namun pada satuan kerja balai dalam pencatatan baru ada mulai tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2023 penambahan barang BMN terpusat dari anggaran Satuan Kerja Balai P2P Jawa I yang kemudian didistribusikan ke masing-masing Satuan Kerja DKI Jakarta dan Banten. Berikut merupakan pencatatan di satuan kerja balai pelaksana penyediaan perumahan Jawa I, satuan kerja penyediaan perumahan DKI Jakarta dan satuan kerja penyediaan perumahan Banten sampai tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN:

Tabel Rekap Aset Aktif di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Sampai Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN

Daftar Aset Aktif di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Sampai Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN

Daftar Aset Aktif di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Banten Sampai Tahun 2023

NO	JUMLAH	NAMA BARANG
1	Filing Cabinet Besi	14 Unit
2	Brandkas	1 Unit
3	Alat Penghancur Kertas	6 Unit
4	LCD Projector/Infocus	2 Unit
5	Meja Kerja Kayu	22 Unit
6	Meja Kerja Besi/Metal	19 Unit
7	Kursi Besi/Metal	23 Unit
8	Kursi Kayu	6 Unit
9	Meja Rapat	10 Unit
10	Kursi Fiber Glas/Plastik	40 Unit
11	Televisi	2 Unit
12	Meja Telepon	1 Unit
13	Sofa	1 Unit
14	Lemari ES	1 Unit
15	Handy Cam	1 Unit
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit
17	Camera Digital	4 Unit
18	Alat Studio Lainnya	2 Unit
19	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1 Unit
20	Camera Conference	1 Unit
21	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	5 Unit
22	Barcode Reader	1 Unit
23	Scanner	2 Unit
24	Lap Top	1 Unit
25	Note Book	26 Unit
26	Komputer Unit Lainnya	3 Unit
27	P.C. Unit	1 Unit
27	Personal Computer	2 Unit
28	Mini Komputer	1 Unit

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2023 terdapat 7 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, yang terdiri dari baik dari revisi DJA maupun revisi Kanwil. DIPA awal satuan kerja diperoleh dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Bulan November 2022 dengan pagu sebesar Rp. 9.084.038.000,- dan revisi akhir adalah Rp. 19.115.699.000,- yang terbagi kedalam dua program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Berikut merupakan kronologis perubahan

No	Nama dan Tanggal DIPA	Nilai		Total DIPA	Keterangan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Dukungan Manajemen		
1	DIPA Awal: 30 November 2022	3,415,404,000	5,668,634,000	9,084,038,000	DIPA Awal
2	DIPA Revisi: 1 12 April 2023	3,342,054,000	5,668,634,000	9,010,688,000	Pergeseran untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
3	DIPA Revisi 2: 18 Juli 2023	3,342,054,000	5,668,634,000	9,010,688,000	
4	DIPA Revisi 3: 30 Agustus 2023	4,760,504,000	11,618,177,000	16,378,681,000	Penambahan pada kegiatan: - Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Rumah Susun - Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan RUK - Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis
5	DIPA Revisi 4: 13 Oktober 2023	4,760,504,000	11,862,775,000	16,623,279,000	Penambahan pada kegiatan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Rumah Susun
6	DIPA Revisi 5: 10 November 2023	7,260,504,000	11,862,775,000	19,123,279,000	Penambahan pada kegiatan: - Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Rumah Susun - Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan RUK - Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis - Layanan Perkantoran
7	DIPA Revisi 6: 19 Desember 2023	7,252,924,000	11,862,775,000	19,115,699,000	Pergeseran untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
8	DIPA Revisi 7: 27 Desember 2023	7,252,924,000	11,862,775,000	19,115,699,000	

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan. Perwujudan kewajiban ini dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahunnya. LAKIP memuat informasi antara lain:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
4. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya; dan
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja tahunan dalam rencana kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

4.1. Capaian Kinerja

4.1.1. Capaian Kinerja Program

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I selaku unit kerja Eselon III disampaikan ke unit organisasi Eselon II dan Eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan. Dalam menghitung akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku menggunakan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan target capaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2023 dengan Realisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

{}
SEP

2. Membandingkan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Tahun Anggaran 2023. ^[1]^[2] Dokumen Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ^[3] merupakan gabungan antara target dan capaian dari 3 (tiga) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Banten. Realisasi indikator kinerja Balai telah dapat memenuhi target sesuai dengan PK revisi terakhir Tahun Anggaran 2023 secara 100%, namun terdapat jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang secara fisik tidak dapat terealisasi dan dilakukan pengembalian sebanyak 20 unit. Berikut merupakan tingkat capaian kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I TA 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TA 2023		
			TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3477	3457	99.42%
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	238	238	100%
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4	4	100%
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	2,836	3,545	125%
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	2	100%
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 Layanan	3 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan	3 Layanan	100%

Kurang tercapainya capaian kinerja pada Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta adanya pengembalian dana ke kas negara sebanyak 4 unit bantuan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Banten sebanyak 16 unit bantuan.

Tabel . Sebaran Target dan Realisasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I TA 2023

No.	Indikator Kinerja	Satker Balai P2P Jawa I			Satker PnP DKI Jakarta			Satker PnP Banten		
		Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
SK: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni										
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	3	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Penigkatan Kualitas Rumah Swadaya	-	-	-	137	133	97.08%	3,340	3,324	99.52%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	-	81	81	100.00%	157	157	100.00%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	4	4	100.00%
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	-	-	-	-	-	-	2,836	3,545	125.00%
SK: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan										
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%
3	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%

Sedangkan target yang telah dicapai berdasarkan perbandingannya dengan pagu anggaran sesuai dengan DIPA yang dianggarkan, tercantum didalam progres penyerapan satuan kerja Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam website i-emonitoring <https://iemon.pu.go.id/> adalah sebagai berikut:

4.1.3 Capaian Penyerapan Satker Balai P2P Jawa I

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			7.252.924	7.251.566	100,00	99,98	100,00	99,21	99,21
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			7.252.924	7.251.566	100,00	99,98	100,00	99,21	99,21
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	7.252.924	7.251.566	100,00	99,98	100,00	99,21	99,21
2	WA	Program Dukungan Manajemen			11.862.775	11.860.632	100,00	99,98	100,00	99,57	99,57
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			11.862.775	11.860.632	100,00	99,98	100,00	99,57	99,57
2	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/Laporan/Dokumen	11.712.775	11.711.609	100,00	99,99	100,00	99,57	99,57
3	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit/m2/Paket	150.000	149.022	100,00	99,35	100,00	99,35	99,35
	TOTAL				19.115.699	19.112.197	100,00	99,98	100,00	99,44	

Gambar Progres Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I TA 2023

per 31 Desember 2023

PROGRES DAN PENGEMBALIAN PER PAKET PEKERJAAN TA 2023

SATKER : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I

Status : 08 Jan 2024 ; 01:26:01 WIB

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemfilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Hunt							7.252.924	7.251.566		0	99,98	100,00
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					7.252.924	7.251.566		0	99,98	100,00
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					1.773.704	1.773.523		0	99,99	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	408.930	408.906	0	0	99,99	100,00
5	4978.ABF.009.101.B	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Kebijakan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	782.517	782.466	0	0	99,99	100,00
6	4978.ABF.009.101.C	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	582.257	582.151	0	0	99,98	100,00
7	4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					196.500	196.400		0	99,95	100,00
8	4978.ABF.011.101.A	Survey dan Wasdal BSPS	1	Laporan	DKI JAKARTA	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	196.500	196.400	0	0	99,95	100,00
9	4978.ABF.014	Klinik Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					190.000	189.867		0	99,93	100,00
10	4978.ABF.014.100.A	Klinik Rumah Swadaya	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	190.000	189.867	0	0	99,93	100,00
11	4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					3.810.000	3.809.864		0	100,00	100,00
12	4978.ABF.015.104.A	Monitoring Evaluasi Program	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	1.173.911	1.173.867	0	0	100,00	100,00
13	4978.ABF.015.104.B	Perencanaan Pengelolaan WAK	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.636.089	2.635.997	0	0	100,00	100,00

14	4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					110.000	109.775		0	99,80	100,00
15	4978.ABF.016.104.B	Monitoring	1	Laporan	DKI JAKARTA	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	110.000	109.775	0	0	99,80	100,00
16	4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					905.200	905.098		0	99,99	100,00
17	4978.ABF.021.101.A	Verifikasi dan Pendataan	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	905.200	905.098	0	0	99,99	100,00
18	4978.ABF.024	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					267.520	267.039		0	99,82	99,94
19	4978.ABF.024.100.A	Pendampingan Penerapan Manajemen Resiko di Ditjen Perumahan	1	Kebijakan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	100.870	100.537	0	0	99,67	100,00
20	4978.ABF.024.103.A	TANPA SUB KOMPONEN	1	Kebijakan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	166.650	166.502	0	0	99,91	99,91
21	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							11.862.775	11.860.632		0	99,98	100,00
22	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					11.712.775	11.711.609		0	99,99	100,00
23	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					708.160	708.075		0	99,99	100,00
24	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan	1	Laporan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	708.160	708.075	0	0	99,99	100,00
25	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					11.004.615	11.003.535		0	99,99	100,00
26	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	8.466.062	8.464.986	0	0	99,99	100,00
27	5578.EBA.994.002.B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.538.553	2.538.549	0	0	100,00	100,00
28	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket					150.000	149.022		0	99,35	100,00
29	5578.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit/m2/Paket					150.000	149.022		0	99,35	100,00
30	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	1	Layanan	KOTA JAKARTA PUSAT	Barang	Swakelola	RPM	150.000	149.022	0	0	99,35	100,00
TOTAL									19.115.699	19.112.197	0	0	99,98	100,00

Dari pagu DIPA revisi terakhir yaitu revisi VII sebesar Rp. 19.115.699.000,- realisasi keuangan adalah Rp. 19.112.197 atau sebesar 99,98% dan fisik 100%. Terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,02% dikarenakan sisa anggaran belanja Rp. 3.502.000,-

4.1.4 Capaian Penyerapan Satker PP Provinsi DKI Jakarta

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			105.944.345	104.971.722	100,00	99,08	94,59	98,89	104,54
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			105.944.345	104.971.722	100,00	99,08	94,59	98,89	104,54
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	269.956	269.689	100,00	99,90	100,00	99,90	99,90
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	16.448.718	16.158.126	100,00	98,23	100,00	98,23	98,23
3	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	1.353.702	1.349.653	100,00	99,70	100,00	99,70	99,70
4	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	87.871.969	87.194.254	100,00	99,23	93,48	99,00	105,90
2	WA	Program Dukungan Manajemen			628.270	621.575	100,00	98,93	100,00	98,93	98,93
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			628.270	621.575	100,00	98,93	100,00	98,93	98,93
5	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	628.270	621.575	100,00	98,93	100,00	98,93	98,93
	TOTAL				106.572.615	105.593.297	100,00	99,08	94,62	98,89	

Keterangan: Perubahan Data Terkait Revisi akan Mengacu Pada 3 Waktu, yaitu: 08.00 WIB, 12.00 WIB, dan 16.00 WIB

RN : Rencana

RL : Realisasi

	kinerja < 30
	30 < kinerja < 50
	50 < kinerja < 65
	65 < kinerja < 75
	75 < kinerja < 85
	kinerja > 85

Gambar Progres Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Pelaksana Penyediaan Perumahan DKI Jakarta TA 2023
Per 31 Desember 2023

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni							105.944.345	104.971.722		0	99,08	99,34
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.689		0	99,90	99,90
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.689		0	99,90	99,90
4	4978.ABF.009.101.A	VERIFIKASI DAN MONITORING	1	Kajian	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	269.956	269.689	0	0	99,90	99,90
5	4978.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					16.448.718	16.158.126		0	98,23	98,23
6	4978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	43	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					16.448.718	16.158.126		0	98,23	98,23
7	4978.CBB.005.101.A	Pembangunan Rusun Perguruan Tinggi	1	Paket	DKI JAKARTA	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	15.247.045	14.957.815	0	0	98,10	98,10
8	4978.CBB.005.102.A	Wasdal Pembangunan Rusun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	344.945	343.583	0	0	99,61	99,61
9	4978.CBB.005.102.B	Manajemen Konstruksi Rumah Susun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	DKI JAKARTA	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	856.728	856.728	0	0	100,00	100,00
10	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					1.353.702	1.349.653		0	99,70	99,70
11	4978.CDB.002	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun MBR/Pekerja	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					1.353.702	1.349.653		0	99,70	99,70
12	4978.CDB.002.102.A	Wasdal Rumah Susun	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	1.353.702	1.349.653	0	0	99,70	99,70
13	4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					87.871.969	87.194.254		0	99,23	99,54
14	4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	44	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					84.604.196	83.937.613		0	99,21	99,53
15	4978.RBB.003.100.C	Wasdal Perencanaan WAK	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	492.598	487.960	0	0	99,06	99,06
16	4978.RBB.003.101.B	Rumah Susun Lanud Halim Perdanakusuma	1	Paket	DKI JAKARTA	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	20.724.605	20.234.397	0	0	97,63	98,94
17	4978.RBB.003.101.C	Rumah Susun BNN	1	Paket	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	339.761	339.761	0	0	100,00	100,00
18	4978.RBB.003.101.D	Pengelolaan Wisma Atlet Kemayoran	3	Kegiatan	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	45.927.167	45.794.930	0	0	99,71	99,71
19	4978.RBB.003.101.E	Publikasi Rumah Susun DKI Jakarta	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	2.288.000	2.283.869	0	0	99,82	99,82
20	4978.RBB.003.101.F	Penataan Ruang Kerja dan Arsip	4	Kegiatan	KOTA JAKARTA SELATAN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	1.950.000	1.943.314	0	0	99,66	99,66
21	4978.RBB.003.101.G	Dokumentasi Rusun Lanud dan Universitas Muhammadiyah Jakarta	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	400.000	399.173	0	0	99,79	99,79

22	4978.RBB.003.101.H	Dokumentasi dan Back Up Data Rusun Wisma Atlet Kemayoran	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	900.000	899.128	0	0	99,90	99,90
23	4978.RBB.003.101.I	Back Up Data Rumah Susun	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	450.000	449.550	0	0	99,90	99,90
24	4978.RBB.003.101.J	Paket Meeting Dalam Kota	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	697.705	694.701	0	0	99,57	99,57
25	4978.RBB.003.101.K	Penunjang Kegiatan Satker Balai	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	322.000	321.960	0	0	99,99	99,99
26	4978.RBB.003.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun	1	Dokumen	DKI JAKARTA	Jasa Konsultansi	Seleksi	RPM	1.071.527	1.071.166	0	0	99,97	99,97
27	4978.RBB.003.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	589.370	576.065	0	0	97,74	97,74
28	4978.RBB.003.102.C	Wasdal	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	7.438.554	7.434.886	0	0	99,95	99,95
29	4978.RBB.003.102.D	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	1.012.909	1.006.753	0	0	99,39	99,39
30	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	137	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.267.773	3.256.642	0	0	99,66	99,66
31	4978.RBB.008.100.A	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	2.740.000	2.740.000	0	0	100,00	100,00
32	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	527.773	516.642	0	0	97,89	97,89
33	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							628.270	621.575	0	0	98,93	98,93
34	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					628.270	621.575	0	0	98,93	98,93
35	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					200.000	194.715	0	0	97,36	97,36
36	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	200.000	194.715	0	0	97,36	97,36
37	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					428.270	426.860	0	0	99,67	99,67
38	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	428.270	426.860	0	0	99,67	99,67
TOTAL									106.572.615	105.593.297	0	0	99,08	99,33

Dari pagu DIPA revisi terakhir yaitu revisi VI sebesar 106.572.615.000,- dengan realisasi keuangan adalah Rp. 104.971.722.000,- atau sebesar 99.08% dan progress fisik 99.34%. Progres fisik yang kurang dikarenakan adanya Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

hanya sebesar 97.08% sampai dengan 31 Desember 2023

4.1.5 Capaian Penyerapan Satker PP Provinsi Banten

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			162.788.163	161.817.989	100,00	99,40	100,00	98,65	98,65
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			162.788.163	161.817.989	100,00	99,40	100,00	98,65	98,65
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	269.956	269.868	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	7.899.906	7.719.033	100,00	97,71	100,00	76,11	76,11
3	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	3.173.000	3.063.734	100,00	96,56	100,00	100,00	100,00
4	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	151.445.301	150.765.354	100,00	99,55	100,00	99,80	99,80
2	WA	Program Dukungan Manajemen			992.100	990.934	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			992.100	990.934	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
5	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	992.100	990.934	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
	TOTAL				163.780.263	162.808.924	100,00	99,41	100,00	98,66	

Gambar Progres Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Pelaksana Penyediaan Perumahan Banten TA 2023

19	4978.C08.006.102.D	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Yayasan Budi Mulia Tangbar	1	Pkt	KAB. TANGERANG	Jasa Konsultansi	Repeat Order	RPM	140.750	140.750	0	0	100,00	46,60
20	4978.C08	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.173.000	3.063.734		0	96,56	100,00
21	4978.C08.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	4	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.173.000	3.063.734		0	96,56	100,00
22	4978.C08.004.101.A	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara	1	Tower	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	200.000	199.432	0	0	99,72	100,00
23	4978.C08.004.101.B	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohbul Barokah Pandeglang	1	Tower	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	200.000	199.570	0	0	99,78	100,00
24	4978.C08.004.101.C	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Mapolres Kota Serang	1	Tower	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	1.458.000	1.454.739	0	0	99,78	100,00
25	4978.C08.004.101.D	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten	1	Tower	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	736.000	735.584	0	0	99,94	100,00
26	4978.C08.004.102.B	Wasdal Pemeliharaan Rumah Susun	1	Laporan	KAB. SERANG	AJU	Swakelola	RPM	300.000	275.739	0	0	91,91	100,00
27	4978.C08.004.102.C	Supervisi Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes	2	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	67.000	66.903	0	0	99,86	100,00
28	4978.C08.004.102.D	Supervisi Pemeliharaan Rumah Susun Polri	2	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	212.000	131.767	0	0	62,15	100,00
29	4978.R08	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					151.445.301	150.765.354		320.000	99,34	99,80
30	4978.R08.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	2836	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					18.430.364	18.341.161		0	99,52	99,65
31	4978.R08.001.100.A	Penyusunan DED dan Supervisi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR	1	Dokumen	BANTEN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	575.184	575.118	0	0	99,99	100,00
32	4978.R08.001.101.A	Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR	1	Pkt	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	64.927	0	0	0	0,00	0,00
33	4978.R08.001.101.AA	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Graha Mitra Permai, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-pandeglang-27)	129	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	623.190	623.190	0	0	100,00	100,00
34	4978.R08.001.101.AB	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Griya Sodong Indah, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Pandeglang-28)	116	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	560.388	560.388	0	0	100,00	100,00
35	4978.R08.001.101.AC	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Griya Oteng Residence, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (PSU23-Banten-Lebak-29)	61	Unit	KAB. LEBAK	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	293.633	293.633	0	0	100,00	100,00
36	4978.R08.001.101.B	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Griya Bukit Intan, Kabupaten Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-01)	100	Unit	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	394.543	394.542	0	0	100,00	100,00
37	4978.R08.001.101.C	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Taman Asri Bahagia, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Pandeglang-02)	70	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	339.663	339.662	0	0	100,00	100,00
38	4978.R08.001.101.D	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Padjadjaran Bamboo Residence, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (PSU23-Banten-Lebak-03)	50	Unit	KAB. LEBAK	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	243.975	243.975	0	0	100,00	100,00
39	4978.R08.001.101.E	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Griya Sutera Balaraja, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Tangerang-04)	225	Unit	KAB. TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	878.553	878.552	0	0	100,00	100,00
40	4978.R08.001.101.F	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Rika Residence 4, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Pandeglang-05)	144	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	550.756	550.755	0	0	100,00	100,00

41	4978.RBB.001.101.G	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Aura Residence 2, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Pandeglang-06)	84	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	405.820	405.820	0	0	100,00	100,00
42	4978.RBB.001.101.H	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Royal Rajeg Residence, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Tangerang-07)	305	Unit	KAB. TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	1.460.687	1.460.687	0	0	100,00	100,00
43	4978.RBB.001.101.I	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Puri Harmoni Cikasungka, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Tangerang-08)	124	Unit	KAB. TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	393.970	393.969	0	0	100,00	100,00
44	4978.RBB.001.101.J	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Mutiara Puri Harmoni Extension, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Tangerang-09)	253	Unit	KAB. TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	938.992	938.992	0	0	100,00	100,00
45	4978.RBB.001.101.K	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Bukit Mas Residence, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-10)	178	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	579.746	579.746	0	0	100,00	100,00
46	4978.RBB.001.101.L	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Green Ciomas Residence, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-11)	108	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	425.195	425.195	0	0	100,00	100,00
47	4978.RBB.001.101.M	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Taktakan Indah Permai, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-12)	62	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	294.088	271.578	0	0	92,35	100,00
48	4978.RBB.001.101.N	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-13)	67	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	351.147	351.147	0	0	100,00	100,00
49	4978.RBB.001.101.O	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Mabu Park, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (PSU23-Banten-Lebak-14)	86	Unit	KAB. LEBAK	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	413.974	413.974	0	0	100,00	100,00
50	4978.RBB.001.101.P	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Grand Arfana, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Pandeglang-15)	144	Unit	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	695.654	695.654	0	0	100,00	100,00
51	4978.RBB.001.101.Q	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Royal Greenland, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (PSU23-Banten-Lebak-16)	96	Unit	KAB. LEBAK	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	464.228	464.227	0	0	100,00	100,00
52	4978.RBB.001.101.R	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Bumi Lipatik Lestari, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-17)	188	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	707.163	707.162	0	0	100,00	100,00
53	4978.RBB.001.101.S	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Taman Baru Kemeranggen, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-18)	128	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	503.263	503.262	0	0	100,00	100,00
54	4978.RBB.001.101.T	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Graha Bukit Jimbaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-19)	125	Unit	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	493.311	493.311	0	0	100,00	100,00
55	4978.RBB.001.101.U	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Rivera Village, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (PSU23-Banten-Lebak-20)	58	Unit	KAB. LEBAK	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	218.168	218.167	0	0	100,00	100,00
56	4978.RBB.001.101.V	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Drangong Residence, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-23)	54	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	203.122	203.121	0	0	100,00	100,00
57	4978.RBB.001.101.W	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Ciujung Indah Residence, Kabupaten Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-24)	71	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	336.778	336.778	0	0	100,00	100,00
58	4978.RBB.001.101.X	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Pondok Taktakan Indah, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-22)	217	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	816.246	816.246	0	0	100,00	100,00
59	4978.RBB.001.101.Y	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Senopati Estate banjarsari, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-25)	251	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	944.138	944.137	0	0	100,00	100,00
60	4978.RBB.001.101.Z	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Bumi Kasemen Lestari, Kota Serang Provinsi Banten (PSU23-Banten-Serang-26)	81	Unit	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	304.682	304.682	0	0	100,00	100,00
61	4978.RBB.001.103.A	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR	1	Dokumen	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	2.955.180	2.953.492	0	0	99,94	100,00
62	4978.RBB.002	Rumah Khusus	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					582.650	580.889	0	0	99,70	100,00

63	4978.RBB.002.100.A	Perencanaan Perencanaan Rumah Khusus Masyarakat Terdampak Bencana Longsor Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak	1	Paket	BANTEN	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	RPM	20.000	19.973	0	0	99,87	100,00
64	4978.RBB.002.102.B	Pengawasan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU	1	Paket	KAB. SERANG	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	261.400	261.352	0	0	99,98	100,00
65	4978.RBB.002.102.C	Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus dan PSU	1	Laporan	KAB. LEBAK	AU	Swakelola	RPM	301.250	299.564	0	0	99,44	100,00
66	4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	44	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					17.865.756	17.856.734	0	0	99,95	100,00
67	4978.RBB.003.101.A	Pembangunan Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Banten	1	Paket	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	15.682.570	15.682.570	0	0	100,00	100,00
68	4978.RBB.003.101.B	Pengadaan Meubelair Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Banten	1	Paket	KOTA SERANG	Barang	E- purchasing	RPM	1.064.545	1.064.545	0	0	100,00	100,00
69	4978.RBB.003.102.A	Manajemen Konstruksi Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Banten	1	Paket	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Seleksi	RPM	808.641	808.268	0	0	99,95	100,00
70	4978.RBB.003.102.B	Wasdal Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Banten	1	Laporan	KOTA SERANG	AU	Swakelola	RPM	310.000	301.351	0	0	97,21	100,00
71	4978.RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	70	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					42.788.833	42.215.572	0	0	98,66	100,00
72	4978.RBB.004.101.A	Pembangunan Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	1	Paket	KOTA TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	37.697.144	37.695.828	0	0	100,00	100,00
73	4978.RBB.004.101.B	Pengadaan Meubelair Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	1	Paket	KOTA TANGERANG	Barang	E- purchasing	RPM	1.845.889	1.845.889	0	0	100,00	100,00
74	4978.RBB.004.101.C	Optimasi Lansekap Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	1	Pkt	KOTA TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	1.000.000	969.850	0	0	96,99	100,00
75	4978.RBB.004.102.A	Manajemen Konstruksi Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	1	Paket	KOTA TANGERANG	Jasa Konsultansi	Seleksi	RPM	1.620.800	1.213.048	0	0	74,84	100,00
76	4978.RBB.004.102.B	Wasdal Rumah Susun MBR	1	Paket	KOTA TANGERANG	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	325.000	318.161	0	0	97,90	100,00
77	4978.RBB.004.102.C	Supervisi Optimasi Lansekap Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	1	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	50.000	49.438	0	0	98,88	100,00
78	4978.RBB.004.102.D	Wasdal Optimasi Landscape Rusun MBR Kedaung	1	Pkt	KOTA TANGERANG	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	250.000	123.358	0	0	49,34	100,00
79	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3340	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					71.777.698	71.130.998	320.000	99,54	99,66	
80	4978.RBB.008.100.A	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3340	Unit	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	66.800.000	66.480.000	0	320.000	99,52	99,64
81	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	4.977.698	4.970.998	0	0	99,87	100,00
82	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							992.100	990.934	0	0	99,88	100,00
83	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					992.100	990.934	0	0	99,88	100,00
84	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					200.000	199.984	0	0	99,99	100,00
85	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan	1	Laporan	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	200.000	199.984	0	0	99,99	100,00
86	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					792.100	790.951	0	0	99,85	100,00
87	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan	1	Laporan	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	792.100	790.951	0	0	99,85	100,00
TOTAL									163.780.263	162.488.924	0	320.000	99,21	98,68

Dari pagu DIPA revisi terakhir yaitu revisi XII sebesar Rp 163.780.263.000,- realisasi keuangan adalah Rp. 161.177.989.000 atau sebesar 99,21% dan progress fisik 98.67%.

4.2 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

4.2.1 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan

Pada Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan didapat dari Komponen Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan yang terbagi menjadi 3 Sub Komponen, yaitu (1) Sinkronisasi Program Pusat-Daerah dan Fasilitasi Serah Terima Aset; (2) Pembinaan Penyelenggaraan PKP; dan (3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan. Dari ketiga sub komponen ini, menghasilkan realisasi keuangan pada Satker Balai Jawa I sebesar 99,99%, Satker PP Prov DKI Jakarta sebesar 99,90% dan Satkekr PP Prov Banten sebesar 99,97%.

Satker Balai P2P Jawa I

3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					1.773.704	1.773.523		0	99,99	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	408.930	408.906	0	0	99,99	100,00
5	4978.ABF.009.101.B	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Kebijakan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	782.517	782.466	0	0	99,99	100,00
6	4978.ABF.009.101.C	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	582.257	582.151	0	0	99,98	100,00

Satker PnP DKI Jakarta

2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.689	99,90	99,90	269.689	99,90	269.689
3	4978.ABF.009.101.A	VERIFIKASI DAN MONITORING	1	Kajian	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	269.956	269.689	99,90	99,90	269.689	99,90	269.689

Satker PnP Banten

3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.868		0	99,97	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Verifikasi dan Monev	1	Laporan	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	269.956	269.868	0	0	99,97	100,00

Gambar Progres Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan”

Didalam Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Sinkronisasi Program Pusat Daerah Provinsi DKI Jakarta & Banten

Waktu & Tempat : 20 September 2023/ Hotel Horison Ciledug

Daftar Undangan :

1. Tenaga Ahli Kelembagaan Perumahan
2. Ketua Pokja PKP Provinsi Banten
3. Ketua Pokja PKP Provinsi DKI Jakarta
4. Tenaga Ahli Pendataan Perumahan
5. Perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
6. Perwakilan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. dinas terkait di Provinsi Banten dan Provinsi Jakarta

Maksud^[1]_[SEP] : Melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan program dan kegiatan Direktorat Sistem dan Strategi penyelenggaraan Perumahan melalui BP2P Jawa I dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan PKP di wilayah Provinsi Banten dan DKI Jakarta sekaligus mendapatkan saran dan masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta terkait dengan permasalahan penyelenggaraan PKP di wilayahnya masing-masing.^[1]_[SEP]

Tujuan :

1. Follow up hasil pelaksanaan kegiatan pokja pkp dan forum pkp padata 2021 terkait ^[1]_[SEP]dengan upaya penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ^[1]_[SEP]pokja PKP dan forum PKP;
2. Pendampingan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka penyusunan RP3KP;
3. Monitoring capaian target, hasil, dan manfaat kegiatan, dan perumusan strategi ^[1]_[SEP]penyelesaian kegiatan; ^[1]_[SEP]
4. Pendampingan penyusunan rencana kerja dan program kerja pokja PKP;
5. Advokasi kegiatan pembinaan penyusunan basis data;
6. Advokasi pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder lain dalam penyelenggaraan ^[1]_[SEP]PKP . ^[1]_[SEP]

Isu dan Permasalahan :

1. Provinsi Banten: Isu Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman, yang meliputi: Alokasi tanah dan Ruang, Urbanisasi, Konflik kepentingan, Infrastruktur, Permasalahan Lingkungan, Air Minum dan Sanitasi, Perumahan bagi MBR, Belum adanya dokumen Perencanaan PKP .

Permasalahan Umum	Rekomendasi Rencana Kerja Prioritas
Belum adanya kajian tentang alternative mengenai bahan dan teknologi bangunan yang ada di Banten	Penyusunan kajian tentang teknologi dan bahan bangunan (Rumah Bambu, Rumah Oksigen)
Desain alternative rumah tumbuh	Mendorong rekayasa desain rumah tumbuh sebagai percontohan kepada pengembangan kedepannya
MBR Non Formal belum mendapatkan akses pendanaan di bank penjamin kredit perumahan	Melakukan Mapping terhadap perumahan MBR
Lokasi Perumahan subsidi biasanya jauh dari tempat kerja	Untuk pembiayaan MBR non Formal dapat dibantu untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui bank, dengan mendorong Jamkrida sebagai lembaga penjamin
Belum tersosialisasikannya peraturan Perundangan terkait keswadayaan, kemitraaan dan peran masyarakat	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan keswadayaan dan peran masyarakat
Belum tersosialisasikannya program pokja PKP	Sosialisasi program pokja PKP kepada Masyarakat
Kepedulian LPM/BKM /PKK terhadap pembangunan perumahan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisir lembaga yang sudah ada didesa dan kecamatan • Pelatihan kepada LPM/BKM/PKK,
Belum masuk dalam DPA di BPPMD	<ul style="list-style-type: none"> • Peduli untuk pembangunan pemukiman di wilayahnya

DOKUMENTASI

RAPAT PERSIAPAN DAN KOORDINASI I: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 DI PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA



Pembukaan dan Arahan oleh Asisten Bidang
Perumahan Setda Provinsi Banten



Sambutan oleh Kepala Balai P2P Jawa I



Sesi Panel I
Penguatan Kelembagaan Pokja PKP



Sesi Tanya Jawab Panel I





Peserta Rapat



Sesi Panel II
Membangun Basis Data PKP



Sesi Tanya Jawab Panel II



Sesi Tanya Jawab Panel II



2. Rapat Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten Tahun 2023

Waktu dan Tempat : 6 Desember 2023/ Hotel Fuscani Jakarta

Daftar Undangan : 1. Kasubbag TU dan Umum Balai P2P Jawa I
2. Perwakilan Pokja PKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Perwakilan Pokja PKP Pemerintah Provinsi Banten, Tenaga Ahli Kelembagaan Balai P2P Jawa I
4. Tenaga Ahli Manajemen Proyek Balai P2P Jawa I
5. Asisten TA Pendataan Perumahan Jawa I. [L] [SEP]

Maksud [L] [SEP] : Maksud dilaksanakannya rapat pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tahun 2023 adalah melakukan konsolidasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP tahun 2023 dan evaluasi kegiatan dan rencana aksi pokja PKP dan forum PKP 2023, pencapaian dan strategi advokasi RP3KP bidang perumahan, dan strategi pencapaian pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, pencapaian spm bidang perumahan, dan isu-isu PKP sesuai kebutuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota. [L] [SEP]

Tujuan : Tujuan dilaksanakannya rapat pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tahun 2023, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Review pencapaian data supply and demand bidang perumahan (e-profil dan psr); [L] [SEP]
2. Konsolidasi rencana dan dukungan alokasi anggaran penyelenggaraan bidang [L] [SEP] perumahan oleh pemerintah daerah; [L] [SEP]
3. Melakukan penguatan kelembagaan peran pokja PKP dan forum pkp dalam [L] [SEP] peningkatan kolaborasi di daerah, penerapan SPM, dan penyusunan RP3KP; [L] [SEP]
4. Melakukan review dan evaluasi capaian kinerja pokja PKP [L] [SEP] provinsi/kabupaten/kota; [L] [SEP]
5. Perumusan strategi percepatan pembangunan basis data PKP dan pengelolaan [L] [SEP] sistem informasi pendataan perumahan. [L] [SEP]

Permasalahan Umum	Rencana Kerja
Belum adanya kajian tentang alternative mengenai bahan dan teknologi bangunan yang ada di Banten	Penyusunan kajian tentang teknologi dan bahan bangunan
Desain alternative rumah tumbuh	Mendorong rekayasa desain rumah tumbuh sebagai percontohan kepada pengembangan kedepannya
MBR Non Formal belum mendapatkan akses pendanaan di bank penjamin kredit perumahan	Melakukan Mapping terhadap perumahan MBR
Lokasi Perumahan subsidi biasanya jauh dari tempat kerja	Untuk pembiayaan MBR non Formal dapat dibantu untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui bank, dengan mendorong Jamkrida sebagai lembaga penjamin
Belum adanya Satu Data PKP	<ul style="list-style-type: none"> - Updating database PKP - Peningkatan database dibidang PKP - Pembangunan aplikasi Satu Data PKP yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah

	
<p>Sesi Tanya Jawab</p>	<p>Peserta rapat pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tahun 2023</p>
	
<p>Peserta rapat pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tahun 2023</p>	<p>Foto Bersama Peserta rapat pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tahun 2023</p>

DOKUMENTASI

RAPAT SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT – DAERAH TAHUN 2023 TAHAP II (USULAN KEGIATAN TAHUN 2025)

	
<p>Laporan Panitia, pembukaan dan arahan yang diwakilkan oleh Kasubbag TU dan Umum Balai P2P Jawa I</p>	<p>Review Kinerja Kemandirian Kelembagaan Pokja PKP dan Review Hasil Kolaborasi</p>
	
<p>Review Kinerja Kemandirian Kelembagaan Pokja PKP dan review Hasil Kolaborasi Tahun 2023 oleh Tenaga Ahli Pokja PKP Balai P2P Jawa I</p>	<p>Dukungan Pemprov Banten dalam Penguatan POKJA Forum PKP oleh Dinas Perkim Provinsi Banten</p>
	
<p>Progress dan Strategi Pelaksanaan Rencana Kerja Pokja PKP Tahun 2023 dan Usulan Rencana Kerja Pokja PKP Tahun 2024 oleh Pti, Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Setda Provinsi Banten.</p>	<p>Sesi Tanya Jawab</p>

3. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Tahun 2023 Tahap II

[L]
[SEP]

Waktu & : 5 Desember 2023/ Tuscany Hotel Serpong
Tempat
Kegiatan

Daftar :
Undangan

1. perwakilan Direktur Rumah Susun
2. perwakilan Direktur Rumah Khusus,
3. perwakilan Direktur Rumah Swadaya
4. perwakilan Direktur RUK
5. perwakilan Direktur SSPP
6. perwakilan Balai PPW Jakarta Metropolitan
7. perwakilan Bappeda
8. perwakilan Dinas terkait pada Provinsi DKI Jakarta dan Banten
9. perwakilan DPP REI
10. perwakilan DPP APERSI
11. dan perwakilan DPP HIMPERA

Maksud^[L]_[SEP] : melaksanakan salah satu fungsi yang ada di Balai P2P Jawa I yaitu koordinasi dan sinkronisasi program dalam menyusun rencana awal kebutuhan kegiatan dan anggaran TA 2025 serta pengendalian kegiatan penyelenggaraan perumahan oleh stakeholder yang berlangsung di daerah

Tujuan :
:

1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tahun 2020 - 2024 sebagai bahan penyusunan strategi penyelenggaraan perumahan tahun 2025-2029; ^[L]_[SEP]
2. Mempersiapkan strategi penyusunan pemrograman dan penganggaran kegiatan perumahan TA. 2025 melalui tahapan koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah; ^[L]_[SEP]
3. Menjaring usulan awal rencana penyelenggaraan perumahan sesuai prioritas nasional melalui pengusulan kegiatan oleh pemda secara efektif dan efisien; ^[L]_[SEP]
4. Meningkatkan kualitas output dan outcome perencanaan serta pengendalian yang dilaksanakan oleh Balai P2P Jawa I dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Banten dalam hal koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan pelaporan;
5. Mengidentifikasi proses serah terima aset dan kebutuhan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR) TA 2025 serta mengidentifikasi pemanfaatan/penghunian aset oleh pemerintah daerah. ^[L]_[SEP]

Isu dan :
Permasalahan
an

Provinsi Banten: Isu Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman, yang meliputi: Alokasi tanah dan Ruang, Urbanisasi, Konflik kepentingan, Infrastruktur, Permasalahan Lingkungan, Air Minum dan Sanitasi, Perumahan bagi MBR, Belum adanya dokumen Perencanaan PKP

DOKUMENTASI

RAPAT SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT – DAERAH TAHUN 2023 TAHAP II (USULAN KEGIATAN TAHUN 2025)

	
<p style="text-align: center;">Sambutan Selamat Datang oleh Plt. Balai P2P Jawa I</p>	<p style="text-align: center;">Sambutan Sekretaris Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten</p>
	
<p style="text-align: center;">Pembukaan dan Keynote Speech oleh Kasubbag Umum dan TU</p>	<p style="text-align: center;">Sesi Panel I</p>
	
<p style="text-align: center;">Peserta Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Tahun 2023 Tahap II</p>	<p style="text-align: center;">Sesi Tanya Jawab Panel I</p>

4. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Tahun 2023 Tahap I dan Sosialisasi Klinik Rumah Swadaya Balai P2P Jawa I

Waktu & Tempat Kegiatan	:	1. 5 – 6 Maret 2023 / Hotel Golden Tulip Essential Tangerang
Daftar Undangan	:	1. Perwakilan Direktorat Swadaya 2. Tenaga Ahli Klinik Swadaya Balai P2P Jawa I 3. Dinas dan Suku Dinas Bidang Perumahan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten
Maksud ^[1] _[5P]	:	Maksud diadakanya kegiatan ini adalah melaksanakan salah satu fungsi yang ada di Balai P2P Jawa I yaitu koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Tahun 2024 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada pada Direktorat Jenderal Perumahan PUPR agar selaras dengan kebutuhan pembangunan perumahan baik yang berlangsung di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Tujuan	:	Tujuan pelaksanaan rapat ini adalah optimalisasi perencanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan strategi penyusunan pemrogaman dan penanganan kegiatan perumahan TA. 2024 melalui tahapan koordinasi dan sinkronisasi;2. Menjaring usulan kebutuhan penanganan perumahan sesuai prioritas nasional melalui pengusulan kegiatan oleh pemda, meningkatkan kualitas output dan outcome perencanaan serta pengendalian dalam hal koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan pelaporan;3. Mengidentifikasi proses serah terima aset dan kebutuhan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR) TA 2024;4. Mengidentifikasi pemanfaatan/penghunian aset oleh pemerintah daerah dan melaksanakan sosialisasi klinik rumah swadaya.

DOKUMENTASI

RAPAT SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT - DAERAH TAHUN 2023 TAHAP I (USULAN KEGIATAN TAHUN 2024) DAN SOSIALISASI KLINIK RUMAH SWADAYA BALAI P2P JAWA I

Hari Pertama

	
<p>Laporan Ketua Panitia oleh Ketua Balai P2P Jawa I</p>	<p>Pemateri Sesi Panel I</p>
	
<p>Penyampaian Materi oleh TA. Klinik Rumah Swadaya Balai P2P Jawa I</p>	<p>Sesi Tanya Jawab hari Pertama</p>
	
<p>Pemateri Sesi Panel II</p>	<p>Foto Bersama</p>

DOKUMENTASI

RAPAT SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT - DAERAH TAHUN 2023 TAHAP I (USULAN KEGIATAN TAHUN 2024) DAN SOSIALISASI KLINIK RUMAH SWADAYA BALAI P2P JAWA I

Hari Kedua



Sesi Desk Provinsi Banten

Sesi Desk Provinsi DKI Jakarta

Sesi Desk Klinik Rumah Swadaya Balai P2P Jawa I

Foto Bersama

LEMBAR MONITORING SINKRONISASI KEGIATAN DESK VERIFIKASI USULAN KABUPATEN/KOTA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I TA 2024

1. Nama :
2. Instansi : DPRKP DKI Jakarta
3. Jabatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi : Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Sinkronisasi			Keterangan (Usulan Baru/Tidak)
		RP3KP (Ada/Tidak)	SIBARU (Ada/Tidak)	Kesiapan (RC)	
1	<p>Kegiatan :</p> <p>Pengajuan Rumah Swadaya di Kelurahan Krendang - Jakarta Barat</p> <p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Melakukan perbaikan pada rumah warga sesuai data RTLH DKI Pada</p>	Tidak ada	Tidak ada	×	<p>Usulan :</p> <p>Usulan baru untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Krendang</p> <p>Sinkronisasi dengan Kegiatan di Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan sinkronisasi dengan direktorat SSPP terkait Jakarta Satu DKI (platform data DKI) dengan platform e-RTLH PUPR 2. Diperlukan rapat koordinasi lanjutan dengan Direktorat Rumah Swadaya untuk detail pengajuan Rumah Swadaya di DKI Jakarta 3. Pengajuan Rumah Swadaya dilakukan dengan platform SIBARU. Berdasarkan data RTLH Kelurahan Krendang- Tambora yang akan di input oleh Sudin PRKP Jakarta Barat

4.2.2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) terbagi menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten. Mekanisme sumber anggaran pada Provinsi DKI Jakarta dan Banten yaitu Reguler yang dibiayai dari Rupiah Murni (RPM).

Satker Balai P2P Jawa I

7	4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					196.500	196.400		0	99,95	100,00
8	4978.ABF.011.101.A	Survey dan Wasdal BSPS	1	Laporan	DKI JAKARTA	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	196.500	196.400	0	0	99,95	100,00
9	4978.ABF.014	Klinik Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					190.000	189.867		0	99,93	100,00
10	4978.ABF.014.100.A	Klinik Rumah Swadaya	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	190.000	189.867	0	0	99,93	100,00

Satker PnP DKI Jakarta

30	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	137	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.267.773	3.256.642		0	99,66	99,66
31	4978.RBB.008.100.A	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	2.740.000	2.740.000	0	0	100,00	100,00
32	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	527.773	516.642	0	0	97,89	97,89

Satker PnP Banten

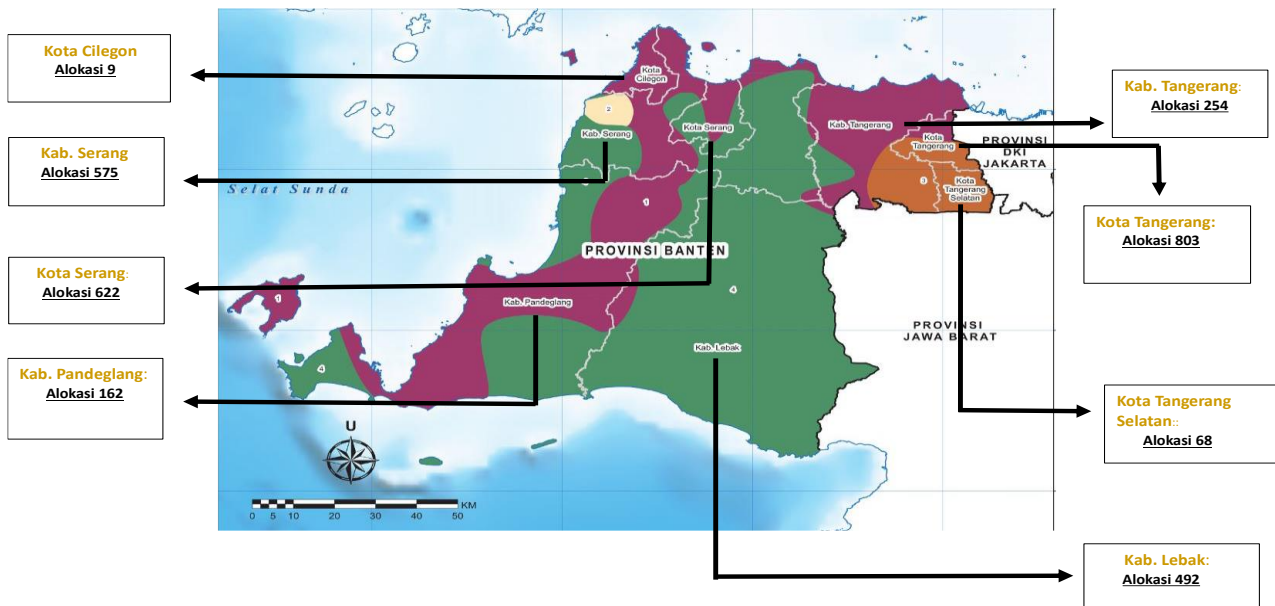
79	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3340	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					71.777.698	71.130.998		320.000	99,54	99,66
80	4978.RBB.008.100.A	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3340	Unit	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	66.800.000	66.480.000	0	320.000	99,52	99,64
81	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Dokumen	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	4.977.698	4.970.998	0	0	99,87	100,00

Gambar Progres Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja “Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya”

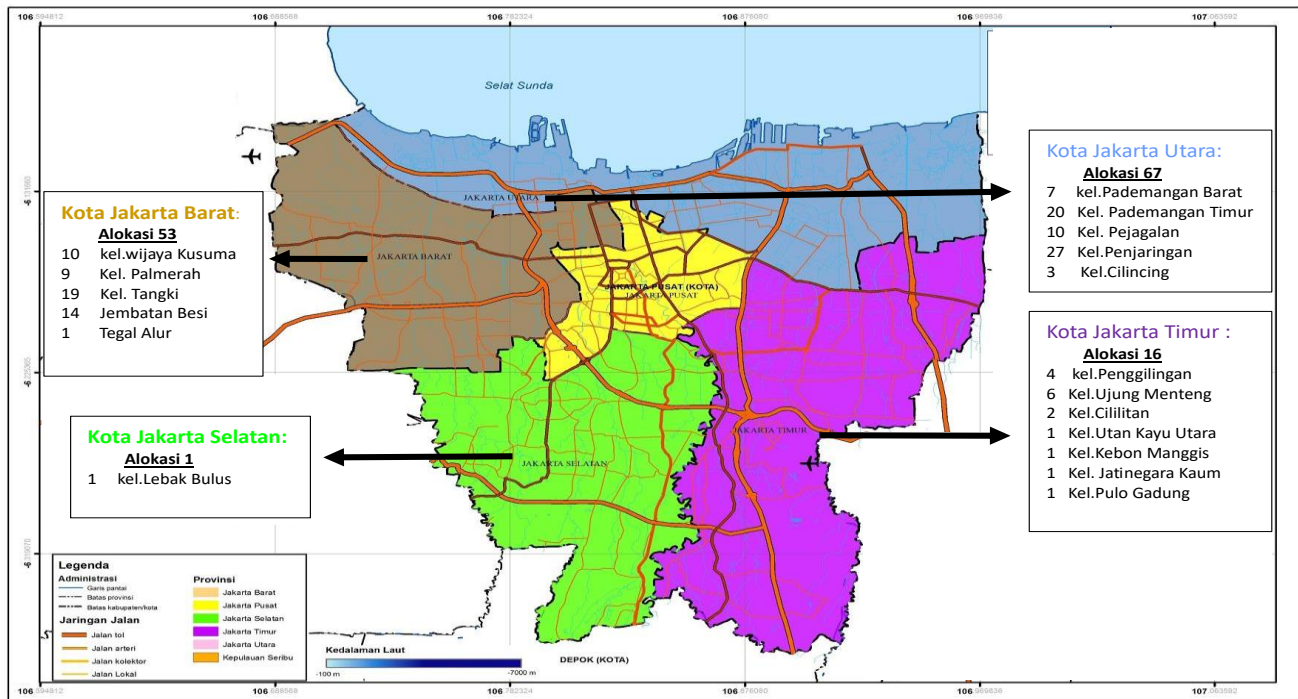
Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dari target 137 unit secara fisik capaiannya adalah 97.08% dan secara keuangan capaian penyerapan adalah 99.66% atau sebesar Rp 3.256.642.000,- dari Rp 3.267.773.000,-

Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Banten, dari target 3.340 unit secara fisik capaiannya adalah 99.52% dan secara keuangan capaian penyerapan adalah 99.52% atau sebesar Rp 71.130.998.000,- dari Rp. 71.777.698.000,-

Peta Bantuan BSPS Provinsi BANTEN



Peta Bantuan BSPS Provinsi DKI Jakarta



A. KLINIK RUMAH SWADAYA

1. Gambaran Umum Kegiatan

Klinik Rumah Swadaya adalah kegiatan pemberian layanan informasi dan bantuan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni. Klinik Rumah Swadaya juga mendorong masyarakat melakukan pembangunan rumah secara mandiri dengan bantuan/pendampingan dalam tahapan perencanaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pemanfaatan rumah.

Keberadaan Klinik Rumah Swadaya ini menjadi sangat penting sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 15 huruf p, yaitu memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Selain itu fasilitasi penyediaan jasa rumah swadaya juga diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, termasuk bidang perumahan juga diamanatkan untuk meningkatnya jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak huni sebesar 70%. Tentu saja untuk memenuhi target tersebut tidak akan terpenuhi hanya dengan bantuan pemerintah dengan mekanisme bantuan/subsidi akan tetapi harus didukung oleh pembangunan rumah swadaya atau pembangunan yang dibangun secara mandiri oleh Masyarakat.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Pekerjaan Klinik Rumah Swadaya adalah memberikan layanan klinik rumah swadaya bagi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni.

Sedangkan tujuan pekerjaan Klinik Rumah Swadaya ini adalah meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah yang layak huni.

Sasaran untuk mencapai tujuan dimaksud, antara lain:

- i. Memberikan layanan bantuan teknis kepada masyarakat;
- ii. Memberikan layanan informasi rumah swadaya;
- iii. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni; dan
- iv. Mengukur tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan rumah swadaya.

3. Keluaran (Out put)

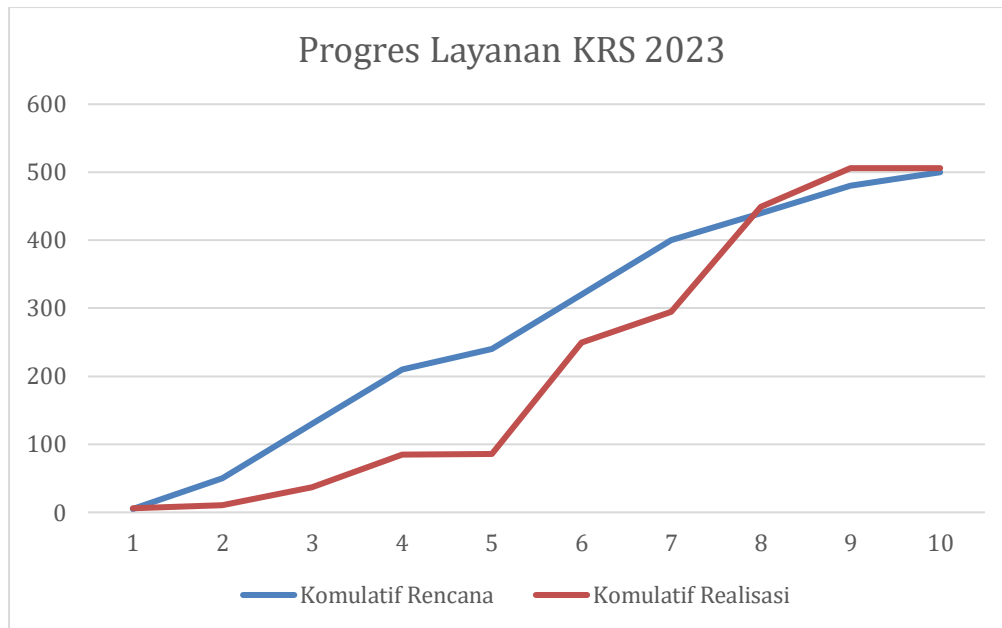
Keluaran (*output*) dari pekerjaan Klinik Rumah Swadaya adalah terselenggaranya layanan klinik rumah swadaya bagi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni.

4. Target Capaian Tahun 2023

No.	Kegiatan		2023										Target Output
			Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Persiapan												
a.	Koordinasi	BP2P 1											
b.	Pembuatan bahan sosialisasi, buku saku, baner, video, booth	BP2P 1											Tersusunnya bahan sosialisasi
c.	Penetapan Lokasi Per	BP2P 1											Terpilih 5 desa untuk kunjungan lapangan
d.	Penyusunan Program	BP2P 1											
2	Sosialisasi Massa												
a.	Rencana Komunikasi Sosial Media	BP2P 1											
b.	Pembuatan media sosial dan content media sosial												
3	FGD dan Koordinasi												
a.	FGD 1 (terintegrasi Sinkronisasi PKP)	DKI Jakarta											Tersosialisasikannya layanan KRS pada pemerintah daerah dan penentuan lokasi
b.	FGD 2 (terintegrasi Si	Banten											Evaluasi penyelenggaraan layanan KRS
c.	Koordinasi dg Univers	DKI, Banten											Tersosialisasikannya layanan KRS pada universitas
d.	Koordinasi dg Asosiasi	IAI DKI, Banten											Tersosialisasikannya layanan KRS pada asosiasi profesi
4	Layanan												
a.	Kunjungan Desa	5 Desa											Terselenggaranya layanan KRS pada masyarakat di 5 desa
b.	Kampanye Publik	CFD Serang dan Sudirman			1x	1x							Tersosialisasikannya layanan KRS pada masyarakat
c.	Website	BP2P 1											Siap menggunakan web aplikasi
d.	Pojok Layanan Balai	BP2P 1											Siap layanan
5	Pelaporan												
a.	Monev												Terevaluasinya penyelenggaraan
b.	Pelaporan												Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan

5. REKAP LAYANAN KLINIK RUMAH SWADAYA

NO	LAYANAN	TARGET LAYANAN									
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rencana	5	45	80	80	30	80	80	40	40	20
2	Realisasi	6	5	26	48	1	164	45	154	57	0
3	Kumulatif Rencana	5	50	130	210	240	320	400	440	480	500
4	Kumulatif Realisasi	6	11	37	85	86	250	295	449	506	506
5	Deviasi	1	-39	-93	-125	-154	-70	-105	9	26	6



6. Strategi yang di gunakan untuk menanggulangi Deviasi

Strategi yang dilakukan oleh Klinik Rumah Swadaya Balai P2P Jawa 1 di kategori layanan informasi pada tahun 2023 adalah melakukan sosialisasi dengan SKPD di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Lebak. kunjungan ke lapangan, ke Provinsi Banten, juga meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi sebagai tindak lanjut penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan fokus kegiatan berupa pemberian layanan di Desa-desa.

7. Dokumentasi dalam Kegiatan KRS

Kunjungan Lapangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak.



Rapat Tindak Lanjut dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting di Desa Cikasungka.



4.2.2.1 Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya Satker Balai Jawa I

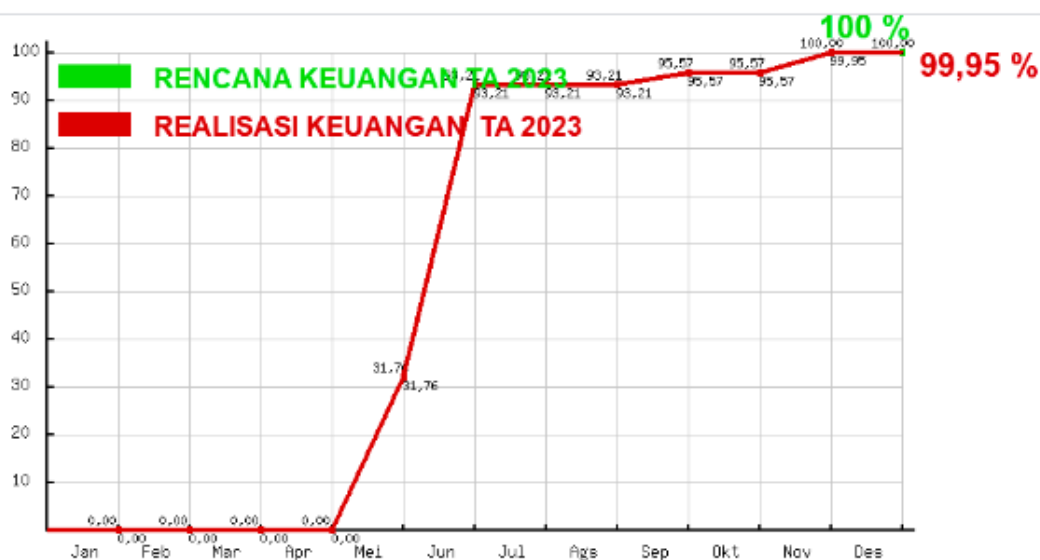
INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[420149] BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I						
Kasatker	Firsta S.T., MUDD						
PPK	Harum Bonang Asmoro, SE						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[ABF] Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
Rincian Output (RO)	[011] Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya						
Komponen	[101] Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Swadaya						
Kode Paket	07.420149.IA.4978.ABF.011.101.A						
Nama Paket	Survey dan Wasdal BSPS						
Target Output Paket	1 Laporan						
Provinsi	DKI JAKARTA						
Kabupaten	DKI JAKARTA						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Jasa Lainnya						
Kategori Kegiatan	Pengawasan/Supervisi						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 196.500.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	196.500.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 196.500.000 ,-						
Realisasi	Rp. 196.400.000 ,-						
Progres Keu	99,95 %						
Progres Fisik	100,00 %						

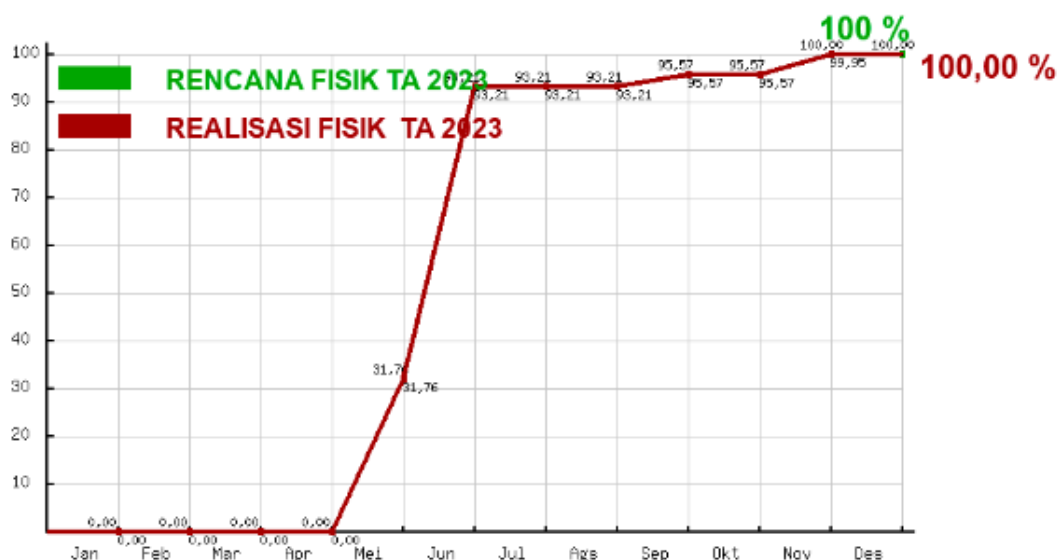
INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

>

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8.700.000	8.600.000	98,85
	1. Perjalanan Dinas Biasa	1	LS	8.700.000	8.700.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				4.650.000	4.650.000	100,00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	LS	4.650.000	4.650.000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				183.150.000	183.150.000	100,00
	1. Paket Meeting Luar Kota, Honor dan Transport Peserta	1	LS	183.150.000	183.150.000		
TOTAL					196.500.000	196.400.000	99,95



Renc. e-Mon	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	93,21	93,21	93,21	95,57	95,57	100,00	100,00
Real. Keu	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	93,21	93,21	93,21	95,57	95,57	99,95	99,95



Renc. eMon	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	93,21	93,21	93,21	95,57	95,57	100,00	100,00
Real. Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	93,21	93,21	93,21	95,57	95,57	99,95	100,00

A. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2023 Provinsi DKI Jakarta

Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2023 Provinsi DKI Jakarta Tahap VI Nomor. 236/BA/BP2PJ-I/2023 tanggal 5 Juli 2023:

1. Permasalahan yang dihadapi adalah 2 penerima bantuan mengundurkan diri karena konflik keluarga;
2. Rencana tindak lanjut adalah dilakukan mediasi dengan penerima bantuan dan keluarga besarnya, didampingi oleh pemerintah setempat.

Dokumentasi BSPS
Kel. Penjaringan, Jakarta Utara



Nama Penerima Bantuan **WAHYUDIN**
No. BNBA 03
Alamat JL.PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Besaran Nilai BSPS Rp. 20.000.000
Besaran Nilai Swadaya Rp. 9.600.000



Nama Penerima Bantuan **M. SAHARIS**
No. BNBA 05
Alamat JL.PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Besaran Nilai BSPS Rp. 20.000.000
Besaran Nilai Swadaya Rp. 6.185.000



Nama Penerima Bantuan **DUDUNG**

B. Rapat Penajaman dan Rekonsiliasi Hasil Verifikasi Data BNBA CPB BSPS dalam Mendukung PKE TA. 2023

Konsinyasi dalam Rangka Penajaman dan Rekonsiliasi Hasil Verifikasi Data BNBA CPB BSPS dalam Mendukung PKE TA. 2023 sesuai dengan undangan Direktur Rumah Swadaya nomor UM.0102-Rw/1150 tanggal 4 Desember 2023 di Atria Hotel Gading Serpong pada tanggal 13 – 14 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Konsinyasi dihadiri oleh Direktur Rumah Swadaya, perwakilan BPIW, perwakilan Direktorat SSPP, Perwakilan Direktorat Rumah Swadaya dan Perwakilan 15 Balai P2P seluruh Indonesia;
- b. Tujuan dilaksanakannya konsinyasi adalah sebagai media koordinasi lintas unor antara DJP, BPIW dan 17 Balai P2P seluruh Indonesia, mendapatkan data lokasi dan jumlah CPB Regular TA. 2023 yang beririsan dengan PKE dan Stunting, menyusun informasi terkait Penyusunan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Alasan lolos/tidak lolos data terverifikasi, rekap data kab/kota/provinsi yang tidak dilakukan verifikasi beserta alasannya;
- c. Pembukaan dan arahan oleh Direktur Rumah Swadaya dengan harapan dari kegiatan konsinyasi adalah sebagai berikut :
- d. Terlaksananya koordinasi level unor antara Direktorat Rumah Swadaya, Koordinator Tim Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting (BPIW) dan Ketua Tim Verifikasi Balai P2P dalam rangka pengendalian data PK21 berasal dari BKKBN dan P3KE dari Kemenko PMK kegiatan BSPS;
- e. Tersusunnya informasi rekapitulasi pemanfaatan data PK-21 berasal dari BKKBN dan P3KE dari Kemenko PMK dalam mendukung PKE yang disepakati bersama sebagai bahan evaluasi data sektor perumahan dalam rangka penyiapan feedback bahan laporan ke Kemenko PMK;
- f. Bertambahnya data Penerima Bantuan (PB) PKE hasil sandingan usulan Reguler (Non PKE) dengan data PK-21 yang berasal dari BKKBN dan P3KE dari Kemenko PMK;



Diskusi dan Tanya J^{awa}n



Desk penajaman dan Rekonsiliasi Hasil Verifikasi Data BNBA CPB BSPS dalam mendukung PKE TA. 2023

Kamis, 14 Desember 2023



Desk Lanjutan



Desk Lanjutan

DOKUMENTASI

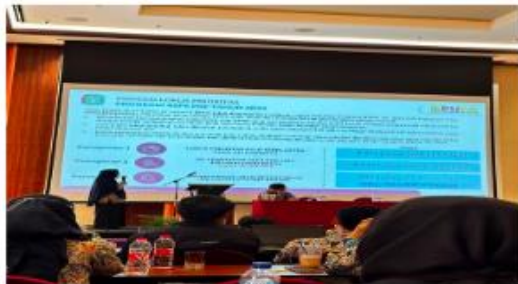
Rabu, 13 Desember 2023



Laporan Ketua Panitia oleh Ketua Tim Verifikasi dan Pengelolaan Data, Direktorat Rumah Swadaya



Pembukaan dan Arahan oleh Direktur Rumah Swadaya



Paparan Kronologis Pembahasan Data Sektor Perumahan oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I



Peserta Rapat

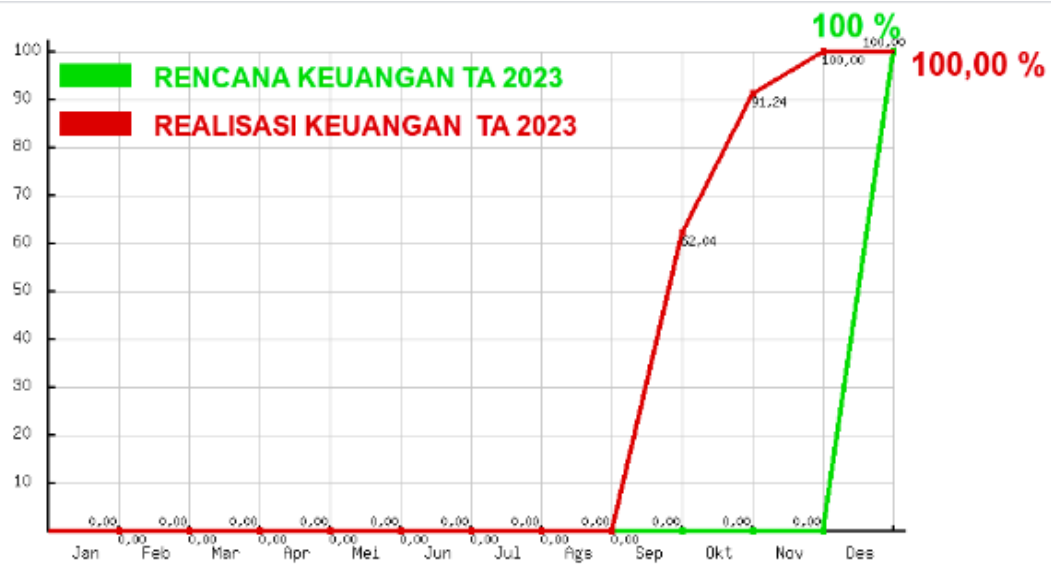
4.2.2.2 Profile Paket Pekerjaan BSPS Satker PnP DKI Jakarta

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

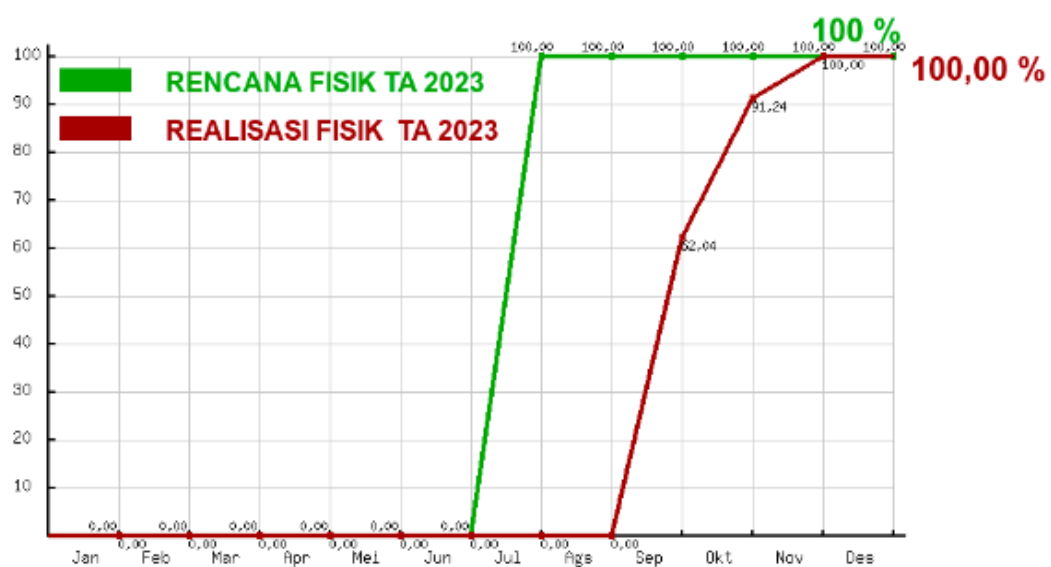
Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[420163] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA						
Kasatker	Siti Briliani Putri, S.T., M.T., M.Sc.						
PPK	Nandaka Ekacarana, ST						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[RBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[008] Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya						
Komponen	[100] Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Regu						
Kode Paket	07.420163.IA.4978.RBB.008.100.A						
Nama Paket	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya						
Target Output Paket	1 Dokumen						
Provinsi	DKI JAKARTA						
Kabupaten	DKI JAKARTA						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Administrasi Umum						
Kategori Kegiatan	Administrasi Umum						
Rencana Tanggal Mulai	16-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	29-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 2.740.000.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	2.740.000.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 1.000.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 2.740.000.000 ,-						
Progres Keu	100,00 %						
Progres Fisik	100,00 %						

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah				2.740.000.000	2.740.000.000	100,00
	1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	14	Unit	20.000.000	280.000.000		
	2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya OSPS	123	Unit	20.000.000	2.460.000.000		
TOTAL					2.740.000.000	2.740.000.000	100,00



Renc. e-Mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real. Keu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	91,24	100,00	100,00



Renc. eMon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Real. Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	91,24	100,00	100,00



PELAKSANAAN PEKERJAAN TA. 2023
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV. DKI JAKARTA



PROGRES INPUT SIRUS BSPS PROV. DKI JAKARTA

NO	KOTA ADMINISTRASI	KELURAHAN	ALOKASI	SK DIRJEN	SK PPK		Profil Penerima Bantuan	Photo 0%	Photo 30%	Photo 100%	LPD 1	LPD 2
					Sudah	Belum						
1	JAKARTA BARAT		53	53	53	-	53	53	50	13	50	22
		WIJAYA KUSUMA	10	10	10	-	10	10	10	5	10	7
		PALMERAH	9	9	9	-	9	9	8	2	8	4
		TANGKI	19	19	19	-	19	19	17	2	17	5
		JEMBATAN BESI	14	14	14	-	14	14	14	4	14	6
		TEGAL ALUR	1	1	1	-	1	1	1		1	
2	JAKARTA UTARA		67	67	67	-	67	67	66	34	67	34
		PADEMANGAN BARAT	7	7	7	-	7	7	6	1	7	1
		PADEMANGAN TIMUR	20	20	20	-	20	20	20	15	20	14
		PEJAGALAN	10	10	10	-	10	10	10	4	10	4
		PENJARINGAN	27	27	27	-	27	27	27	14	27	13
		CILINCING	3	3	3	-	3	3	3		3	2
3	JAKARTA TIMUR		16	16	16	-	16	16	14	8	16	8
		PENGGILINGAN	4	4	4	-	4	4	3	2	4	2
		UJUNG MENTENG	6	6	6	-	6	6	5	4	6	4
		CILILITAN	2	2	2	-	2	2	2		2	
		UTAN KAYU UTARA	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
		KEBON MANGGIS	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
		JATINEGARA KAUM	1	1	1	-	1	1	1		1	
		PULOGADUNG	1	1	1	-	1	1	1		1	
4	JAKARTA SELATAN		1	1	1	-	1	1				
		LEBAK BULUS	1	1	1	-	1	1				
TOTAL			137	137	137	-	137	137	130	55	133	64



PROGRES KEUANGAN BSPTS PROV. DKI JAKARTA



PENYALURAN BSPTS



PENDAMPINGAN BSPTS



KEGIATAN	PROGNOSIS (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)
Belanja Bahan	54,800,000,-	54,309,920,-	490,080,-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,209,000,-	32,435,865,-	773,135,-
Belanja Jasa Lainnya (Gaji TA, TFL, dan KI)	191,400,000,-	191,400,000,-	-
Belanja Perjalanan Biasa	146,739,000,-	137,160,000,-	9,579,000,-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Uang Harian, Snack dan Makan Sosialisasi)	101,625,000,-	101,625,000,-	-

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 100%

Nama Penerima Bantuan	M. Saharis
No. BNBA	5
Alamat	JL. PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Hebel, Semen, Pasir, Besi, Kayu, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 50.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	60 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Hamzah Rahim
No. BNBA	23
Alamat	JL. PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 4.620.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	35 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 100%

Nama Penerima Bantuan	Sumiyati
No. BNBA	4
Alamat	JL. PLUIT DALAM NO.08 RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Hebel, Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 20.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	50 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Hamzah Rahim
No. BNBA	23
Alamat	JL. PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 4.620.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	35 hari

KOTA ADM : Jakarta Barat
KECAMATAN : Palmerah
KELURAHAN : Palmerah



Foto 0%



Foto 30%



Foto 100%

Nama Penerima Bantuan	Mustopa
No. BNBA	6
Alamat	PAKEMBANGAN BARAT RT007/005
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Cat, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 5.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	60 hari

KOTA ADM : Jakarta Barat
KECAMATAN : Taman Sari
KELURAHAN : Tangki



Foto 0%



Foto 30%



Foto 100%

Nama Penerima Bantuan	Dewi Nurjanah
No. BNBA	4
Alamat	JL. IBRAHIM NO. 20 RT.005/005
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Keramik, Cat, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 10.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	50 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Pademangan
KELURAHAN : Pademangan Timur



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Edi Sudarna
No. BNBA	1
Alamat	JL. PADEMANGAN VIII RT.009 RW.010
Kegiatan BSPS	EDI SUDARNA
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 5.450.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	30 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Pademangan
KELURAHAN : Pademangan Timur



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Harizal Sani
No. BNBA	3
Alamat	JL. PADEMANGAN VI RT.001 RW.010
Kegiatan BSPS	EDI SUDARNA
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 6.300.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	30 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Pademangan
KELURAHAN : Pademangan Timur



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Rusmi
No. BNBA	8
Alamat	JL.PESANGGRAHAN IX NO.46 RT.007 RW012
Kegiatan BSPS	EDI SUDARNA
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 3.920.000,-

KOTA ADM : Jakarta Barat
KECAMATAN : Grogol Petamburan
KELURAHAN : Wijaya Kusuma



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Hadijah
No. BNBA	5
Alamat	JL. KEBON PISANG RT 04 RW 07
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Kayu, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 1.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	45 hari

KOTA ADM : Jakarta Barat
KECAMATAN : Grogol Petamburan
KELURAHAN : Wijaya Kusuma



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Saefullah
No. BNBA	7
Alamat	KAMPUNG GUSTI RT 002 RW 005
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 5.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	40 hari

KOTA ADM : Jakarta Barat
KECAMATAN : Grogol Petamburan
KELURAHAN : Wijaya Kusuma



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Tarjono
No. BNBA	4
Alamat	JL. KEBON PISANG RT 04 RW 07
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 1.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	35 hari



Kel. Utan Kayu Utara



Kel. Penjaringan



Kel. Kebon Manggis



Kel. Tangki



Kel. Wijaya Kusuma



Kel. Pademangan Timur

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Sasmiyati
No. BNBA	2
Alamat	JL. PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 5.800.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	25 hari

KOTA ADM : Jakarta Utara
KECAMATAN : Penjaringan
KELURAHAN : Penjaringan



Foto 0%



Foto 30%



Foto 30 - 100%

Nama Penerima Bantuan	Sri Sunarti
No. BNBA	12
Alamat	JL. PLUIT DALAM RT.004 RW.008
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 4.530.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	30 hari

KO
KEI
KEI



Foto 0%



Foto 30%



Foto 100%

Nama Penerima Bantuan	Kasminah
No. BNBA	2
Alamat	KAMPUNG GUSTI RT 001 RW 05
Kegiatan BSPS	PKRS
Besaran Nilai Bantuan	Rp. 20.000.000,-
Bentuk Keswadayaan	Semen, Pasir, Besi, Tukang
Besaran Nilai Swadaya	Rp. 2.000.000,-
Waktu pelaksanaan konstruksi	30 hari

4. 2.2.3 Profile Paket Pekerjaan BPS Satker PnP Banten

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

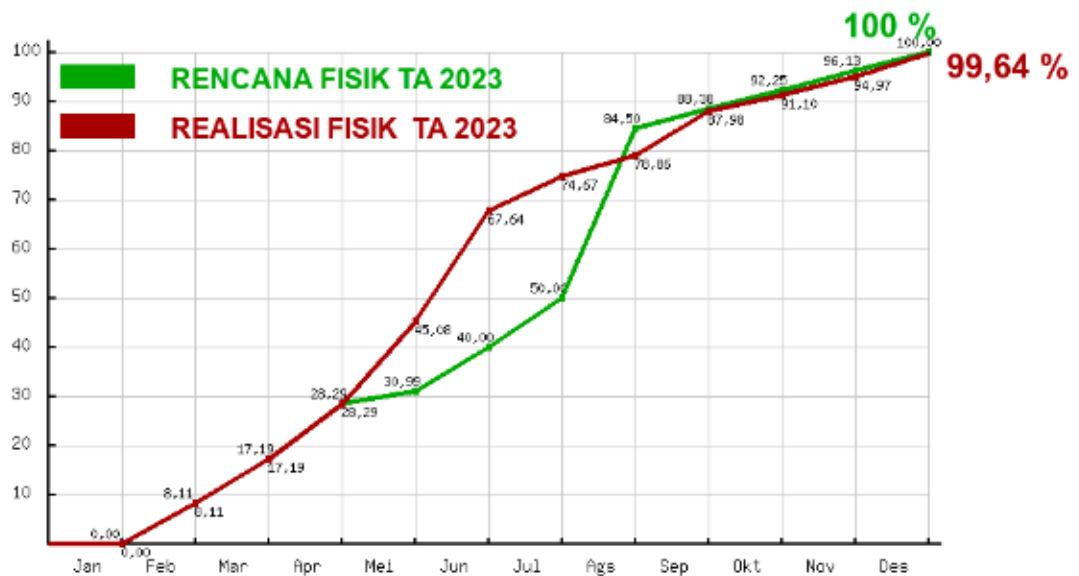
Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN						
Kasatker	Haryo Wacono, ST						
PPK	Dina Nuzulia, ST., M.Eng						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[RBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[008] Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya						
Komponen	[100] Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Reguler						
Kode Paket	07.401662.IA.4978.RBB.008.100.A						
Nama Paket	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya						
Target Output Paket	3340 Unit						
Provinsi	BANTEN						
Kabupaten	KAB. SERANG						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Peningkatan						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 66.800.000.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	66.800.000.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 63.520.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 66.160.000.000 ,-						
Progres Keu	99,52 %						
Progres Fisik	99,64 %						

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah				66.800.000,00	66.800.000,00	100,00
	1. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3340	UNIT	20.000,000	66.800.000,00		
TOTAL					66.800.000,00	66.800.000,00	100,00



Renc. e-Mon	0,00	23,05	47,13	47,22	57,22	74,67	77,46	77,46	92,99	92,99	100,00	100,00
Real. Keu	0,00	23,05	47,13	47,22	57,22	74,67	77,46	77,46	92,99	92,99	100,00	99,52



Renc. eMon	0,00	8,11	17,19	28,29	30,99	40,00	50,00	84,50	88,38	92,25	96,13	100,00
Real. Fis	0,00	8,11	17,19	28,29	45,08	67,64	74,67	78,86	87,98	91,10	94,97	99,64

a. Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan prakarsa MBR dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas, sedangkan tujuannya terbangun rumah yang layak huni oleh MBR sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penyaluran dana bantuan kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan SK Penerima Bantuan dengan 2 (dua) tahap penyaluran berdasarkan peraturan tentang BSPS.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan fisik di lapangan mulai dari tahap 30% sampai dengan 100%.

Bentuk pelaksanaan pekerjaan Administrasi Kegiatan terdiri atas 2 (dua) bagian besar:

1. Penyaluran bantuan
2. Perbaikan rumah



Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 71.777.698.000,- (99,54%) dan realisasi fisik sebesar 99,66%. Untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dari Target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3.340 unit dan realisasinya sebanyak 3.324, antara target semua tercapai.

b. Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam melakukan peningkatan kualitas rumah melalui program BSPS. Tujuan dari kegiatan ini adalah pekerjaan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat berlangsung dengan lancar, tepat waktu dan tepat mutu.

Realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 71.777.698.000,- (99,54%) dan realisasi fisik sebesar 99,66%. Untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dari Target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3.340 unit dan realisasinya sebanyak 3.324, antara target semua tercapai



Gambar BSPS di Kabupaten Serang



Gambar BSPS di Kabupaten Pandeglang

4.2.3 Jumlah Rumah Susun yang Dibangun

Maksud dari pekerjaan Pembangunan Rumah Susun adalah untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Ditjen Perumahan dalam melaksanakan pembangunan rumah susun yang nantinya akan diserahterimakan secara terencana kepada penerima bantuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat hunian yang layak huni. Tahapan pelaksanaan dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Struktur Bangunan mulai dari pondasi, sloof sampai atap;
3. Pekerjaan Utilitas Bangunan (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);
4. Pekerjaan Arsitektur termasuk finishing.

Bentuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Perguruan Tinggi dilakukan secara Kontraktual terdiri atas:

1. Identifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun
2. Koordinasi dan pengawasan ke lapangan
3. Pelaksanaan Pembangunan
4. Pelaporan pelaksanaan di lapangan
5. Peninjauan ke lapangan dalam rangka persiapan pembangunan rumah susun
6. Melakukan koordinasi dan rapat pembahasan secara berkala Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan Rumah Susun terbagi menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten.

Satuan Kerja Balai P2P Jawa I

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Biokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Kes (Rp Ribu)	Flisik (%)
11	4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					3.810.000	3.809.864		0	100,00	100,00
12	4978.ABF.015.104.A	Monitoring Evaluasi Program	1	Laporan	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	1.173.911	1.173.867	0	0	100,00	100,00
13	4978.ABF.015.104.B	Perencanaan Pengelolaan WAK	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.636.089	2.635.997	0	0	100,00	100,00

Satuan Kerja Balai PnP DKI Jakarta

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Biokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Kes (Rp Ribu)	Flisik (%)
5	4978.C88	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					16.448.718	16.158.126	0	0	98,23	98,23
6	4978.C88.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	43	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					16.448.718	16.158.126	0	0	98,23	98,23
7	4978.C88.005.101.A	Pembangunan Rusun Perguruan Tinggi	1	Paket	DKI JAKARTA	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	15.247.045	14.957.815	0	0	98,10	98,10
8	4978.C88.005.102.A	Wadai Pembangunan Rusun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AJ	Swakelola	RPM	344.945	343.583	0	0	99,61	99,61
9	4978.C88.005.102.B	Manajemen Konstruksi Rumah Susun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	DKI JAKARTA	Jasa Konsultasi	Swakelola	RPM	856.728	856.728	0	0	100,00	100,00

Satuan Kerja Balai PnP Banten

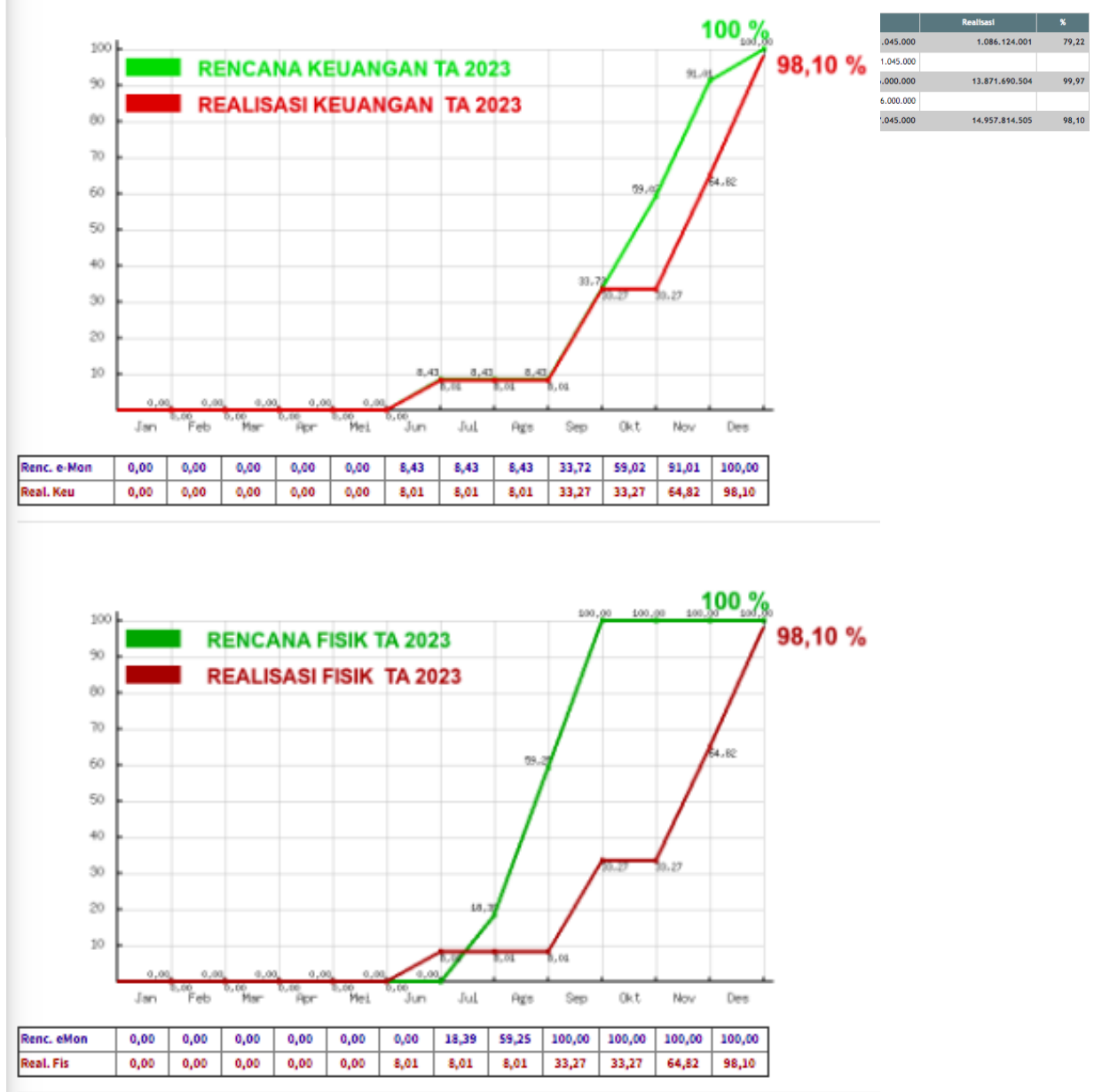
No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Biokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Kes (Rp Ribu)	Flisik (%)
6	4978.C88.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	43	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					4.197.151	4.196.544	0	0	99,99	100,00
7	4978.C88.005.101.A	Pembangunan Rusun Politeknik Ilmu Pemasarakan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham	1	Paket	KOTA TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	2.683.137	2.683.137	0	0	100,00	100,00
8	4978.C88.005.101.D	Pengadaan Meubelair Rusun Politeknik Ilmu Pemasarakan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham	1	Paket	KOTA TANGERANG	Barang	E-purchasing	RPM	1.096.014	1.096.014	0	0	100,00	100,00
9	4978.C88.005.102.A	Manajemen Konstruksi Rusun Politeknik Ilmu Pemasarakan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham	1	Paket	KOTA TANGERANG	Jasa Konsultasi	Seleksi	RPM	238.000	237.410	0	0	99,75	100,00
10	4978.C88.005.102.D	Wadai Rumah Susun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	BANTEN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	180.000	179.983	0	0	99,99	100,00
11	4978.C88.006	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.702.755	3.522.489	0	0	95,13	49,81
12	4978.C88.006.100.A	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun Yayasan Nailul Amanah Umat	1	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultasi	Swakelola	RPM	150.000	59.496	0	0	39,66	39,66
13	4978.C88.006.100.B	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun Ponges Riyadlus Shalihien	1	Pkt	KAB. SERANG	Jasa Konsultasi	Pengadaan Langsung	RPM	150.000	149.224	0	0	99,48	100,00
14	4978.C88.006.100.C	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun Yayasan Budi Mulia Tangbar	1	Pkt	KAB. TANGERANG	Jasa Konsultasi	Pengadaan Langsung	RPM	150.000	148.891	0	0	99,26	100,00
15	4978.C88.006.101.B	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Riyadlus Shalihien	1	Pkt	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	717.555	691.802	0	0	96,41	9,00
16	4978.C88.006.101.C	Pembangunan Rumah Susun Yayasan Budi Mulia Tangbar	1	Pkt	KAB. TANGERANG	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	1.842.000	1.842.000	0	0	100,00	46,60
17	4978.C88.006.102.B	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Riyadlus Shalihien	1	Paket	KAB. SERANG	Jasa Konsultasi	Repeat Order	RPM	61.650	59.889	0	0	97,14	9,00
18	4978.C88.006.102.C	Wadai Rumah Susun Ponges	1	Dokumen	KOTA SERANG	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	490.800	430.437	0	0	87,70	100,00
19	4978.C88.006.102.D	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Yayasan Budi Mulia Tangbar	1	Pkt	KAB. TANGERANG	Jasa Konsultasi	Repeat Order	RPM	140.750	140.750	0	0	100,00	46,60

Berdasarkan data tangkapan layar i-emon diatas, progress penyerapan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta untuk TA 2023 adalah 99,08% dari total anggaran 2023, sedangkan untuk Pembangunan di Pr

4.2.3.1 Pembangunan Rumah Susun Satker PnP Provinsi DKI Jakarta

NO	NAMA PAKET	JENIS KONTRAK SYC/MYC	PAGU 2023 (Ribu)	NILAI KONTRAK	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL SELESAI KONTRAK	REALISASI		
							KEU		FISIK
							(Ribu)	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Jakarta	MYC Lanjutan	12.854.887.144	16.140.200.000,00	09 Des 2022	31 Des 2023	11.531.361.504	90%	96,010
2	Pembangunan Rumah Susun TNI AU LANUD Halim Perdanakusuma	MYC Lanjutan	18.156.117.844	22.229.005.744,23	22 Des 2022	14 Okt 2023	19.024.984.948	100%	100

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET



INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[420163] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA						
Kasatker	Siti Briliani Putri, S.T., M.T., M.Sc.						
PPK	Nandaka Ekacarana, ST						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[CBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[005] Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi						
Komponen	[101] Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair						
Kode Paket	07.420163.IA.4978.CBB.005.101.A						
Nama Paket	Pembangunan Rusun Perguruan Tinggi						
Target Output Paket	1 Paket						
Provinsi	DKI JAKARTA						
Kabupaten	DKI JAKARTA						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Pembangunan						
Rencana Tanggal Mulai	12-12-2022						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 15.247.045.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	15.247.045.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 15.247.045.000 ,-						
Realisasi	Rp. 14.957.814.505 ,-						
Progres Keu	98,10 %						
Progres Fisik	98,10 %						



PELAKSANAAN PEKERJAAN MYC 2022 - 2023

PEMBANGUNAN **RUSUN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV. DKI JAKARTA



KOMPOSISI MYC

TA. 2022	TA. 2023
15%	85%

DATA UMUM

Alamat	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Grendus, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
Tower	: 1 Tower
Tipe	: Tipologi 24' / 3 Lantai
Unit	: 37 Unit
Koordinat	: Latitude -6.302278 Longitude 106.7685
Kontraktor	: PT. Bangun Atma Persada
	Tanggal Kontrak : 09 Desember 2022
	Nilai Kontrak : Rp. 15.123.396.640,38
	Add K1 - 1 : Rp. 15.123.396.640,38 (01 Februari 2023)
	Add K1 - 2 : Rp. 15.123.396.640,38 (14 Februari 2023)
	Add K1 - 3 : Rp. 15.123.396.640,38 (08 Maret 2023)
	Add K1 - 4 : Rp. 15.123.396.640,38 (02 Agustus 2023)
	Add K1 - 5 : Rp. 15.617.400.000,00 (07 September 2023)
	Add K1 - 6 : Rp. 16.140.200.000,00 (06 November 2023)
IKK	: PT. Adhikara Mitraseptia
	Tanggal Kontrak : 09 Desember 2022
	Nilai Kontrak : Rp. 979.275.300,-
	Add K1 - 1 : Rp. 979.275.300,- (13 Desember 2022)
	Add K1 - 2 : Rp. 1.001.691.750,- (12 Juni 2023)
	Add K1 - 3 : Rp. 999.826.542,- (12 September 2023)

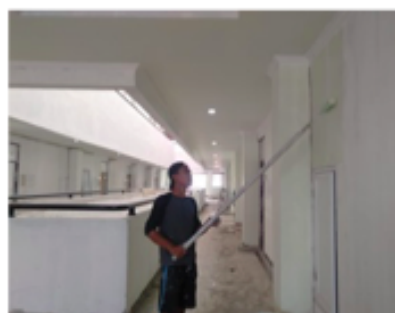
WAKTU PELAKSANAAN

Total Waktu	388 Hari Kalender
Waktu Berjalan	372 Hari Kalender
Sisa Waktu	16 Hari Kalender

PEKERJAAN SAAT INI

- Pekerjaan plafond dan kusen pintu jendela;
- Pekerjaan air bekas, air kotor, vent dan hujan;
- Pekerjaan instalasi elektrik;
- Pekerjaan keramik dinding dan Lantai KM/Toilet;
- Pekerjaan Lantai Homogeneous Tile;
- Pekerjaan Pasang Saniter;
- Pekerjaan GWT, Rumah Pompa, STP & R. Blower;
- Pekerjaan skimcoat exposed struktur;
- Pekerjaan pasangan batu DPT;
- Pekerjaan Instalasi pipa Shallow Well;
- Pekerjaan HT dan Railing Tangga;
- Pekerjaan PJU dan Lampu taman;
- Pekerjaan acrylic dan logo PUPR;
- Pekerjaan birdnett dan Pekerjaan Pengecatan;
- Pekerjaan pengadaan material.

98,052%	96,010%	-2,043%
Rencana	Realisasi	Deviasi



KOMPOSISI MYC

TA. 2022	TA. 2023
15%	85%

DATA UMUM

Alamat	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cendek, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
Tower	: 1 Tower
Tipe	: Tipologi 247 / 3 Lantai
Unit	: 37 Unit
Koordinat	: Latitude -6.332278 Longitude 106.7686
Kontraktor	: PT. Bangun Atma Pustaka
Tanggal Kontrak	: 09 Desember 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 15.123.396.640,38
Add Ke - 1	: Rp. 15.123.396.640,38 (03 Februari 2023)
Add Ke - 2	: Rp. 15.123.396.640,38 (24 Februari 2023)
Add Ke - 3	: Rp. 15.123.396.640,38 (06 Juni 2023)
Add Ke - 4	: Rp. 15.123.396.640,38 (03 Agustus 2023)
Add Ke - 5	: Rp. 15.617.400.000,00 (07 September 2023)
Add Ke - 6	: Rp. 16.140.200.000,00 (06 November 2023)
MC	: PT. Adhikara Mitraadita
Tanggal Kontrak	: 09 Desember 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 979.275.300,-
Add Ke - 1	: Rp. 979.275.300,- (15 Desember 2022)
Add Ke - 2	: Rp. 1.001.691.750,- (12 Juni 2023)
Add Ke - 3	: Rp. 999.826.542,- (12 September 2023)

WAKTU PELAKSANAAN




Total Waktu	388 Hari Kalender
Waktu Berjalan	372 Hari Kalender
Sisa Waktu	16 Hari Kalender

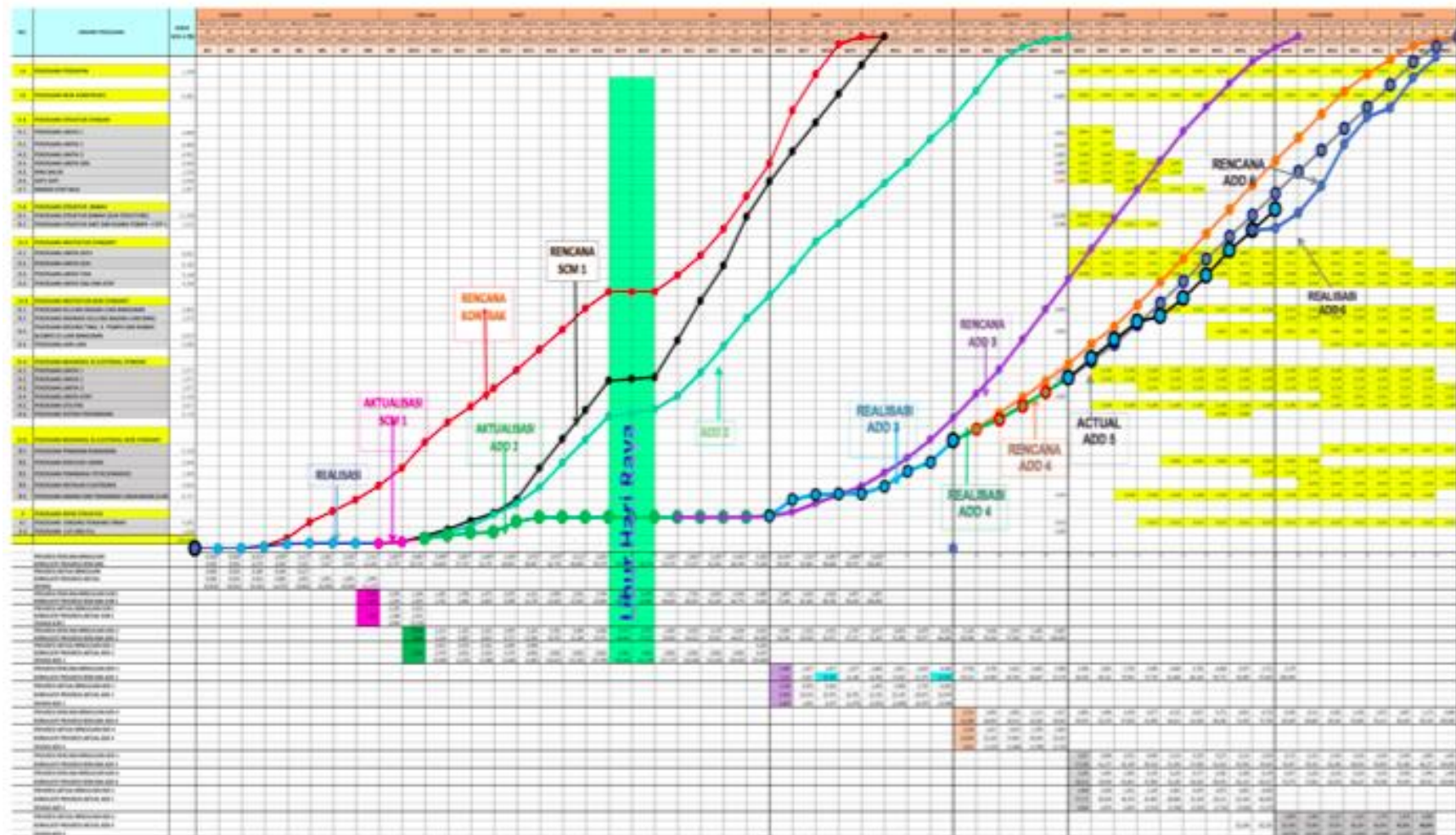
PERMASALAHAN

- Warga tidak mengizinkan pekerjaan lembur. Jam pekerjaan dibatasi sampai pukul 17.00 WIB. Jika, lebih dari jam 17.00 akan ada teguran keras.
- Tanggal Ubur Nasional tidak di izinkan untuk bekerja, terbatasnya jam kerja mempengaruhi proses langsir material dan pengiriman material;
- Mitra kerja main kontraktor (Subkon, vendor, supplier) tidak bisa maksimal berprogress day by day karena melihat langsung insiden penembakan dan intimidasi oknum.

TINDAK LANJUT

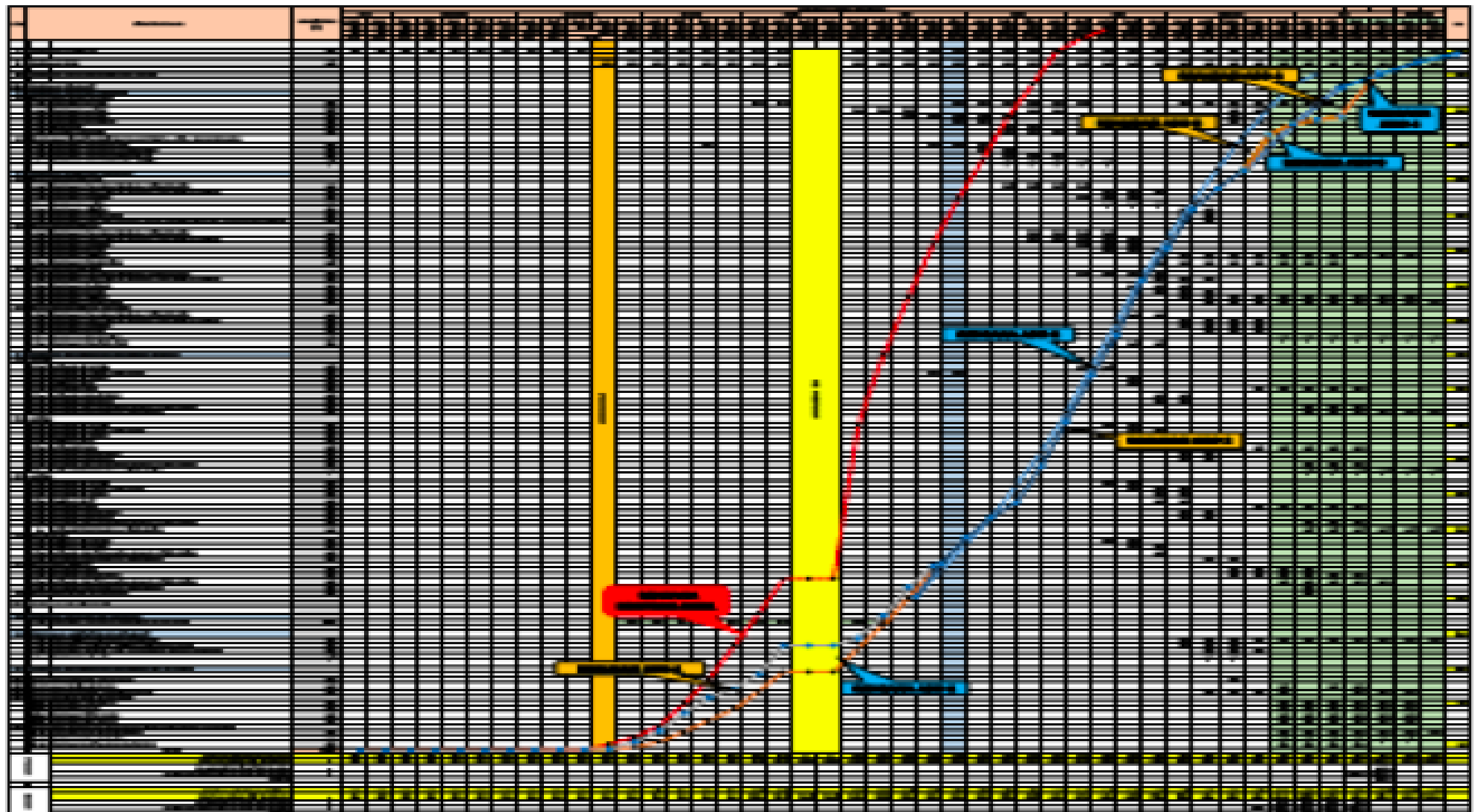
- Rencana Penambahan man power secara partial :
- Tenaga Kerja Keramik dari 21 orang menjadi 40 orang, Tenaga Kerja Kusen aluminium 6 orang menjadi 12 orang, Tenaga Kerja Plafond 14 orang menjadi 20 orang, Tenaga Kerja Saniter 5 orang menjadi 10 orang;
- Jadwal pengadaan material secara partial;
- Meminta keringanan ke warga agar pekerjaan yang tidak bisa dapat dikerjakan di hari libur nasional;

98,052%	96,010%	-2,043%
Rencana	Realisasi	Deviasi
		



KURVA S

Gambar 1. Kurva S (S-curve) untuk proyek pembangunan jalan





PELAKSANAAN PEKERJAAN SYC 2023

Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Rumah Susun Lanud Halim Perdanakusuma

SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV. DKI JAKARTA



DATA UMUM

Alamat	Jl. Dwikora Raya, Kel. Halim, Kec. Makasar, Jakarta Timur
Paket Pekerjaan	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Rumah Susun Lanud Halim Perdanakusuma
Koordinat	Latitude -6.247757 Longitude 106.893314
Kontraktor	CV. MULTI KARYA Tanggal Kontrak : 27 November 2023 Nilai Kontrak : Rp. 195.850.000,-

PEKERJAAN SAAT INI

- Pekerjaan Siar permukaan dinding Batu kali (DPT);
- Pekerjaan Acian Siar permukaan dinding batu kali (DPT);
- Pekerjaan Coating anti lumut;
- Urugan tanah Kembali;
- Penanaman rumput Gajah;
- Penanaman Pohon Pucuk Merah dan Ketapang Merah;
- Ceklist Pekerjaan.

PERMASALAHAN

- Jaga perawatan Tanaman (Rumput dan TPohon) agar tetap terpelihara dengan baik.

TINDAK LANJUT

- Kontrol dalam Masa Perawatan.

WAKTU PELAKSANAAN

Total Waktu	35 Hari Kalender
Waktu Berjalan	23 Hari Kalender
Sisa Waktu	12 Hari Kalender

86,83%	100%	0%
Rencana	Realisasi	Deviasi

PROGRES MINGGUAN																			
Nama Paket : Pekerjaan Dinding Pemasaran Tanah Rumah Suku Larut Halim Perdana Kusuma					MINGGU KE : 4 (JMFAT)														
Lokasi : Jl. Oelako Raya, Kel. Halim Perdana Kusuma, Kec. Melayur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13618					PERIODE : 17 DESEMBER 2023 S/D 19 DESEMBER 2023														
Kota/Kab : Kota Jakarta Timur																			
Provinsi : DKI Jakarta																			
No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Bobot	PROGRES CAPAIAN MINGGUAN									TIME SCHEDULE					
					8 D MINGGU LALU			MINGGU INI			8 D MINGGU MA			DESKRIPSI					
					VOL.	BOBOT	%	VOL.	BOBOT	%	VOL.	BOBOT	%	27-12	03-01	10-01	17-01	24-01	
														6	7	1	7	8	
														M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	
A PEKERJAAN TALUD																			
1	Pel. Pengukuran + Boreling	1,00	m	0,28	1,00	0,28	100%	-	-	0%	1,00	0,28	100%	0,14	0,14				
2	Pel. Galian Tanah	38,90	m3	2,35	38,90	2,35	100%	-	-	0%	38,90	2,35	100%	0,09	1,17	0,09			
3	Pel. Pas. Batu Kali	186,73	m3	59,63	186,73	59,63	100%	-	-	0%	186,73	59,63	100%		14,81	25,01	16,81		
4	Pel. Ser	129,00	m2	5,97	64,52	2,99	50%	64,52	2,99	50%	129,00	5,97	100%				5,97		
5	Pel. Peder Kapalan	39,22	m2	1,68	5,68	0,25	15%	33,54	1,44	85%	39,22	1,68	100%			0,84	0,84		
6	Pel. Asen Kapalan	39,22	m2	1,61	-	-	0%	39,22	1,61	100%	39,22	1,61	100%				0,71	0,71	
7	Pel. Coating Anti Lumut	186,25	m2	3,73	-	-	0%	186,25	3,73	100%	186,25	3,73	100%					3,73	
8	Pel. Urugan Tanah Kembali	38,90	m3	2,29	28,19	1,05	75%	9,73	0,95	25%	38,90	2,29	100%				1,10	1,10	
B PEKERJAAN TANAMAN																			
1	Pel. Bumpet Cegah	1.050,11	m2	16,37	726,06	11,46	70%	324,05	4,91	30%	1.050,11	16,37	100%			8,18	4,89	4,09	
2	Pel. Pohon Pucuk Merah	25,00	Btg	4,25	8,75	1,49	35%	16,25	2,76	65%	25,00	4,25	100%			1,42	1,42	1,42	
3	Pel. Pohon Ketapang Kencana	15,00	Btg	2,73	-	-	0%	15,00	2,73	100%	15,00	2,73	100%					2,73	
TOTAL					186,60	80,69		18,31			186,60			6,73	16,22	40,65	29,94	13,17	
					RENCANA PRESTASI 70% MINGGU									8	6,73	16,93	57,60	86,83	186,60
					REALISASI PRESTASI 70% MINGGU									-		25,17	53,60	19,91	
					REALISASI KOMPLETA 70% PRESTASI 70% MINGGU									8	6,35	25,91	80,69	186,60	
					DOKUMEN									-	6,38	8,94	23,29	Subtotal	

4.2.3.2 Pembangunan Rumah Susun Satker PnP Provinsi Banten

Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 68.554.495.000,-. Lokasi pembangunan rumah susun berada di 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yakni Pembangunan Rumah Susun Rumah Susun Kejati di Kota Serang, Pembangunan Rumah Susun Poltekip dan poltekim di Kota Tangerang, dengan total pembangunan 3 Tower Blok di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah disebutkan merupakan kegiatan Multi Years Contract 2022-2023. terdapat 3 tower merupakan pekerjaan Multi Years Contract 2022-2023 yakni Pembangunan Rumah Susun ASN Kejati 1 Tower dan Pembangunan Rumah Susun MBR Kedaung Baru 1 Tower dan Pembangunan Rumah Susun Poltek Imigrasi 1 Tower dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract 2022-2023 yang output nya akan dihitung pada tahun 2023.

A. Rumah Poltekip dan Poltekim di Kota Tangerang (MYC TA.2022 - 2023)



INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023														
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN														
Kasatker	Haryo Wacono, ST														
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT														
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni														
Output (KRO)	[CBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
Rincian Output (RO)	[005] Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi														
Komponen	[101] Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair														
Kode Paket	07.401662.IA.4978.CBB.005.101.A														
Nama Paket	Pembangunan Rusun Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham														
Target Output Paket	1 Paket														
Provinsi	BANTEN														
Kabupaten	KOTA TANGERANG														
Jenis Pengadaan	Penyedia														
Metode	Tender														
Kategori	Pekerjaan Konstruksi														
Kategori Kegiatan	Pembangunan														
Jenis Kontrak	MYC Lanjutan														
Rencana Tanggal Mulai	01-08-2022														
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023														
Pagu DIPA	Rp. 2.683.137.000 ,-														
Sumber Dana (Rp)	<table><tr><th>RM</th><th>RMP</th><th>PNBP</th><th>BLU</th><th>PLN</th><th>HLN</th><th>SBSN</th></tr><tr><td>2.683.137.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	2.683.137.000	0	0	0	0	0	0
RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN									
2.683.137.000	0	0	0	0	0	0									
Pagu Pengadaan	Rp. 4.538.878.000 ,-														
Realisasi	Rp. 2.683.137.000 ,-														
Progres Keu	100,00 %														
Progres Fisik	100,00 %														

B. Pembangunan Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang



INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN						
Kasatker	Haryo Wacono, ST						
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[RBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[004] Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja						
Komponen	[101] Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair						
Kode Paket	07.401662.IA.4978.RBB.004.101.A						
Nama Paket	Pembangunan Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang						
Target Output Paket	1 Paket						
Provinsi	BANTEN						
Kabupaten	KOTA TANGERANG						
Jenis Pengadaan	Penyedia						
Metode	Tender						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Pembangunan						
Jenis Kontrak	MYC Lanjutan						
Rencana Tanggal Mulai	15-08-2022						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 37.697.144.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	37.697.144.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 36.280.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 37.695.828.300 ,-						
Progres Keu	100,00 %						
Progres Fisik	100,00 %						

C. Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Banten



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DIPA	REALISASI	PERSENTASE
Penyediaan Akses Rumah Layak dan Aman				
Meningkatkannya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	157 Unit	157 Unit	100%

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN						
Kasatker	Haryo Wacono, ST						
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[RBB] Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[003] Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI						
Komponen	[101] Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair						
Kode Paket	07.401662.IA.4978.RBB.003.101.A						
Nama Paket	Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Banten						
Target Output Paket	1 Paket						
Provinsi	BANTEN						
Kabupaten	KOTA SERANG						
Jenis Pengadaan	Penyedia						
Metode	Tender						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Pembangunan						
Jenis Kontrak	MYC Lanjutan						
Rencana Tanggal Mulai	15-08-2022						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 15.682.570.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	15.682.570.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 13.799.660.000 ,-						
Realisasi	Rp. 15.682.569.700 ,-						
Progres Keu	100,00 %						
Progres Fisik	100,00 %						

4.2.4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara

Maksud dari pekerjaan Pemeliharaan dan Revitalisasi Rumah Susun adalah untuk mengembalikan keandalan suatu bangunan sehingga bangunan tersebut Kembali pada saat bangunan tersebut d bangun . Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat hunian yang layak. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Struktur Bangunan yang mengalami kerusakan (kalau ada);
3. Pekerjaan Utilitas Bangunan yang mengalami kerusakan;
4. Pekerjaan Arsitektur termasuk finishing.

Bentuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan dan Revitalisasi Rumah Susun dilakukan secara Kontraktual yang terdiri atas:

1. Identifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Rumah Susun
2. Koordinasi dan pengawasan ke lapangan
3. Pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi
4. Pelaporan pelaksanaan di lapangan
5. Peninjauan ke lapangan dalam rangka persiapan revitalisasi rumah susun
6. Melakukan koordinasi dan rapat Pembahasan secara berkala
7. Penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi

Satker PnP Banten

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
21	4978.CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	4	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					3.173.000	3.063.734		0	96,56	100,00
22	4978.CDB.004.101.A	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara	1	Tower	KAB. SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	200.000	199.432	0	0	99,72	100,00
23	4978.CDB.004.101.B	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang	1	Tower	KAB. PANDEGLANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	200.000	199.570	0	0	99,78	100,00
24	4978.CDB.004.101.C	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Mapolres Kota Serang	1	Tower	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	1.458.000	1.454.739	0	0	99,78	100,00
25	4978.CDB.004.101.D	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten	1	Tower	KOTA SERANG	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	736.000	735.584	0	0	99,94	100,00
26	4978.CDB.004.102.B	Wasdal Pemeliharaan Rumah Susun	1	Laporan	KAB. SERANG	AU	Swakelola	RPM	300.000	275.739	0	0	91,91	100,00
27	4978.CDB.004.102.C	Supervisi Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes	2	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	67.000	66.903	0	0	99,86	100,00
28	4978.CDB.004.102.D	Supervisi Pemeliharaan Rumah Susun Polri	2	Pkt	KOTA SERANG	Jasa Konsultansi	Swakelola	RPM	212.000	131.767	0	0	62,15	100,00

1. Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

A. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023														
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN														
Kasatker	Haryo Wacono, ST														
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT														
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni														
Output (KRO)	[CDB] OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
Rincian Output (RO)	[004] Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama														
Komponen	[101] Pemeliharaan Tower Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair														
Kode Paket	07.401662.IA.4978.CDB.004.101.A														
Nama Paket	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara														
Target Output Paket	1 Tower														
Provinsi	BANTEN														
Kabupaten	KAB. SERANG														
Jenis Pengadaan	Swakelola														
Metode	Swakelola														
Kategori	Pekerjaan Konstruksi														
Kategori Kegiatan	Peningkatan														
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023														
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023														
Pagu DIPA	Rp. 200.000.000 ,-														
Sumber Dana (Rp)	<table><tr><th>RM</th><th>RMP</th><th>PNBP</th><th>BLU</th><th>PLN</th><th>HLN</th><th>SBSN</th></tr><tr><td>200.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	200.000.000	0	0	0	0	0	0
RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN									
200.000.000	0	0	0	0	0	0									
Pagu Pengadaan	Rp. 275.000.000 ,-														
Realisasi	Rp. 199.432.200 ,-														
Progres Keu	99,72 %														
Progres Fisik	100,00 %														

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

>

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya				200.000.000	199.432.200	99,72
	1. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara	1	PKT	200.000.000	200.000.000		
TOTAL					200.000.000	199.432.200	99,72

B. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN							
Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN						
Kasatker	Haryo Wacono, ST						
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[CDB] OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[004] Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama						
Komponen	[101] Pemeliharaan Tower Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair						
Kode Paket	07.401662.IA.4978.CDB.004.101.B						
Nama Paket	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang						
Target Output Paket	1 Tower						
Provinsi	BANTEN						
Kabupaten	KAB. PANDEGLANG						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Peningkatan						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 200.000.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	200.000.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 211.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 199.569.700 ,-						
Progres Keu	99,78 %						
Progres Fisik	100,00 %						

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET							
Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya				200.000.000	199.569.700	99,78
	1. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang	1	PKT	200.000.000	200.000.000		
TOTAL					200.000.000	199.569.700	99,78

C. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023														
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN														
Kasatker	Haryo Wacono, ST														
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT														
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni														
Output (KRO)	[CDB] OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
Rincian Output (RO)	[004] Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama														
Komponen	[101] Pemeliharaan Tower Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair														
Kode Paket	07.401662.IA.4978.CDB.004.101.C														
Nama Paket	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Mapolres Kota Serang														
Target Output Paket	1 Tower														
Provinsi	BANTEN														
Kabupaten	KOTA SERANG														
Jenis Pengadaan	Swakelola														
Metode	Swakelola														
Kategori	Pekerjaan Konstruksi														
Kategori Kegiatan	Peningkatan														
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023														
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023														
Pagu DIPA	Rp. 1.458.000.000 ,-														
Sumber Dana (Rp)	<table><tr><th>RM</th><th>RMP</th><th>PNBP</th><th>BLU</th><th>PLN</th><th>HLN</th><th>SBSN</th></tr><tr><td>1.458.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	1.458.000.000	0	0	0	0	0	0
RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN									
1.458.000.000	0	0	0	0	0	0									
Pagu Pengadaan	Rp. 1.458.000.000 ,-														
Realisasi	Rp. 1.454.739.000 ,-														
Progres Keu	99,78 %														
Progres Fisik	100,00 %														

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya				1.458.000.000	1.454.739.000	99,78
	1. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Mapolres Kota Serang	1	PKT	1.458.000.000	1.458.000.000		
TOTAL					1.458.000.000	1.454.739.000	99,78

D. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN							
Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[401662] PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN						
Kasatker	Haryo Wacono, ST						
PPK	Muhammad Sahwidin Ridho, ST.,MT						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[CDB] OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
Rincian Output (RO)	[004] Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama						
Komponen	[101] Pemeliharaan Tower Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair						
Kode Paket	07.401662.IA.4978.CDB.004.101.D						
Nama Paket	Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten						
Target Output Paket	1 Tower						
Provinsi	BANTEN						
Kabupaten	KOTA SERANG						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Pekerjaan Konstruksi						
Kategori Kegiatan	Peningkatan						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 736.000.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	736.000.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 736.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 735.584.000 ,-						
Progres Keu	99,94 %						
Progres Fisik	100,00 %						

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET								
Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya				736.000.000	735.584.000	99,94	
	1. Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten	1	PKT	736.000.000	736.000.000			
TOTAL					736.000.000	735.584.000	99,94	

Gambar Revitalisasi Rumah Susun SAMAPTA Polda Banten



Gambar Revitalisasi Rumah Susun Mapolres Kota Serang



Gambar Revitalisasi Rumah Susun Ponpes Shohibul Barokah



Gamber Revitalisasi Rumah Susun Ponpes An-Nawawi Tanara



Untuk Kegiatan Revitalisasi Rumah Susun yang di laksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten pada Tahun 2023 sebanyak 4 Tower Unit dan 3 Tower tersebut telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala, revitalisasi Rumah Susun yang dimaksud yakni Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara , Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Sohibul Barokah Pandeglang, Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Mapolres Kota Serang dan Pemeliharaan Rumah Susun Ponpes Samapta Polda Banten. Adapun Rumah Susun tersebut dilakukan revitalisasi dikarenakan Rumah Susun tersebut mengalami kerusakan baik Mekanikal Elektrikal maupun Arsitektur. Kedua Pekerjaan Revitalisasi tersebut bersifat pemeliharaan komponen di beberapa bangunan saja yang mengalami kerusakan ringan sehingga pemeliharannya dikategorikan Revit Ringan sehingga tidak menambah nilai asset yang direvitalisasi. Kegiatan Revitalisasi Rumah Susun yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.173.000.000,-. Capaian realisasi fisik Revitalisasi Rumah Susun pada tahun 2023 adalah 100 % dari target yang ditetapkan yaitu 100% serta Realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.063.734.000 atau 96,56 %.

4.2.4 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU

Pembangunan layanan Bantuan PSU untuk Rumah MBR pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari satu paket di Provinsi Banten dengan volume 2.836 unit dengan mekanisme SYC. Berikut merupakan capaian progress berdasarkan penyerapan anggaran i-emon:

Satker Balai P2P Jawa I

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
13	4978.ABF.015.104.B	Perencanaan Pengelolaan WAK	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.636.089	2.635.997	0	0	100,00	100,00
14	4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					110.000	109.775		0	99,80	100,00
15	4978.ABF.016.104.B	Monitoring	1	Laporan	DKI JAKARTA	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	110.000	109.775	0	0	99,80	100,00
16	4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komerisial	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					905.200	905.098		0	99,99	100,00
17	4978.ABF.021.101.A	Verifikasi dan Pendataan	1	Dokumen	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	905.200	905.098	0	0	99,99	100,00

Satker PnP Banten

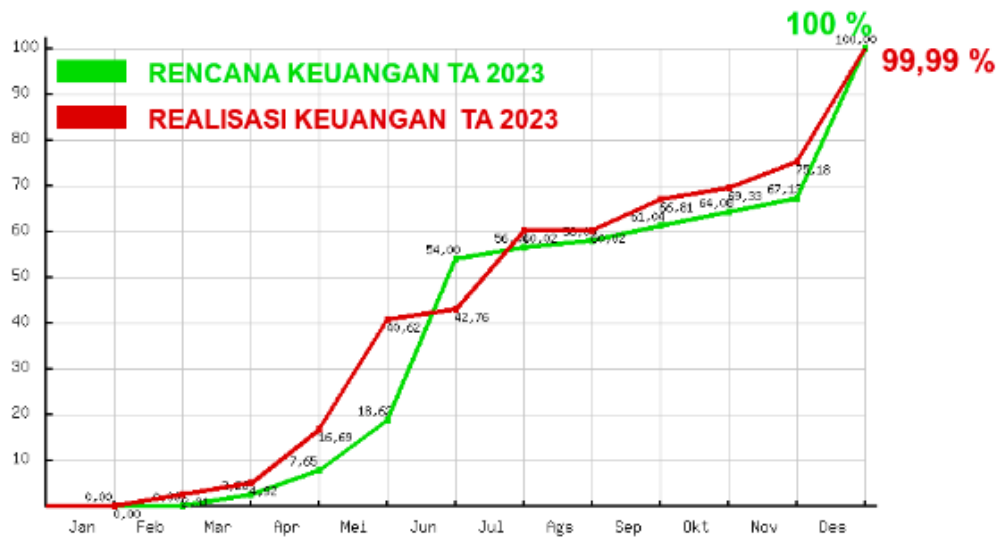
No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
6	4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	1100	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					17.430.000	0		0	0,00	0,00
7	4978.RBB.001.100.A	Penyusunan DED dan Supervisi PSU Perumahan Bagi MBR	1	Dokumen	KOTA SERANG	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	440.000	0	0	0	0,00	0,00
8	4978.RBB.001.100.B	Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR	1100	Unit	BANTEN	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	7.700.000	0	0	0	0,00	0,00
9	4978.RBB.001.101.A	Penyusunan DED Bantuan Jalan Akses	1	Dokumen	BANTEN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	100.000	0	0	0	0,00	0,00
10	4978.RBB.001.101.B	Pembangunan PSU Jalan Akses	1	Paket	BANTEN	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	8.000.000	0	0	0	0,00	0,00
11	4978.RBB.001.101.C	Supervisi Bantuan Jalan Akses	1	Paket	BANTEN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	400.000	0	0	0	0,00	0,00
12	4978.RBB.001.102.A	Pengawasan Pembangunan Bantuan PSU Perumahan MBR dan Jalan Akses/Jalan Penghubung Antar Perumahan.	1	Dokumen	BANTEN	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	790.000	0	0	0	0,00	0,00

4.2.5 Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial

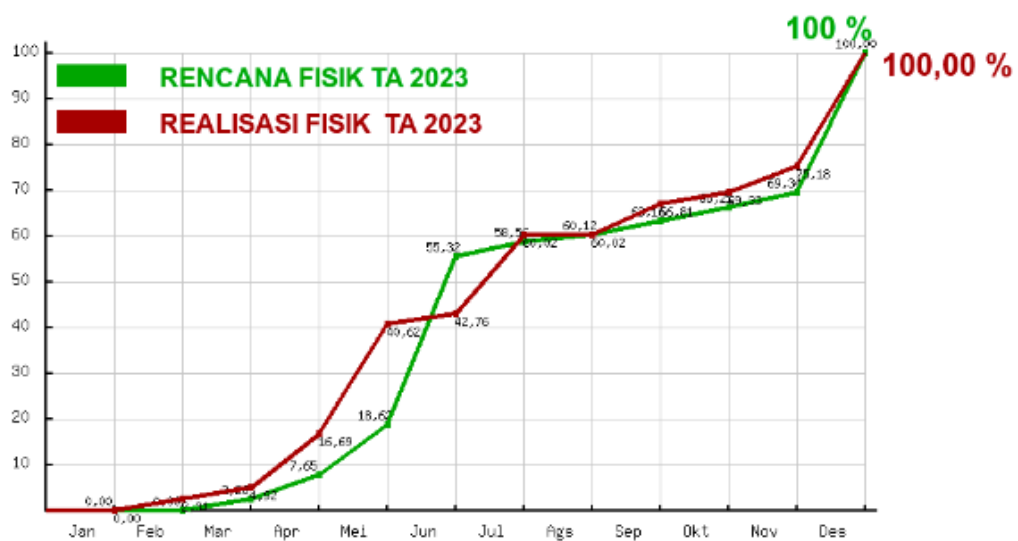
4.2.5.1 Satker Balai P2P Jawa I

INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				15.255.000	15.254.685	100,00
	1. Keperluan sehari-hari	1	LS	15.255.000		15.255.000	
521211	Belanja Bahan				9.990.000	9.990.000	100,00
	1. Seminar Kit	1	LS	9.990.000		9.990.000	
522141	Belanja Sewa				22.627.000	22.627.000	100,00
	1. Sewa Kendaraan Dinas	1	LS	22.627.000		22.627.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				437.103.000	437.000.871	99,98
	1. Tiket Pesawat	1	LS	10.105.000		10.105.000	
	2. Uang Harian	1	LS	37.480.000		37.480.000	
	3. Transportasi	1	LS	11.572.000		11.572.000	
	4. Uang Hotel	1	LS	26.162.000		26.162.000	
	5. Perjalanan Dinas Biasa	1	LS	351.784.000		351.784.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				106.500.000	106.500.000	100,00
	1. Uang Harian dan Transport	1	LS	42.000.000		42.000.000	
	2. Paket Meeting Dalam Kota DKI Jakarta	1	LS	64.500.000		64.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				313.725.000	313.725.000	100,00
	1. Paket Meeting Luar Kota, Honor dan Transport	1	LS	313.725.000		313.725.000	
TOTAL					905.200.000	905.097.556	99,99



Renc. e-Mon	0,00	0,00	2,26	7,65	18,62	54,00	56,44	58,00	61,04	64,08	67,13	100,00
Real. Keu	0,00	2,31	4,92	16,69	40,62	42,76	60,02	60,02	66,81	69,33	75,18	99,99



Renc. eMon	0,00	0,00	2,26	7,65	18,62	55,32	58,56	60,12	63,16	66,21	69,34	100,00
Real. Fis	0,00	2,31	4,92	16,69	40,62	42,76	60,02	60,02	66,81	69,33	75,18	100,00

A. Rapat penjaringan usulan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Provinsi Banten TA. 2024

Waktu & Tempat Kegiatan	:	21 September 2023 / Hotel Horison Ciledug Tangerang
Daftar Undangan	:	Rapat dibuka oleh Kasubdit Wilayah II, Direktorat Rumah Umum dan Komersial sebagai perwakilan Direktur RUK, serta dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Perwakilan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Perwakilan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Perwakilan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, Dinas Bidang Perumahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, Pemerhati Bidang Perumahan (Ir. Ade Armansjah, MSIP), Asosiasi dan Developer di Provinsi Banten.
Maksud	:	Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan kebijakan dan peraturan terkait Bantuan PSU untuk Perumahan Umum sesuai Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
Tujuan	:	Tujuan pelaksanaan kegiatan Penjaringan Usulan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Banten TA. 2024 adalah: 1. Meningkatkan pemahaman terkait Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 2. Menjaring usulan Bantuan PSU TA 2024 oleh Pengembang dan didampingi oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Banten secara efektif dan efisien.

VIII. DESK VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS BANTUAN PSU TA. 2024

NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT USULAN	VALIDASI/ KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	Kab. Pandeglang	RIKA RESIDENCE 3	PT. AURA DARMA PERSADA	280	75	Perbaikan: a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeli Adalah MBR f. Sertifikat Atas Tanah lengkap g. Brosur Penjualan Rumah MBR h. Daftar Tahunan Akad Kredit
2.	Kab. Pandeglang	RIKA RESIDENCE 5	PT. AURA DARMA PERSADA	105	50	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeli Adalah MBR f. Sertifikat Atas Tanah lengkap g. Brosur Penjualan Rumah MBR h. Daftar Tahunan Akad Kredit

NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT USULAN	VALIDASI/ KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
3.	Kab. Pandeglang	ARIOS NIMS CICADAS	PT. NIMS MUTIARA INDONESIA	261	180	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeli Adalah MBR e. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU f. Brosur Penjualan Rumah MBR g. Daftar Tahunan Akad Kredit h. SBU
4.	Kota Serang	TAMAN BARU KEMERANGGEN	PT. CANTIKA SARANA CIPTA	974	200	a. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU
5.	Kota Cilegon	ELOK RESIDENCE	PT. GLOBAL BANTEN PROPERTI	305	135	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeli Adalah MBR f. SBU

NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT USULAN	VALIDASI/ KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
6.	Kab. Pandeglang	GRAND AFTA	PT. SOPO SABA SINAMO	140	70	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeii Adalah MBR f. Akta Pendirian Perusahaan g. Sertifikat Atas Tanah lengkap h. Brosur Penjualan Rumah MBR i. Daftar Tahunan Akad Kredit j. SBU
7.	Kab. Serang	GRAHA SUKASARI PERMAI	PT. GRAHA MUTIARA BERKAH	115	58	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeii Adalah MBR f. Sertifikat Atas Tanah lengkap g. Rencana Tapak Perumahan h. Brosur Penjualan Rumah MBR i. Daftar Tahunan Akad Kredit j. NIB k. SBU

NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT USULAN	VALIDASI/ KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
8.	Kab. Lebak	GRAHA PASIR ONA	PT. PRIMA GRAHAWIDIYA ADICIPTA	191	96	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeii Adalah MBR f. Sertifikat Atas Tanah lengkap g. PBG h. Brosur Penjualan Rumah MBR i. Daftar Tahunan Akad Kredit j. SBU
9.	Kab. Serang	GRAND CITERAS	PT. MIZECA PEMBANGUNAN	943	100	a. Surat usulan Pengembang b. Surat Pernyataan Membangun Rumah Umum c. Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna PSU d. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU e. Surat Pernyataan Bahwa Calon Pembeii Adalah MBR f. Brosur Penjualan Rumah MBR g. Daftar Tahunan Akad Kredit
10.	Kab. Tangerang	ROYAL RAJEG RESIDENCE	PT. JAYA PROTINDO	1086	223	a. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU
11.	Kab. Tangerang	GRIYA SUTERA BALARAJA	PT. INDAH CEMANI RAYA	2357	500	a. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU

NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT USULAN	VALIDASI/ KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
12.	Kab. Serang	MULIA GADING KENCANA	PT. INFINITI TRINITI JAYA	1541	770	a. Surat Pernyataan Pemerintah Kab/Kota /Provinsi Menerima Aset PSU b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya c. SBU d. Brosur Penjualan Rumah MBR e. Daftar Tahunan Akad Kredit
TOTAL					2.456	
PAGU BANTEN					1.100	

Dari 16 Pengembang Perumahan yang hadir, 12 Pengembang mengusulkan bantuan PSU berupa jalan lingkungan perumahan dengan jumlah keseluruhan usulan 2.456 unit. 8 Pengembang sudah melakukan input dokumen pada aplikasi SIBARU sedangkan sisanya 4 Pengembang baru melakukan verifikasi administrasi pada sesi desk 2. Meskipun target bantuan PSU Provinsi Banten TA 2024 adalah sebesar 1.100 unit, tidak menutup kemungkinan bagi pengembang untuk mengajukan usulan sebanyakbanyaknya sesuai persyaratan yang berlaku. 3. Diharapkan pengembang melengkapi atau memperbaiki dokumen yang belum lengkap secepatnya dan menginput dalam aplikasi SIBARU agar segera dapat dilakukan verifikasi teknis. 4. Jika terdapat kesulitan dalam menginput dokumen atau ingin berkonsultasi mengenai bantuan PSU, dapat menghubungi kontak yang telah diberikan atau datang langsung ke kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I di Jalan Wisma Karya no. 59 Jakarta Selatan, untuk diarahkan pada Klinik Perumahan.

**DOKUMENTASI RAPAT PENJARINGAN USULAN BANTUAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
PROVINSI BANTEN TA. 2024**

	
<p>Laporan Kegiatan oleh Kepala BP2P Jawa I</p>	<p>Pemateri Rapat Penjaringan PSU TA. 2024</p>
	
<p>Sesi Tanya Jawab</p>	<p>Peserta Rapat Penjaringan PSU TA. 2024</p>
	
<p>Sesi Desk Verifikasi Administrasi dan Input Usulan melalui SIBARU</p>	<p>Foto Bersama</p>

B. Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Teknis Usulan Bantuan Pembangunan PSU Banten Tahap I TA. 2024



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I**

Jl. Wijaya I No. 59, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170

NOTA DINAS

Nomor: 416/ND/BP2PJ-I/X/2023

Yth. : Direktur Rumah Umum dan Komersial
Dari : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
Hal : Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Teknis Usulan Bantuan
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Provinsi Banten Tahap 1 TA. 2024
Tanggal : 30 Oktober 2023

Sehubungan dengan Usulan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Provinsi Banten TA 20 2024, telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan teknis oleh tim dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 13 (tiga belas) usulan bantuan Pembangunan PSU Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis.
2. Dari verifikasi yang telah dilakukan sebanyak:
 - a. 0 lokasi perumahan memenuhi persyaratan;
 - b. 8 lokasi perumahan potensial (memerlukan pembahasan lebih lanjut);
 - c. 5 lokasi perumahan tidak memenuhi persyaratan.
3. Terlampir tabel pembahasan hasil verifikasi di Provinsi Banten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Jawa I



Firsta, S.T., MUDD.
NIP. 19710603 199903 1 002

Tabel Hasil Verifikasi Provinsi Banten TA. 2024

NO	PERUMAHAN	PENGEMBANG	ADMINISTRASI						USULAN (UNIT)	DAYA TAMPUNG HASIL VERTEK	RUMAH TERBANGUN (UNIT)	PERNAH MENDAPAT BANTUAN PSU	BESARAN BANTUAN (UNIT)	KET.
			Surat Usulan	Surat Pernyataan Pengembang	Surat Pernyataan Pemda	IMB/PSG	SITEPLAN	SERT. TANAH						
KABUPATEN TANGERANG														
1	ROYAL RAJEG RESIDENCE	PT. JAYA PROTINDO	✓	✓	*	*	✓	✓	223	1.086	64	YA	305	Surat Pernyataan Pemda masih usulan TA 2023 dan belum bermaterai, IMB/PSG Belum sesuai unit yang diusulkan
2	DE GREEN BALARAJA	PT. MAKMUR HUNIAN LESTARI	*	*	*	✓	✓	✓	189	189	42	TIDAK	-	Tidak dapat menunjukkan surat usulan dan pernyataan asli di lokasi vertek
3	GRIYA SUTERA BALARAJA	PT. INDAH CEMANI RAYA	✓	✓	*	✓	✓	*	500	2.357	0	YA	862	Surat Pernyataan Pemda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan
KOTA CILEGON														
1	ELOK RESIDENCE	PT. GLOBAL BANTEN PROPERTI	*	*	*	✓	✓	*	305	254	64	TIDAK	-	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Pemda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan
KABUPATEN LEBAK														
1	GRIYA SAMPAY PERMAI	PT. DWM BERKAH MANDIRI	*	*	*	✓	✓	*	81	130	61	TIDAK	-	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Pemda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan
2	ROYAL GREEN LAND TAHAP 2	PT. ROYAL SAKTI MANDIRI	✓	✓	*	✓	✓	*	300	624	65	TIDAK	-	Surat Pernyataan Pemda masih dalam proses, sertifikat dalam proses

KABUPATEN PANDEGLANG														
1	RKA RESIDENCE 3	PT. AURA DARMA PERSADA	*	*	*	✓	✓	*	75	207	46	TIDAK	-	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Penda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan
2	RKA RESIDENCE 5	PT. AURA DARMA PERSADA	*	*	*	✓	✓	*	50	99	1	TIDAK	-	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Penda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan (AJB)
3	ARIG NIMS CICALAS	PT. NIMS MUTIARA INDONESIA	*	*	*	✓	✓	✓	180	252	0	TIDAK	-	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Penda masih dalam proses
4	TAMAN ASRI BAHAGIA	PT. HAMPARAN KEBAHAGIAAN SEJATI	*	*	*	✓	*	✓	65	248	54	YA	70	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Penda masih dalam proses, tahapan berupa rekomendasi tahapan dan Dinas PU dan Penataan Ruang Pandeglang
KABUPATEN SERANG														
1	SENOPATI ESTATE CIJUNG	PT. LINTAS WASTUGRAHA	✓	✓	*	*	✓	✓	250	3.550	259	TIDAK	-	Surat Pernyataan Penda masih dalam proses, IMB-PDG belum sesuai unit yang diusulkan, sertifikat belum sesuai surat pernyataan
2	SENOPATI ESTATE CIKANDE	PT. LINGKUNGAN RAYA LESTARI	✓	✓	*	*	*	*	200	2.837	427	TIDAK	-	Surat Pernyataan Penda masih dalam proses, IMB-PDG belum sesuai unit yang diusulkan, sertifikat belum sesuai surat pernyataan, tahapan proses sesuai dinas terkait
3	CIJUNG INDAH RESIDENCE	PT. VTRI BANGUN DUKUH LESTARI	*	*	*	✓	✓	*	200	989	7	YA	71	Surat Usulan dan Pernyataan perlu perbaikan, surat Pernyataan Penda masih dalam proses, sertifikat belum sesuai surat pernyataan

Lokasi Usulan Bantuan PSU

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Status 30 Oktober 2023



NO.	KAB/KOTA	NAMA PERUMAHAN	PENGEMBANG	DATA TAMPUNG	UNIT USULAN
1.	KAB. PANDEGLANG	RIKA RESIDENCE 3	PT. AURA DARMA PERSADA	280	75
2.	KAB. PANDEGLANG	RIKA RESIDENCE 3	PT. AURA DARMA PERSADA	109	50
3.	KAB. PANDEGLANG	ARIS NIMS CICADAS	PT. NIMS MUTIARA INDONESIA	261	180
4.	KAB. PANDEGLANG	TAMANI ASRI BAHADIA	PT. HAMPARAN KEBAHAGIAAN SEJATI	248	63
5.	KOTA CILEGON	ELOK RESIDENCE	PT. GLOBAL BANTEN PROPERTI	305	305
6.	KAB. TANGSERANG	ROYAL RAJES RESIDENCE	PT. JAYA PROINDO	1066	223
7.	KAB. TANGSERANG	GRYA SUTERA BALARAJA	PT. INDAH CEMAH RAYA	2357	300
8.	KAB. TANGSERANG	DR. GREEN BALARAJA	PT. MAEMUR HUMAN LESTARI	196	189
9.	KAB. SERANG	SEHOPAT ESTATE CILJUNG	PT. LINTAS WASTUGRAHA	1430	250
10.	KAB. SERANG	SEHOPAT ESTATE CIKANDU	PT. LINGKUNGAN RAYA LESTARI	2843	200
11.	KAB. SERANG	CIJUNG INDAH RESIDENCE	PT. VRI BANGUN CUKUH LESTARI	989	200
12.	KAB. LEBES	GRYA SAMPAI PERMAI	PT. DWI BERKAH MANDIRI	110	41
13.	KAB. LEBES	ROYAL GREEN LAND	PT. ROYAL SAKTI MANDIRI	624	200
14.	KAB. SERANG	MULIA GADING KENCANA	PT. INFINTI BERKAS JAYA	1541	270
15.	KAB. SERANG	AKILA TRI JAYA	PT. AKILA TRI JAYA	184	70
16.	KOTA SERANG	TAMAN BARI KEMERANGGEN	PT. CANDICA SARANA Cipta	974	200
17.	KOTA SERANG	BUMI LIPATK LESTARI	PT. DWI GRYA SEJAHTERA	1261	200
18.	KOTA SERANG	TAMAN MUTIARA INDAH 2	PT. MUTIARA INDAH PERMAKA	2000	200
19.	KOTA SERANG	TANTAKAN HILLS VIEW	PT. DWI GRYA SEJAHTERA	1000	200
20.	KAB. PANDEGLANG	GRAND AITA	PT. SOFO SABA SHAMU	140	70
21.	KAB. SERANG	GRAND CITRUS	PT. KIDEKA PEMBANGUNAN	943	100
22.	KAB. SERANG	GRAHA SUKLABI PERMAI	PT. GRAHA MUTIARA BERKAH	115	58
23.	KAB. LEBES	GRAHA PAJOK DUA	PT. PRIMA GRAHAMIDIYA ADICIPA	191	96
24.	KAB. LEBES	RIVERA VILLAGE	PT. KAFI PUTRA PRASAMA	300	300
TOTAL					5.141
PASU BANTEN					1.255

2. Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Teknis Usulan Bantuan Pembangunan PSU Banten Tahap II TA. 2024

 **KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I
Jl. Wijaya I No. 55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12178

NOTA DINAS
Nomor: 434/ND/DP2P/J-JWI/2023

Yth. : Direktur Rumah Urus dan Komersial
Dari : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
Hal : Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Teknis Usulan Bantuan Pembangunan Prosemana, Sarana, dan Utilitas Provinsi Banten Tahap 2 TA. 2024
Tanggal : 08 November 2023

Selubungan dengan Usulan Bantuan Pembangunan Prosemana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Provinsi Banten Tahap 2 TA. 2024, telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan teknis oleh tim dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. Berdasarkan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) usulan bantuan Pembangunan PSU Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis.
2. Dari verifikasi yang telah dilakukan sebanyak:
 - a. 0 lokasi perumahan memenuhi persyaratan;
 - b. 6 lokasi perumahan potensial (memerlukan pembahasan lebih lanjut);
 - c. 2 lokasi perumahan tidak memenuhi persyaratan.
3. Terdapat tabel pembahasan hasil verifikasi di Provinsi Banten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Jawa I
Firda S. I. MUCI
NP: 19910903 199003 1 002

Tersisaan Yth.:
1. Kepala Subdirektorat Penencanaan Teknis, Direktorat RJUK.
2. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat RJUK.

Tabel Hasil Verifikasi Provinsi Banten TA. 2024

NO	PERUBAHAN	PENGEMBANG	ADMINISTRASI						Jumlah (RPT)	DATA TAMBAHAN BAKS (RPT/TA)	POMBAI TERBARUKAN (RPT)	PERUBAHAN BAKS (RPT/TA) P12	SELISIR BAKS (RPT)	KAT.
			Survei (RPT)	Isiut Penguatan Pengembang	Isiut Penguatan Pemda	REKREASI	DIKURAN	DIKURAN						
KABUPATEN SERANG														
1	ISIRI-CHORO KENDARA	PT. KIRIWI TRIMILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	100	0	TIDAK	0	Adaptasi (RPT)
2	ISIRI KENDARA	PT. KIRIWI TRIMILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100	10	TIDAK	0	Tidak ada (RPT)
KOTA SERANG														
1	TAMBAH SUPPLAI BAKS	PT. KIRIWI TRIMILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	100	10	TIDAK	0	Isiut Penguatan Penguatan (RPT)
2	POMBAI TERBARUKAN	PT. KIRIWI TRIMILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	100	10	YB	10	Tidak ada (RPT)
3	TAMBAH BAKS KENDARA	PT. KIRIWI TRIMILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100	10	YB	10	Isiut Penguatan

4	BUR LINTON ESTATE	PT. JON ORINA DELAWARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200	1004	50	NA	100	Revised layout
5	THE SACON HILL ESTATE	PT. JON ORINA DELAWARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150	404	100	REUSE	0	Revised layout
SUBTOTAL TOTAL														
7	BRUCE VILLAGE	PT. BARCO FUTURA PRATARA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300	300	20	NA	00	Use area annexed already for use

4.2.5.2 Satker PnP Provinsi Banten

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DIPA	REALISASI	PERSENTASE
Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman				
Meningkatkannya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.640 Unit	3.324 Unit	99,52%

1. Penyusunan DED PSU Perumahan bagi MBR

Untuk memenuhi hak masyarakat memiliki rumah umum yang layak dan didukung dengan PSU yang memadai, maka Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten memiliki Program Pembangunan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum. Dalam pelaksanaan Pembangunan Bantuan PSU Perumahan Umum dibutuhkan perencanaan dan DED PSU yang digunakan sebagai pedoman standar dan spesifikasi PSU yang diberikan ke penerima bantuan, agar memudahkan dan melancarkan pelaksanaan konstruksinya. Perencanaan dan DED PSU tersebut dilakukan melalui survey lapangan dan pengukuran ke lokasi, serta harus disesuaikan menurut lokasi yang akan dibangun karena memiliki kondisi lapangan yang berbeda – beda. Oleh karena itu, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten menyusun kegiatan pelaksanaan pembangunan PSU.

Tabel Rincian Kegiatan DED PSU Perumahan MBR

No	Rincian Kegiatan	Output (Hasil)	Outcome
1	Rapat Koordinasi	~ Penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan DED ~ Evaluasi hasil DED	Pelaksanaan lebih terencana dan lebih mudah mengambil keputusan/ kebijakan jika ada permasalahan

			DED
2	Survey Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Jumlah rumah terbangun sesuai dengan nota dinas ~ Jumlah ruas, Panjang jalan, lebar jalan ~ Penyiapan badan jalan ~ Jenis perkerasan jala 	<p>Kesesuaian data verifikasi dan nota dinas,</p> <p>untuk penyusunan DED dan EE/HPS pada 51 lokasi</p>
3	Penyusunan DED dan EE/HPS	Dokumen DED, EE yang telah disahkan	<p>Pelaksanaan pekerjaan fisik pada 7 lokasi lebih terencana dan sesuai dengan spesifikasi teknis</p>

Gambar Kegiatan DED Pembangunan PSU



A. Pelaksanaan Pembangunan PSU

Program pelaksanaan kegiatan pembangunan dan fasilitasi Bantuan PSU merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten. Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Umum, yang diberikan secara stimulan kepada pekalu pembangunan yang memenuhi komponen PSU bagi perumahan umum berupa rumah deret dan rumah tunggal yang dibangun oleh pelaku pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Rumah Umum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan pembangunannya oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten.

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai upaya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Umum TA di Wilayah Provinsi Banten. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk mewujudkan ketersediaan PSU Perumahan Umum TA 2023 yang sesuai kriteria dan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya PSU Rumah Umum yang layak dan kualitas yang baik bagi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada TA 2023.

Pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan usulan dari pelaku pembangunan yang mengajukan permohonan pelaksanaan pembangunan fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Umum TA 2023 kepada Direktorat Jenderal Perumahan melalui Aplikasi SIBARU, selanjutnya verifikasi dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, dan penetapan lokasi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan.

No	Rincian Kegiatan	Output (Hasil)	Outcome
1	Penandatanganan Kontrak	Dokumen Kontrak	Data yang lengkap dan pelaksanaan pembangunan PSU lebih terencana pada 7 lokasi penerima bantuan PSU di Provinsi Banten
2	Pelaksanaan PCM dan MCO	Laporan hasil PCM, BA Hasil Pemeriksaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Kesepakatan MCO, Laporan MCO	Pelaku pembangunan memahami tentang pelaksanaan pekerjaan fisik yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi teknis untuk 7 lokasi penerima bantuan PSU di Provinsi Banten
3	Pelaksanaan pekerjaan fisik	Terlaksananya fasilitas bantuan PSU rumah umum	Mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau yang didukung oleh PSU yang memadai, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
4	Pelaksanaan PHO dan FHO	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Checklist Kelengkapan Berkas PHO yang telah ditandatangani	Pelaksanaan bantuan PSU pada 7 lokasi perumahan umum sesuai standar

Gambar Kegiatan Pengecoran PSU



Gambar Kegiatan Curring PSU



Gambar Udara Hasil Pembangunan PSU Perumahan MBR Provinsi Banten



c. Pengawasan Pembangunan PSU

Bantuan PSU ini merupakan Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah deret dan rumah tunggal yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum TA 2023 pada Satuan Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan kegiatan pengawasan pembangunan sebagai kendali terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum.

Gambar 4.23. Kegiatan Wasdal Pembangunan PSU



Tabel Capaian Indikator Kinerja Rumah MBR yang yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DIPA	REALISASI	PERSENTASE
Penyediaan Akses Rumah Layak dan Aman				
Meningkatkannya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah MBR yang yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	2.836 Unit	3.545 Unit	125 %

4.2.6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Indikator Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko merupakan indikator baru yang ditambahkan pada Tahun Anggaran 2023 dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait kegiatan yang dicanangkan oleh Direktorat Kepatuhan Intern. Kegiatan ini terdiri atas 2 laporan yang terdiri dari Kegiatan Zona Integritas dan Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Anto Penyusunan (SMAP). Kegiatan ini hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Balai P2P Jawa I walaupun pelaksanaannya melibatkan Satker PP Provinsi DKI Jakarta dan Satker PP Provinsi Banten. Berikut merupakan capaian progress berdasarkan penyerapan anggaran i-emon:

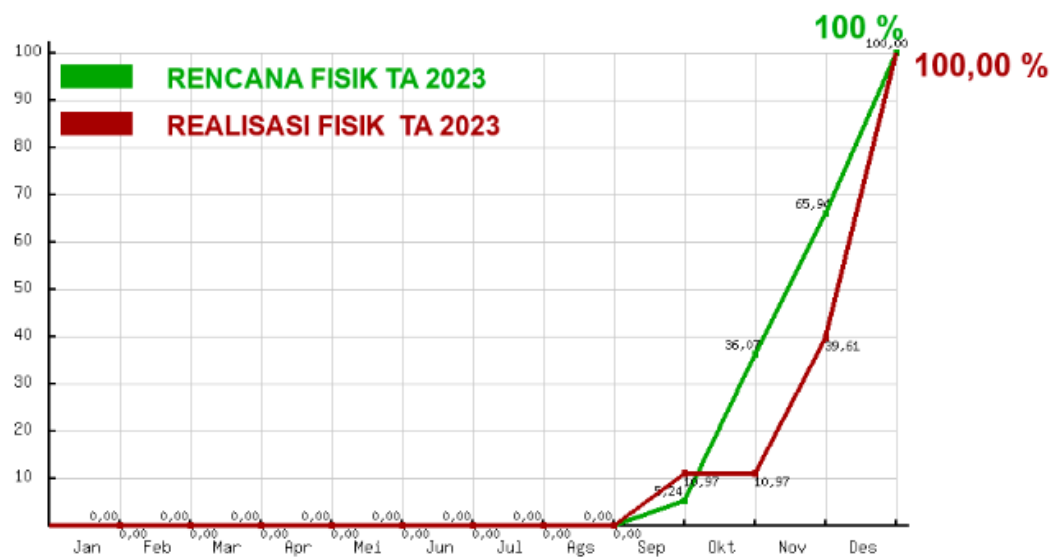
INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				47.600.000	47.600.000	100,00
	1. Sertifikasi Risk Officer in Public Sector	7	ORG	6.800.000	47.600.000		
522131	Belanja Jasa Konsultansi				13.318.000	12.987.000	97,51
	1. Tenaga Ahli Web Development	1	LS	13.318.000	13.318.000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				11.072.000	11.070.275	99,98
	1. Perjalanan Dinas Biasa	1	LS	11.072.000	11.072.000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				28.880.000	28.880.000	100,00
	1. Honor dan Transport Meeting	1	LS	11.880.000	11.880.000		
	2. Paket Meeting Luar Kota	1	LS	17.000.000	17.000.000		
TOTAL					100.870.000	100.537.275	99,67

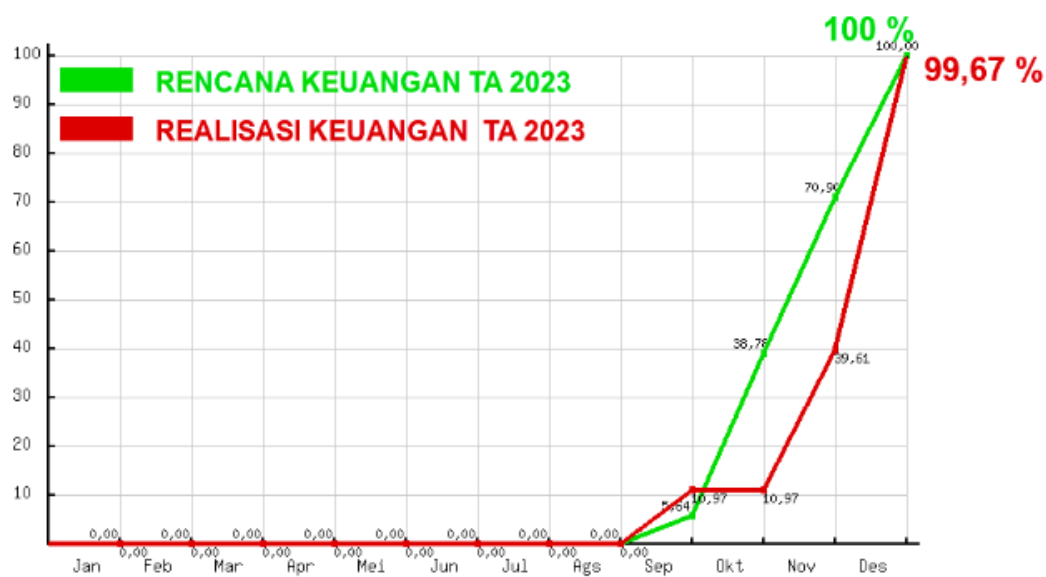
Berdasarkan data tangkapan layar i-emon diatas, capaian penyerapan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan adalah 99,82% atau sebesar Rp267.039.000 dari Rp267.520.000.

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[420149] BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I						
Kasatker	Firsta S.T., MUDD						
PPK	Harum Bonang Asmoro, SE						
Kegiatan	[4978] Penyediaan Akses Rumah Layak Huni						
Output (KRO)	[ABF] Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
Rincian Output (RO)	[024] Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan						
Komponen	[100] Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko di Ditjen Perumahan						
Kode Paket	07.420149.IA.4978.ABF.024.100.A						
Nama Paket	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Ditjen Perumahan						
Target Output Paket	1 Kebijakan						
Provinsi	DKI JAKARTA						
Kabupaten	KOTA JAKARTA PUSAT						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Administrasi Umum						
Kategori Kegiatan	Administrasi Umum						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2023						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2023						
Pagu DIPA	Rp. 100.870.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	100.870.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 100.870.000 ,-						
Realisasi	Rp. 100.537.275 ,-						
Progres Keu	99,67 %						
Progres Fisik	100,00 %						



Renc. eMon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	36,07	65,94	100,00
Real. Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	39,61	100,00



Renc. e-Mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	38,78	70,90	100,00
Real. Keu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	39,61	99,67

4.2.6.1 Satker Balai P2P Jawa I

1. Sosialisasi SMAP

- Waktu dan Tempat : 17 Juli 2023 / Wisma Karya Jakarta
- Daftar Undangan : Acara dibuka oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dan dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
- Maksud^[L] dan Tujuan^[SEP] : Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Serta Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu agar dapat meningkatkan komitmen, kinerja dan pelayan Balai P2P Jawa I kepada para stakeholder external, mitra dan masyarakat serta terbangunnya pemahaman yang memadai mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memiliki komitmen dalam menerapkannya secara konsisten sehingga dapat membangun suatu kultur organisasi yang mampu mencegah, mendeteksi serta merespon tindak penyuapan secara efektif di Balai P2P Jawa I. ^[L]^[SEP]
- Indikator Hasil Kegiatan^[L]^[SEP] : Indikator hasil kegiatan ini diantaranya sebagai berikut:
Memahami pengertian Sistem Manajemen Anti Penyuapan;^[L]^[SEP]Memahami implementasi Sistem Manajemen Mutu.

DOKUMENTASI
SOSIALISASI DAN PELATIHAN AWARENESS SISTEM MANAJEMEN ANTI
PENYUAPAN (SMAP) ISO 37001:2016 SERTA SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001:2015 DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN JAWA I



2. Workshop Sasaran dan Program SMAP

- Waktu dan Tempat : 21 September 2023 / Hotel Horison Ciledug
- Daftar Undangan : Acara dibuka oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dan dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
- Maksud^[L]_[SEP] dan Tujuan : maksud dan tujuan dari kegiatan Workshop Sasaran dan Program Anti Penyuapan dan Uji Kelayakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu untuk membahas dan menyusun sasaran anti penyuapan di setiap unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I serta mendokumentasikan hasil uji kelayakan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. ^[L]_[SEP]
- Indikator Hasil Kegiatan ^[L]_[SEP] : Dari kegiatan Workshop Sasaran dan Program Anti Penyuapan dan Uji Kelayakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, telah disusun dokumen sebagai berikut :
- a) Sasaran dan Program Kerja Subbag Umum dan Tata Usaha Balai P2P Jawa 1;
 - b) Sasaran dan Program Kerja Seksi Wilayah I Balai P2P Jawa 1; ^[L]_[SEP]
 - c) Sasaran dan Program Kerja Seksi Wilayah II Balai P2P Jawa 1; ^[L]_[SEP]
 - d) Sasaran dan Program Kerja Bendahara Balai P2PJawa1; ^[L]_[SEP]
 - e) Sasaran dan Program Kerja PPSPM Balai P2P Jawa 1; ^[L]_[SEP]
- Dokumen-dokumen tersebut di atas akan digunakan sebagai pemenuhan klausul 6.1, ^[L]_[SEP] 6.2, dan 8.2 pada persyaratan ISO 37001:2016.

DOKUMENTASI
WORKSHOP SASARAN DAN PROGRAM ANTI PENYUAPAN DAN UJI KELAYAKAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) ISO 37001:2016
DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I



**NOTULENSI RAPAT TINJAUAN DEWAN PENGARAH SMAP ISO 37001
PERIODE TAHUN 2023**

Hari, Tanggal : 6 November 2023
Waktu : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Via On-line Zoom Meeting
Dipimpin Oleh : Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Perumahan
Peserta Rapat : Sesuai Daftar Hadir

NO.	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT	PJ	BATAS WAKTU
1	STATUS TINDAK LANJUT TINJAUAN DEWAN PENGARAH SEBELUMNYA			
	Status tindak lanjut Dewan Pengarah sebelumnya, tidak ada catatan, merupakan Dewan Pengarah SMAP yang pertama kali.	Persiapan Audit Eksternal	FKAP	NA
2	PERUBAHAN DALAM (SMAP)			
2a	Masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan			
	Arahan Dewan Pengarah Pantau Pelaksanaan dan agar diupdate perkembangannya	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
2b	Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan			
	Arahan Dewan Pengarah Dalam menjalankan arahan dari Direktorat Kepatuhan Intern terkait implementasi dan sertifikasi ISO 37001:2016, diharapkan agar dipraktikkan pada keseharian dalam melakukan kegiatan di Balai baik di lingkungan internal maupun eksternal Balai P2P Jawa I	Dipersiapkan untuk acuan kinerja FKAP	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
2c	Penilaian Risiko Penyuapan – <i>Bribery Risk Assessment</i>			
	Arahan Dewan Pengarah Agar pengendalian yang telah ada di Kementerian PUPR, termasuk kepada penerapan Zona Integritas, SMAP dapat menjadi Kontrol diri Pegawai di Balai	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah dan bila diperlukan


NO.	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT	PJ	BATAS WAKTU
3	INFORMASI KINERJA DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN, TERMASUK KECENDERUNGAN DALAM			
3a	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;			
	<p>Arahan Dewan Pengarah</p> <p>Agar ketidaksesuaian dari penerapan SMAP ISO 37001:2016, semua proses yang bermasalah langsung diselesaikan.</p> <p>Dan Sosialisasi terkait SMAP, Gratifikasi dan WBS dapat secara berkala dijalankan baik Internal maupun kepada pihak Eksternal</p>	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
3b	Hasil pemantauan dan pengukuran			
	<p>Arahan Dewan Pengarah</p> <p>Klausul 6.1. Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang :</p> <p>Klausul 6.2 Sasaran Anti penyuapan dimonitor dan dikendalikan</p> <p>Penerapan klausul ISO 37001:2016 dimonitor oleh Tim FKAP dan dilaporkan kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah</p> <p>Laporan rutin Gratifikasi sudah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Intern.</p>	Sudah 100%	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
3c	Hasil audit Internal			
	<p>Arahan Dewan Pengarah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Audit Internal tgl 16,18 dan 20 Oktober 2023 oleh Auditor Internal kepada Kepala Balai, FKAP dan Unit Kerja PPSPM, Bendahara, Kasi I, Kasi II, PPK, dan Kasubbag Umum dan TU. - Hasil Audit terdapat 9 Observasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti 	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
	Hasil audit Eksternal			
	N/A			

NO.	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT	PJ	BATAS WAKTU
3d	Laporan Penyuaapan (<i>Whistleblowing System</i>)			
	Tidak ada penyuaapan dan isu terkait selama periode January-Oktober 2023 Telah dilakukan Sosialisasi terkait WBS kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan BP2P Jawa 1			Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
3e	Penyelidikan Penyuaapan			
	Tidak ada penyelidikan penyuaapan dan isu terkait selama periode Agustus sd November 2023, karena tidak ada laporan pelanggaran.			Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
3f	Sifat dan tingkat risiko penyuaapan yang dihadapi oleh organisasi;			
	Arahan Dewan Pengarah: Terhadap Risiko diatas Batas Rendah telah ditetapkan mitigasi dan dimasukkan kedalam Sasaran Anti Penyuaapan tahun 2023. Ketetapan ini terus dimonitor dan dipastikan keefektifannya untuk memastikan Sasaran Anti Penyuaapan 4 BIG No's BP2P Jawa I tercapai.	Terus memonitor		Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
5	KEEFEKTIFAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENGENDALIKAN RISIKO PENYUAPAN;			
	- Realisasi Rencana dan Program kerja FKAP	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan
6	PELUANG PENINGKATAN BERKELANJUTAN DARI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN			
	- Tetap dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pihak sebagai pemangku kepentingan	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan

NO.	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT	PJ	BATAS WAKTU
7	KELUARAN/ KEPUTUSAN TINJAUAN DEWAN PENGARAH			
	<ul style="list-style-type: none"> - Arahkan alokasi SDM, Anggaran, Infrastruktur sesuai kebutuhan SMAP ISO 37001 - Dewan Pengarah / Direktur Kepatuhan Intern mengarahkan agar Anggota Tim FKAP dan pagawai Balai dapat memperkuat persiapan baik pemahaman serta dokumen dalam menghadapi Audit Eksternal SMAP ISO 37001:2016. - Dewan Pengarah mendukung sepenuhnya Implementasi serta Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 di BP2P Jawa I. 	Terus memonitor	FKAP	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah selanjutnya dan bila diperlukan

Jakarta, 6 November 2023

Dipersiapkan Oleh,



Plt. Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Jawa I

Disahkan Oleh,



Direktur Kepatuhan Intern
Ditjen Perumahan

DOKUMENTASI
RAPAT TINJAUAN DEWAN PENGARAH SMAP PADA BALAI P2P JAWA I
SENIN, 6 NOVEMBER 2023



CERTIFICATE



Certificate No. SAB 00154

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Kementerian PUPR Republik Indonesia

Jl. Wijaya 1 No. 59, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan memenuhi
has implemented anti-bribery management system that comply with

SNI ISO 37001:2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan
Wilayah 1 dan Seksi Pelaksanaan Wilayah 2, PPK, PPSPM dan
Bendahara Satker Balai P2P Jawa I.

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as
laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES



Budi Utomo

Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 01/12/2023 sampai 30/11/2026
This certificate is valid from 2023/12/01 until 2026/11/30

01-Rev.00



4698702



SCI-2023A

4.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

4.1.3.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana Internal pada Tahun Anggaran 2023 hanya terdapat pada Satker Balai P2P Jawa I karena kebijakan yang menentukan bahwa mulai tahun 2023 pengadaan terhadap layanan sarana dan prasarana internal kantor terpusat di Balai yang kemudian baru didistribusikan ke masing-masing Satuan Kerja PP Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kerja PP Provinsi Banten. Berikut merupakan capaian penyerapan anggaran berdasarkan i- emon:

28	5578.E88	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit/m2/Paket					150.000	149.022	0	99,35	100,00
29	5578.E88.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit/m2/Paket					150.000	149.022	0	99,35	100,00
30	5578.E88.951.101.A	Pengadaan/Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	KOTA JAKARTA PUSAT	Barang	Swakelola	RPM	150.000	149.022	0	99,35	100,00

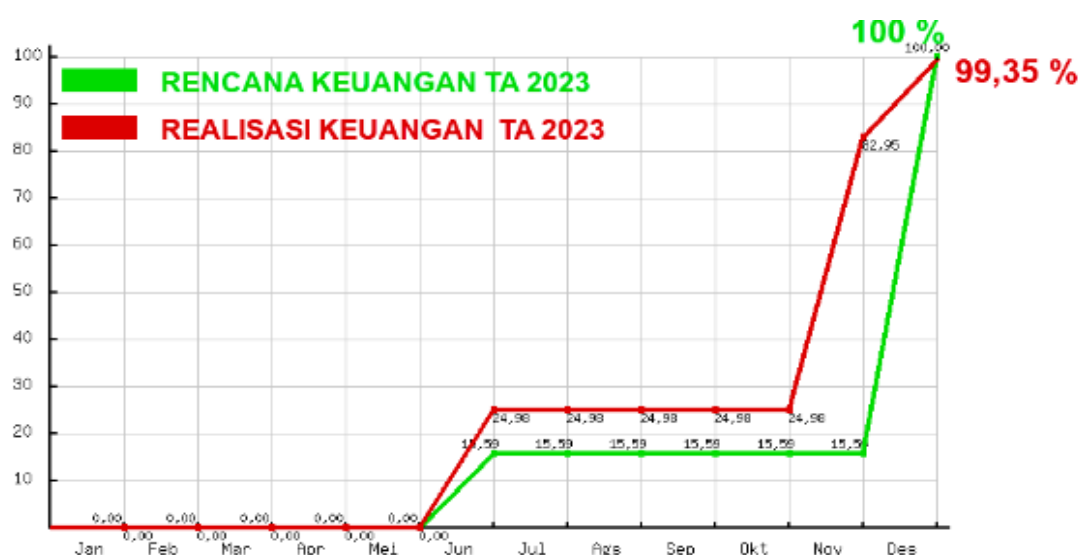
Gambar Progres Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja “Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal”

Berdasarkan data tangkapan layar i-emon diatas, capaian penyerapan anggaran untuk kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah 99,35% atau sebesar Rp 149.022.000,- dari Rp. 150.000.000,-

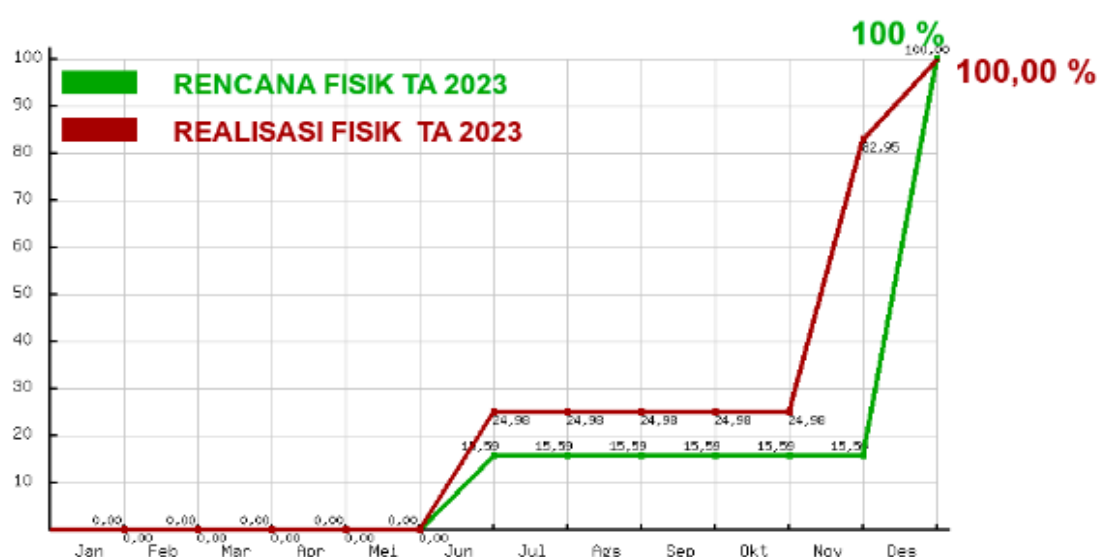
INFORMASI RINCIAN ITEM PAKET							
Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Alokasi	Realisasi	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				150.000.000	149.022.402	99,35
	1. Pengadaan AC 1 PK	2	UNIT	6.894.000	13.788.000		
	2. Pengadaan AC 2 PK	1	UNIT	11.722.000	11.722.000		
	3. Netgear Orbi Home Wifi System - 1 Router 1 Orbi Satelit	1	Unit	7.532.000	7.532.000		
	4. Netgear Orbi Tri Band Mesh Wifi Satellite RBS 50	1	Unit	4.425.000	4.425.000		
	5. Mixer 6 channel, 4 mono/2 stereo, 3 band EQ Tone (Mixer)	1	Unit	1.832.000	1.832.000		
	6. Speaker portable 12.2 way speaker universal rechargeable battery, mp3, FM, bluetooth, SD card input (speaker)	1	Unit	2.664.000	2.664.000		
	7. Logitech web cam C922 (camera web)	1	Unit	2.173.000	2.173.000		
	8. ASHLEY RCM Rechargeable Mic 4 channel	1	Unit	2.664.000	2.664.000		
	9. Behringer UMC 204HD (Driver Mixer Audio)	1	Unit	2.953.000	2.953.000		
	10. Mic Podcast Record Tech X1 (Microphone)	3	Unit	1.221.000	3.663.000		
	11. Video Mixer LIVEPRO L1 (Video Mixer)	1	Unit	6.105.000	6.105.000		
	12. Monitoring Audio Headphone G331 (Headphone)	1	Unit	1.109.000	1.109.000		
	13. Lenovo All in One PC Amd Ryzen 7 7730U 16GB W11 23,8 FHD (Komputer)	1	Unit	18.093.000	18.093.000		
	14. Lenovo All in One PC Amd Ryzen 5 7530U 16GB W1123,8 FHD (Komputer)	1	Unit	14.985.000	14.985.000		
	15. Mixer Ashler Premium 6	1	Unit	1.832.000	1.832.000		
	16. Rak Besi 5 Susun Informa	1	Unit	2.350.000	2.350.000		
	17. Monitor AOC 27 inch	1	Unit	3.700.000	3.700.000		
	18. Stabilizer Matsuyuma	1	Unit	11.800.000	11.800.000		
	19. Komputer LG 32Q980N	1	LS	25.573.000	25.573.000		
	20. Printer Warna A4	1	Unit	2.652.000	2.652.000		
	21. DJI RS 3 Mini	1	Unit	7.215.000	7.215.000		
	22. TP Link CCTV	1	Unit	1.170.000	1.170.000		
TOTAL					150.000.000	149.022.402	99,35

INFORMASI PROFIL PAKET PEKERJAAN

Tahun Anggaran	2023						
Satuan Kerja	[420149] BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA						
Kasatker	Firsta S.T., MUDD						
PPK	Harum Bonang Asmoro, SE						
Kegiatan	[5578] Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan						
Output (KRO)	[EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
Rincian Output (RO)	[951] Layanan Sarana Internal						
Komponen	[101] Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran						
Kode Paket	07.420149.WA.5578.EBB.951.101.A						
Nama Paket	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi						
Target Output Paket	1 Layanan						
Provinsi	DKI JAKARTA						
Kabupaten	KOTA JAKARTA PUSAT						
Jenis Pengadaan	Swakelola						
Metode	Swakelola						
Kategori	Barang						
Kategori Kegiatan	Pengadaan Barang						
Rencana Tanggal Mulai	02-01-2024						
Rencana Tanggal Selesai	10-12-2024						
Pagu DIPA	Rp. 150.000.000 ,-						
Sumber Dana (Rp)	RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN
	150.000.000	0	0	0	0	0	0
Pagu Pengadaan	Rp. 150.000.000 ,-						
Realisasi	Rp. 149.022.402 ,-						
Progres Keu	99,35 %						
Progres Fisik	100,00 %						



Renc. e-Mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	100,00
Real. Keu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	82,95	99,35



Renc. eMon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	100,00
Real. Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	82,95	100,00

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan

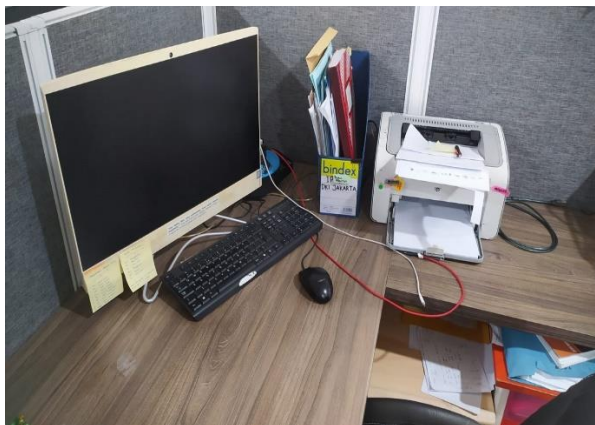
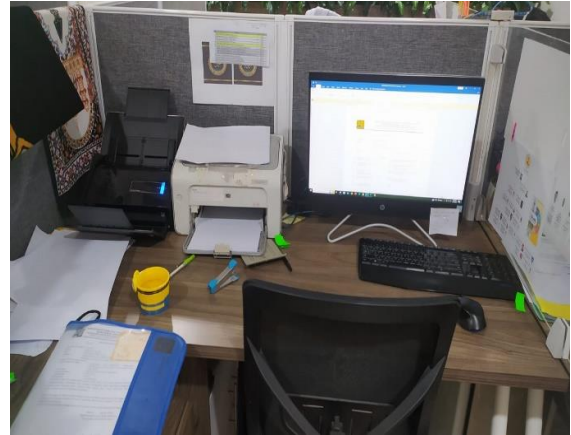


2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Ruang Rapat



Pengadaan Sarana dan Prasarana



4.1.3.2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker

Indikator Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari Satker Balai P2P Jawa I, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten. Kegiatan ini diantaranya terdiri dari perjalanan dinas yang menyangkut Penatausahaan Satuan Kerja dan Pengadaan Barang Persediaan kebutuhan Kantor. Berikut merupakan capaian penyerapan anggaran berdasarkan i-emon:

Satker Balai P2P Jawa I

25	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					11.004.615	11.003.535		0	99,99	100,00
26	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	8.466.062	8.464.986	0	0	99,99	100,00
27	5578.EBA.994.002.B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.538.553	2.538.549	0	0	100,00	100,00

Satker P2P DKI Jakarta

35	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					200.000	194.715		0	97,36	97,36
36	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	200.000	194.715	0	0	97,36	97,36

Satker P2P Banten

37	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					428.270	426.860		0	99,67	99,67
38	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	428.270	426.860	0	0	99,67	99,67

Gambar Progres Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker”

Berdasarkan data tangkapan layar i-emon diatas, capaian penyerapan anggaran untuk kegiatan Layanan Umum pada Dukungan Manajemen pada Satker Balai P2P Maluku adalah 100%, untuk Satker Penyediaan Perumahan Maluku capaian penyerapan anggarannya adalah 97.36% dan untuk Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara adalah 99,67%.

4.1.3.3 Jumlah Layanan Perkantoran

Sama halnya dengan Layanan Umum, Indikator Jumlah Layanan Perkantoran juga terdiri dari Satker Balai P2P Jawa I, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten. Kegiatan ini berisi kegiatan Administrasi Satuan Kerja seperti Honorarium, Sewa Kantor, dan kegiatan rutin seperti BBM, Listrik, Air, dsb. Berikut merupakan capaian penyerapan anggaran berdasarkan i-emon:

Satker Balai P2P Jawa I

25	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					11.004.615	11.003.535		0	99,99	100,00
26	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	KOTA JAKARTA PUSAT	AU	Swakelola	RPM	8.466.062	8.464.986	0	0	99,99	100,00
27	5578.EBA.994.002.B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Dokumen	KOTA JAKARTA PUSAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	2.538.553	2.538.549	0	0	100,00	100,00

Satker PnP DKI Jakarta

37	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					428.270	426.860		0	99,67	99,67
38	5578.EBA.994.002.A	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	DKI JAKARTA	AU	Swakelola	RPM	428.270	426.860	0	0	99,67	99,67

Satker PnP Banten

86	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					792.100	790.951		0	99,85	100,00
87	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan	1	Laporan	BANTEN	AU	Swakelola	RPM	792.100	790.951	0	0	99,85	100,00

Berdasarkan data tangkapan layar i-emon diatas, capaian penyerapan anggaran untuk kegiatan Layanan Perkantoran untuk Satker Balai P2P Jawa I adalah 100%, capaian penyerapan anggaran Satker PP Provinsi DKI Jakarta adalah 99.67% dan penyerapan Satker PP Provinsi Banten adalah 99,85%.

EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tanggal 31 Maret 2023 Dirjen Perumahan melaksanakan revisi anggaran dengan perubahan anggaran dan Balai P2P Jawa I dari Rp.9.084.038.000,- menjadi Rp. 19.123.279.000,-. Pelaksanaan revisi anggaran tersebut dengan melakukan perubahan Balai P2P Jawa I pergeseran anggaran antar Satker dan antar Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Akun dengan pertimbangan percepatan penarikan untuk kegiatan:

1. Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah
2. Penyusunan LAKIP
3. Pemenuhan anggaran Pendampingan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) pada Balai P2P Jawa I

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Usulan DIPA Revisi 4 (Rp.000)			Digital Stamp	
			Semula	Menjadi	Selisih	Semula	Menjadi
44	420148	Balai P2P Sumatera V	6.721.257	6.886.757	165.500	3896-3651-5606-0180	8919-2201-9540-2884
45	420149	Balai P2P Jawa I	9.084.038	9.010.688	(73.350)	0639-8390-5736-0605	4927-8468-1004-9520
46	420150	Balai P2P Jawa II	6.498.533	7.067.183	568.650	4512-2000-0536-9612	2906-5313-1986-4397
47	420151	Balai P2P Jawa III	8.634.211	8.278.211	(356.000)	7925-1119-0741-0197	8140-7041-4531-0407
48	420152	Balai P2P Jawa IV	9.638.084	9.601.984	(36.100)	8614-0581-1240-5056	4200-1743-3968-4406
49	420153	Balai P2P Nusa Tenggara I	4.127.998	4.281.748	153.750	2193-0651-8614-4327	7787-9366-2823-5075
50	420154	Balai P2P Nusa Tenggara II	4.129.714	4.292.064	162.350	3460-2075-1287-7843	6390-8708-8064-2145
51	420155	Balai P2P Kalimantan I	6.259.920	6.419.720	159.800	2938-8679-7453-9486	2417-0913-2132-8578
52	420156	Balai P2P Kalimantan II	8.807.053	9.293.099	486.046	6972-6872-8426-4093	2201-9502-3758-0141
53	420157	Balai P2P Sulawesi I	5.810.614	5.968.114	157.500	0236-3211-0408-2008	2309-5193-6751-5360
54	420158	Balai P2P Sulawesi II	6.624.303	6.971.803	347.500	0638-3206-1337-0938	4037-7800-7102-0963
55	420159	Balai P2P Sulawesi III	8.710.531	8.847.831	137.300	0866-4510-6109-4072	2265-9093-5640-5409
56	420160	Balai P2P Maluku	6.537.500	6.863.850	326.350	1008-5017-1040-8462	1980-0746-4210-0736
57	420162	Balai P2P Papua I	5.590.817	5.760.217	169.400	2946-2997-5015-0020	0170-9003-8351-9011
58	420161	Balai P2P Papua II	4.637.900	4.878.200	240.300	2101-0554-1040-9127	3501-2099-4189-6670
Total Direktorat Jenderal Perumahan			7.076.225.441	7.489.064.377	412.838.936		

DIPA AWAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420149/2023



06-0039-8390-0736-0605

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (07) | Dirjen Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode Nama Satker | : | (420149) | BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I |
| Sebesar | : | Rp. 9.084.038.000 | (SEMBILAN MILIAR DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 9.084.038.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SSSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPKN JAKARTA V | (139) Rp. | 9.084.038.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

DIPA REVISI 01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420149/2023**



DS-6927-8468-1004-9520

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker	: (420149)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I
Sebesar	: Rp.	9.010.688.000 (SEMBILAN MILIAR SEPULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.010.688.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	9.010.688.000
-------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada bulan Agustus 2023 Dirjen Perumahan melaksanakan revisi anggaran dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 16.378.681.000,- . Balai P2P Jawa I pergeseran anggaran antar Satker dan antar Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Akun dengan pertimbangan percepatan penarikan untuk kegiatan:

1. Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah
2. Penyusunan LAKIP
3. Pemenuhan anggaran Pendampingan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) pada Balai P2P Jawa I

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Usulan DIPA Revisi 10 (Rp.000)			Digital Stamp	
			Semula	Menjadi	Selisih	Semula	Menjadi
43	420144	Balai P2P Sumatera I	5.127.851	5.645.981	518.130	7100 0099 1092 4425	2108 0822 5699 2989
44	420145	Balai P2P Sumatera II	5.041.977	5.282.447	240.470	7238 7144 8904 4816	1400 7602 2973 0013
45	420146	Balai P2P Sumatera III	8.004.171	8.704.601	700.430	1546 9947 8087 2234	7096 6209 3060 9326
46	420147	Balai P2P Sumatera IV	5.703.505	6.078.605	375.100	2730 2054 0029 0811	2572 1921 8841 1514
47	420148	Balai P2P Sumatera V	6.886.757	7.437.637	550.880	8919 2201 9540 2884	6869 9173 8656 1359
48	420149	Balai P2P Jawa I	9.010.688	16.378.681	7.367.993	4927 8468 1004 9520	3003 7207 4468 4380
49	420150	Balai P2P Jawa II	7.067.183	9.318.674	2.251.491	3094 7139 4967 5445	7718 5441 0054 1075
50	420151	Balai P2P Jawa III	8.278.211	8.945.311	667.100	8140 7041 4531 0407	4800 3434 3970 6406
51	420152	Balai P2P Jawa IV	9.601.984	10.075.074	473.090	4200 1743 3968 4406	0840 0490 8839 6430
52	420153	Balai P2P Nusa Tenggara I	4.281.748	5.047.182	765.434	7787 9366 2823 5075	2981 0257 7394 4590
53	420154	Balai P2P Nusa Tenggara II	4.292.064	4.730.954	438.890	6390 8708 8064 2145	6426 2350 3760 0251
54	420155	Balai P2P Kalimantan I	6.419.720	6.736.790	317.070	2417 0913 2132 8578	4454 4080 3310 3310
55	420156	Balai P2P Kalimantan II	9.293.099	10.476.589	1.183.490	2201 9502 3758 0141	2003 0381 6906 2107
56	420157	Balai P2P Sulawesi I	5.968.114	7.522.706	1.554.592	2309 5193 6751 5360	6273 3447 3595 0058
57	420158	Balai P2P Sulawesi II	6.971.803	7.810.558	838.755	4037 7800 7102 0963	3045 2640 4409 9424
58	420159	Balai P2P Sulawesi III	8.847.831	9.296.784	448.953	2265 9093 5640 5409	7479 0085 2026 5697
59	420160	Balai P2P Maluku	6.863.850	7.136.880	273.030	1980 0746 4210 0736	8190 9467 2806 1050
60	420162	Balai P2P Papua I	5.760.217	6.157.925	397.708	0170 9003 8351 9011	4779 4290 6207 2832
61	420161	Balai P2P Papua II	4.878.200	6.640.631	1.762.431	3501 2099 4189 6670	4940 6592 3870 6245
Total Direktorat Jenderal Perumahan			11.368.279.561	11.368.279.561	-		

Perubahan pada Kegiatan 4978 Penyediaan Akses Rumah Layak Huni

- A. Penambahan anggaran pada KRO 4978.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp10.323.239.000 dari semula Rp173.680.516.000 menjadi Rp184.003.755.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pergeseran anggaran dari ABF.001 ke RBB.008 sebesar Rp715.685.000 untuk Mobilisasi dan demobilisasi mahasiswa dan tim mentor Kampus Merdeka; [L] [SEP]
 2. Pergeseran anggaran dari ABF.002 ke ABF.009 sebesar Rp1.000.000.000 [L] [SEP] untuk Optimalisasi Randal PKP pada Balai P2P dan Satker PP;
 3. Pergeseran anggaran ke ABF.006 dari CBB.005 sebesar Rp5.249.020.000 dalam rangka adanya penyesuaian lingkup dengan rencana pengembangan [L] [SEP] Kawasan; [L] [SEP]
 4. Pengurangan anggaran oada ABF.008 sebesar Rp1.700.000.000 dengan [L] [SEP] rincian: [L] [SEP] a) Pergeseran anggaran ke RBB.008 sebesar Rp1.050.000.000 untuk [L] [SEP] Mobilisasi dan demobilisasi mahasiswa dan tim mentor Kampus Merdeka
 5. Pergeseran anggaran ke 5578.EBA.994 sebesar Rp400.000.000 untuk [L] [SEP] pemenuhan gaji PPNPN Direktorat RUK; [L] [SEP]
 6. Pergeseran anggaran ke 5578.EBB.951 sebesar Rp250.000.000 untuk [L] [SEP] pemenuhan meubelair pendukung Sistem Manajemen Mutu (SMM). [L] [SEP]
- B. Pengurangan anggaran pada ABF.009 sebesar Rp4.570.874.000 dengan [L] [SEP] rincian: [L] [SEP] a) Pergeseran anggaran ke 5578.EBA.962 sebesar Rp2.375.364.000 untuk [L] [SEP] pemenuhan Dukman Balai P2P dan Satker PP; [L] [SEP] b) Pergeseran anggaran ke RBB.008 untuk mobilisasi dan demobilisasi [L] [SEP] mahasiswa dan tim mentor Kampus Merdeka sebesar Rp3.195.510.000; c) Pergeseran anggaran dari ABF.002 sebesar Rp1.000.000.000 untuk [L] [SEP] Optimalisasi Randal PKP pada Balai P2P dan Satker PP. [L] [SEP]
1. Pergeseran anggaran ke ABF.015 dari CBB.005 sebesar Rp9.530.487.000 [L] [SEP] dalam rangka penyesuaian program pembangunan baru dan opor;
 2. Pergeseran anggaran ke ABF.016 dari RBB.011 sebesar Rp210.000.000 untuk [L] [SEP] dukungan kegiatan Rumah Khusus pada Balai P2P; [L] [SEP]
 3. Pergeseran anggaran ke ABF.017 dari CBB.005 sebesar Rp1.150.980.000 [L] [SEP] dalam rangka penyesuaian program; [L] [SEP]
 4. Penambahan anggaran pada ABF.021 sebesar Rp1.697.771.000 dengan [L] [SEP] rincian: [L] [SEP] a) Pergeseran anggaran ke 5578.EBA.994 sebesar Rp14.613.000 untuk [L] [SEP] pemenuhan gaji PPNPN Direktorat RUK; [L] [SEP]
- C. Pengurangan anggaran pada KRO 4978.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp55.115.154.000 dari semula Rp999.867.842.000 menjadi Rp944.752.688.000 [L] [SEP]

Pada Oktober 2023 Dirjen Perumahan melaksanakan revisi anggaran dengan perubahan anggaran dan Balai P2P Jawa I dari Rp. 16.378.681.000,- menjadi Rp. 16,623,279,000,- dengan selisih Rp. 244,598,000,-

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Ditjen Perumahan

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
420149 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I	16,378,681,000	0	16,623,279,000	0	244,598,000	0
033.07.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,760,504,000	0	4,760,504,000	0	0	0
4978 Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4,760,504,000	0	4,760,504,000	0	0	0
4978.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	4,760,504,000	0	4,760,504,000	0	0	0
Volume :	7.00 Rekomendasi Kebijakan,		7.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	4,760,504,000	0	4,760,504,000	0	0	0
A RM	4,760,504,000	0	4,760,504,000	0	0	0
033.07.WA Program Dukungan Manajemen	11,618,177,000	0	11,862,775,000	0	244,598,000	0
5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	11,618,177,000	0	11,862,775,000	0	244,598,000	0
5578.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00]	11,468,177,000	0	11,712,775,000	0	244,598,000	0
Volume :	2.00 Layanan, Laporan,		2.00 Layanan, Laporan,		0.00 Layanan, Laporan,	
52 BELANJA BARANG	11,468,177,000	0	11,712,775,000	0	244,598,000	0
A RM	11,468,177,000	0	11,712,775,000	0	244,598,000	0
5578.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00]	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
Volume :	1.00 Unit, m2, Paket		1.00 Unit, m2, Paket		0.00 Unit, m2, Paket	
53 BELANJA MODAL	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
A RM	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0

Balai P2P Jawa I pada bulan Oktober 2024 melakukan pergeseran anggaran antar Satker dan antar Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Akun dengan pertimbangan percepatan penarikan untuk kegiatan:

1. Pergeseran anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran untuk pemenuhan belanja operasional pada Satuan Kerja Balai P2P Jawa I
2. Belanja operasional diantaranya untuk pemenuhan renovasi perkantoran Balai P2P Jawa I untuk pemindahan Satker Direktorat Rumah Swadaya serta pemenuhan operasional perkantoran Satker

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROG	KODE GIAT	KRO	RO	SUMBER DANA	JENIS BELANJA	SAT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
									PAGU	VOL	PAGU	VOL	PAGU	VOL
420143	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN								13.668.100.000	5	13.481.100.000	5	(205.000.000)	-
		IA	4978	ABF	024	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	5.065.055.000	1	5.065.055.000	1	-	-
		IA	4978	FAE	006	RM	52	Laporan	4.364.045.000	1	4.159.045.000	1	(205.000.000)	-
		WA	5578	EBA	962	RM	52	Layanan	1.087.000.000	1	1.087.000.000	1	-	-
		WA	5578	EBA	994	RM	52	Layanan	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	-	-
		WA	5578	EBB	951	RM	53	Layanan	300.000.000	1	300.000.000	1	-	-
420149	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I								16.378.681.000	10	16.623.279.000	10	244.598.000	-
		IA	4978	ABF	006	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	1.773.704.000	1	1.773.704.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	011	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	196.500.000	1	196.500.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	014	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	190.000.000	1	190.000.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	015	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	1.310.000.000	1	1.310.000.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	016	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	110.000.000	1	110.000.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	021	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	905.200.000	1	905.200.000	1	-	-
		IA	4978	ABF	024	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	275.100.000	1	275.100.000	1	-	-
		WA	5578	EBA	962	RM	52	Layanan	708.160.000	1	708.160.000	1	-	-
		WA	5578	EBA	994	RM	52	Layanan	10.760.017.000	1	11.004.615.000	1	244.598.000	-
		WA	5578	EBB	951	RM	53	Layanan	150.000.000	1	150.000.000	1	-	-
690737	PENYEDIAAN PERUMAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA								3.742.664.687.000	2	3.743.682.889.000	3	1.118.172.000	1
		IA	4978	ABF	009	RM	52	Rekomendasi Kebijakan	293.670.000	1	293.670.000	1	-	-
		IA	4978	RBB	020	RM	53	Unit	3.742.271.017.000	1	3.742.271.017.000	1	-	-
		WA	5578	EBA	994	RM	52	Layanan	-	-	1.118.172.000	1	1.118.172.000	1

Direktur Jenderal Perumahan,


Iwan Suprijanto, ST., MT.
NIP 197106301998031001

EFISIENSI ANGGARAN

Pada November 2023 Dirjen Perumahan melaksanakan revisi anggaran dengan perubahan anggaran dan Balai P2P Jawa I dari Rp.16,623,279,000,- menjadi Rp. 19.123.279.000,-

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Usulan DIPA Revisi 12 (Rp.000)			Digital Stamp		Keterangan
			Semula	Menjadi	Selisih	Semula	Menjadi	
30	401676	PP Provinsi Sulawesi Utara	118.181.548	124.387.121	6.205.573	2690 7174 0926 0540	2850 0757 7559 3106	
31	401677	PP Provinsi Gorontalo	131.313.166	136.631.932	5.318.766	3500 3398 0190 7909	2102 9081 5138 9212	
32	401678	PP Provinsi Sulawesi Barat	103.006.630	90.487.009	(12.519.621)	1221 1271 6745 5150	6867 6341 1930 2068	
33	401679	PP Provinsi Sulawesi Selatan	309.035.776	301.423.715	(7.612.061)	8336 3005 3000 6068	5328 6265 6712 6003	
34	401680	PP Provinsi Sulawesi Tengah	549.929.261	639.302.848	89.373.587	9072 0769 2964 9115	4423 0207 8080 9476	
35	401681	PP Provinsi Sulawesi Tenggara	142.711.034	142.186.084	(524.950)	6708 7667 7191 7000	7101 6230 3050 0825	
36	401682	PP Provinsi Bali	45.737.691	43.339.492	(2.398.199)	1839 3306 1736 0135	5430 1152 4943 0939	
37	401683	PP Provinsi Nusa Tenggara Barat	68.883.788	70.857.482	1.973.694	0339 3670 5339 1675	4153 0696 4585 7462	
38	401684	PP Provinsi Nusa Tenggara Timur	554.883.243	498.173.380	(56.709.863)	1932 2137 4870 5451	8100 0377 8620 3867	
39	401685	PP Provinsi Maluku	44.097.118	37.751.720	(6.345.398)	9805 3111 5303 8240	8937 6754 0177 0757	
40	401686	PP Provinsi Maluku Utara	45.272.001	59.549.808	14.277.807	9454 5220 8710 4826	0830 7776 0667 7577	
41	401687	PP Provinsi Papua	287.674.557	272.467.862	(15.206.695)	3395 2309 0320 7881	1150 7853 5058 0277	
42	401688	PP Provinsi Papua Barat	86.001.928	75.725.242	(10.276.686)	3697 1048 5098 9044	0132 5385 2098 9413	
43	420144	Balai P2P Sumatera I	5.645.981	5.868.126	222.145	2108 0822 5699 2989	1814 8562 7077 6560	
44	420145	Balai P2P Sumatera II	5.282.447	5.462.093	179.646	1400 7602 2973 0013	9308 3895 8998 1943	
45	420146	Balai P2P Sumatera III	8.704.601	9.104.601	400.000	7096 6209 3060 9326	8083 9062 0142 0602	
46	420147	Balai P2P Sumatera IV	6.078.605	6.381.811	303.206	2572 1921 8841 1514	0475 3040 1689 3830	
47	420148	Balai P2P Sumatera V	7.437.637	8.320.187	882.550	6501 5569 0501 8350	4775 5549 0333 0530	
48	420149	Balai P2P Jawa I	16.623.279	19.123.279	2.500.000	0530 1779 6206 7633	0449 0504 3001 5633	
49	420150	Balai P2P Jawa II	9.318.674	10.026.317	707.643	7718 5441 0054 1075	1410 9912 0488 4422	
50	420151	Balai P2P Jawa III	8.945.311	8.945.311	-	4800 3434 3970 6406	4800 3434 3970 6406	Tidak ikut serta dalam Revisi DIPA
51	420152	Balai P2P Jawa IV	10.075.074	10.903.880	828.806	0840 0490 8839 6430	1960 4262 7626 6497	
52	420153	Balai P2P Nusa Tenggara I	5.047.182	5.147.182	100.000	2981 0257 7394 4590	9532 2373 3243 1129	
53	420154	Balai P2P Nusa Tenggara II	4.730.954	4.830.954	100.000	6426 2350 3760 0251	0619 5363 6827 6807	
54	420155	Balai P2P Kalimantan I	6.736.790	6.736.790	-	4454 4080 3310 3310	4454 4080 3310 3310	Tidak ikut serta dalam Revisi DIPA
55	420156	Balai P2P Kalimantan II	10.476.589	11.318.089	841.500	1174 7072 0030 0854	5572 2977 7862 7343	
56	420157	Balai P2P Sulawesi I	7.522.706	8.163.111	640.405	6273 3447 3595 0058	8788 2075 2000 6965	
57	420158	Balai P2P Sulawesi II	7.810.558	8.277.106	466.548	3045 2640 4409 9424	0165 1019 5604 4049	
58	420159	Balai P2P Sulawesi III	9.296.784	9.296.784	-	7479 0085 2026 5697	7479 0085 2026 5697	Tidak ikut serta dalam Revisi DIPA
59	420160	Balai P2P Maluku	7.136.880	8.046.880	910.000	8190 9467 2806 1050	5560 0203 1389 0157	
60	420162	Balai P2P Papua I	6.157.925	7.115.879	957.954	4779 4290 6207 2832	8687 8746 8034 1378	
61	420161	Balai P2P Papua II	6.640.631	7.601.631	961.000	4940 6532 3870 6245	5300 5902 1386 7456	
Total Direktorat Jenderal Perumahan			11.368.279.561	11.462.018.170	93.738.609			

Pada Desember 2023 Dirjen Perumahan melaksanakan revisi anggaran dengan perubahan anggaran dan Balai P2P Jawa I dari Rp. Rp. 19.123.279.000,- menjadi Rp. 19.115.699.000,-, adapun perubahan anggaran tersebut ada didalam administrasi Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(033)
(07)
(420149)
Rp. 19,115,699,000

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ditjen Perumahan
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I

Halaman: 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			150,000,000	RM
	- Pengadaan AC 1 PK	2.0 UNIT	6,894,000	13,788,000	
	- Pengadaan AC 2 PK	1.0 UNIT	11,722,000	11,722,000	
	- Netgear Orbi Home Wifi System - 1 Router 1 Orbi Satelit	1.0 Unit	7,532,000	7,532,000	
	- Netgear Orbi Tri Band Mesh Wifi Satelite RBS 50	1.0 Unit	4,425,000	4,425,000	
	- Mixer 6 channel, 4 mono/2 stereo, 3 band EQ Tone (Mixer)	1.0 Unit	1,832,000	1,832,000	
	- Speaker portable 12" 2 way speaker universal rechargeable battery, mp3, FM, bluetooth, SD card input (speaker)	1.0 Unit	2,664,000	2,664,000	
	- Logitech web cam C922 (camera web)	1.0 Unit	2,173,000	2,173,000	
	- ASHLEY RCM Rechargeable Mic 4 channel	1.0 Unit	2,664,000	2,664,000	
	- Behringer UMC 204HD (Driver Mixer Audio)	1.0 Unit	2,953,000	2,953,000	
	- Mic Podcast Record Tech X1 (Microphone)	3.0 Unit	1,221,000	3,663,000	
	- Video Mixer LIVEPRO L1 (Video Mixer)	1.0 Unit	6,105,000	6,105,000	
	- Monitoring Audio Headphone G331 (Headphone)	1.0 Unit	1,109,000	1,109,000	
	- Lenovo All in One PC Amd Ryzen 7 7730U 16GB W11 23.8" FHD (Komputer)	1.0 Unit	18,093,000	18,093,000	
	- Lenovo All in One PC Amd Ryzen 5 7530U 16GB W1123.8" FHD (Komputer)	1.0 Unit	14,985,000	14,985,000	
	- Mixer Ashler Premium 6	1.0 Unit	1,832,000	1,832,000	
	- Rak Basi 5 Susun Informa	1.0 Unit	2,350,000	2,350,000	
	- Monitor AoC 27 inch	1.0 Unit	3,700,000	3,700,000	
	- Stabilizer Matsuyuma	1.0 Unit	11,800,000	11,800,000	
		1.0 LS	25,573,000	25,573,000	

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

PER SATUAN KERJA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ditjen Perumahan

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
420149 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I	19,115,699,000	0	19,115,699,000	0	0	0
033.07.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	7,252,924,000	0	7,252,924,000	0	0	0
4978 Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	7,252,924,000	0	7,252,924,000	0	0	0
4978.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	7,252,924,000	0	7,252,924,000	0	0	0
Volume :	7.00 Rekomendasi Kebijakan,		7.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	7,252,924,000	0	7,252,924,000	0	0	0
A RM	7,252,924,000	0	7,252,924,000	0	0	0
033.07.WA Program Dukungan Manajemen	11,862,775,000	0	11,862,775,000	0	0	0
5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	11,862,775,000	0	11,862,775,000	0	0	0
5578.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00]	11,712,775,000	0	11,712,775,000	0	0	0
Volume :	2.00 Layanan, Laporan,		2.00 Layanan, Laporan,		0.00 Layanan, Laporan,	
52 BELANJA BARANG	11,712,775,000	0	11,712,775,000	0	0	0
A RM	11,712,775,000	0	11,712,775,000	0	0	0
5578.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00]	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
Volume :	1.00 Unit, m2, Paket		1.00 Unit, m2, Paket		0.00 Unit, m2, Paket	
53 BELANJA MODAL	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
A RM	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420149/2023**



DS.6369-2305-6016-7231

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Dirjen Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker	:	(420149)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I
Sebesar	:	Rp. 19.115.699.000	(SEMBILAN BELAS MILIAR SERATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	19.115.699.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	19.115.699.000
-------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Revisi ke 07

Tanggal : 27 Desember 2023

Rekomendasi Tindak Lanjut Lhe Agar Melakukan Perbaikan Yaitu Sebagai Berikut:

1. Perencanaan Kinerja

A. Rekomendasi:

1. Renstra pada BP2P Jawa I sudah 5 Tahun, dan sebaiknya dilakukan reviu secara berkala untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya
2. Diperlukan cascading indikator kinerja agar dapat mengetahui setiap turunan dari program, sasaran strategis (SS) dan indikator sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP), indikator sasaran program (IKSP) dan sub IKSP, kegiatan, sasaran kegiatan (SK), indikator sasaran kegiatan (IKSK) serta sub IKSK di dalam lingkup tugas dan fungsi yang ada di BP2P Jawa I
3. Pengertian Renstra yaitu memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai
4. BP2P Jawa I agar mengumpulkan informasi atau bukti dukung yang berkaitan dengan perencanaan kinerja untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya

B. Tindak Lanjut:

1. Renstra pada BP2P Jawa I sudah 5 Tahun, dan sebaiknya dilakukan reviu secara berkala untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya
2. Sudah dibuatnya cascading indikator kinerja dan di bandingkan dengan sasaran organisasi baik dari program, sasaran strategis (SS) dan indikator sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP), indikator sasaran program (IKSP) dan sub IKSP, kegiatan, sasaran kegiatan (SK), indikator sasaran kegiatan (IKSK) serta sub IKSK
3. Telah dibuatnya strategi dan rincian terget kegiatan dan rencana kerja pada laporan monitoring evaluasi
4. Telah dibuatnya Notulen dalam penyusunan PK, serta bukti Keikutsertaan pimpinan dalam penyusunan PK seperti disposisi, nota dinas serta masukan dari pimpinan

2. Pengukuran Kinerja

A. Rekomendasi:

1. Agar melakukan reuiu Renstra secara berkala di tahun selanjutnya (Dalam proses Evaluasi paruh waktu Renstra secara keseluruhan di Lingkungan Ditjen Perumahan tahun 2020-2024 secara keseluruhan di lingkungan Ditjen Perumahan pada akhir tahun 2022 s/d saat ini)
2. Kualitas seluruh kriteria dokumen telah terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional/ format yang telah di tentukan
3. BP2P Jawa I agar melengkapi informasi atau bukti dukung yang berkaitan dengan pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya
4. Terkait adanya mekanisme pemberian Reward and Punishment terhadap hasil pengukuran kinerja adar dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun selanjutnya

B. Tindak Lanjut:

1. Dibuat nya SOP dalam pengumpulan data kinerja untuk mempermudah proses evaluasi kinerja
2. Sudah ada bukti supervisi berjenjang terkait pengukuran capaian kinerja dari pimpinan
3. Sudah dilengkapi bukti dukung terkait dengan pengukuran kinerja seperti dokumentasi, notulen, daftar hadir dan bukti dukung lainnya
4. Telah dilakukan pemberian reward sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 1061/KPTS/M/2019 tentang besaran Tunjangan Kinerja

Pelaporan Kinerja

A. Rekomendasi:

1. Penyusunan Laporan Kinerja perlu disampaikan kepada pimpinan entitas di atasnya dan diupload paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir
2. Pada laporan kinerja ke depannya, di dalam penyampaian keberhasilan/kegagalan kinerja perlu adanya inovasi sebagai upaya perbaikan/penyempurnaan
3. BP2P Jawa I agar melengkapi informasi atau bukti dukung yang berkaitan dengan dokumen Laporan Kinerja yang telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja
4. Perlu adanya inovasi agar penyesuaian strategi/kebijakan dapat memberikan dampak yang besar

B. Tindak Lanjut:

1. Telah di upload nya Laporan Kinerja pada aplikasi e-SAKIP
2. Telah di lakukan inovasi dan percepatan dalam mengumpulkan bukti dukung laporan kinerja
3. Sudah di lengkapi bukti dukung dalam penyusunan Laporan kinerja
4. Sedang dalam proses penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

A. Rekomendasi:

1. Peningkatan kinerja di setiap tahun agar lebih ditingkatkan kembali
2. Membeklakukan penerapan reward and punishment yang legal/ sesuai aturan atas pengukuran kinerja
3. Melakukan peningkatan kinerja agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meningkat, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

B. Tindak Lanjut:

1. Sudah dilakukan upaya dalam hal ke efektifan dan efisiensi pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan kinerja
2. Telah dilakukan pemberian reward sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 1061/KPTS/M/2019 tentang besaran Tunjangan Kinerja
3. Sudah dilakukan Reviu pada laporan monev bulanan dengan menjelaskan pekerjaan non fisik

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perumahan Dirjen Perumahan Nomor PW.0204-Dr/01 Tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2022, Belum tercapainya nilai secara maksimal dalam implementasi SAKIP di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun Anggaran 2022 di sebabkan sebagai berikut :

1. Belum lengkap nya bukti keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan internal terkait penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
2. Belum adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja.
3. Disposisi pimpinan berupa masukan/ koreksi pimpinan pada dokumen perencanaan yang disusun.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2022, maka dilakukan Upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Bentuk perbaikan yang dilakukan adalah :

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mengumpulkan kegiatan internal dalam hal penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
2. Membuat SOP pengumpulan Data Kinerja;
3. Mengumpulkan informasi atau bukti dukung yang berkaitan dengan perencanaan kinerja untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja menyajikan berbagai capaian keberhasilan dalam pelaksanaan strategis pada Tahun Anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam perjanjian kinerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif pada umumnya dan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada khususnya. Laporan kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2023.

Kendala-kendala tersebut satu persatu dapat diatasi hingga akhirnya semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tentunya dengan belajar dari proses pelaksanaan kegiatan tahun ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, diantaranya:

1. Melakukan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan agar dapat mencapai target yang diinginkan;
2. Perlu adanya perbaikan dalam melakukan perencanaan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak terjadi hambatan;
3. Membentuk tim monitoring baik ditingkat balai maupun ditingkat satker untuk melakukan pengendalian secara intensif;
4. Memberikan pemahaman lebih tentang program kegiatan BSPS agar tidak ada penerima Bantuan yang mengundurkan diri dari Program Tersebut.

PERMASALAHAN DAN KENDALA DALAM PROSES PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Peyediaan Perumahan Jawa I, utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut :

- Minimnya pegawai atau sumberdaya manusia yang mempunyai basic pendidikan teknis dan memiliki kompetensi yang handal di bidang teknis;
- Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih belum optimal;
- Koordinasi dan sinergitas Pemda yang rendah dalam penyusunan regulasi dan kebijakan;
- Ketersediaan data dan informasi yang sesuai, akurat dan terkini dalam penyusunan perencanaan;
- Kurangnya pegawai dengan status ASN untuk penempatan posisi pada jabatan teknis sebagai penanggung jawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi;
- Proses serah terima asset yang membutuhkan tahapan yang panjang;